

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Bidang Perhubungan. Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Visi RPJMD yaitu "Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua" serta misi RPJMD sebagai berikut:

- [1] Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan beradab melalui peningkatan pengetahuan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
- [2] Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- [3] Mewujudkan keterkaitan Nexus yang kuat antara ketahanan pangan ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
- [4] Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten / kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
- [5] Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
- [6] Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
- [7] Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal. Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2025 – 2029 disusun untuk mendukung visi dan misi RPJMD tersebut.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yaitu : "Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas" dengan Sasaran Strategis : [1] Meningkatnya

keselamatan Transportasi Provinsi, [2] Meningkatnya Layanan Transportasi, [3] Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah,

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026 disusun sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana terhadap bahan evaluasi atas pencapaian target dan realisasi untuk mencapai visi dan misi Perubahan RPJMD sampai dengan Triwulan III tahun 2025.

Palembang, 6 November 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GRAFIK	vi	
DAFTAR GAMBAR.....	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
I.1. Latar Belakang	1	
I.2 Landasan Hukum.....	6	
I.3 Maksud dan Tujuan	10	
I.4. Sistematika Penulisan.....	11	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
II.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target.....	12	
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25	
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	86	
II.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	92	
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	93	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....		94
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	94	
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	104	
III.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	110	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN		151
BAB V PENUTUP.....		163

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi.....	29
Tabel II.2	Tipe Terminal Berdasarkan Kewenangan Di Prov. Sumsel	33
Tabel II.3	Kinerja Pengelolaan Terminal Tipe B Di Prov. Sumsel	34
Tabel II.4	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring	35
Tabel II.5	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Jakabaring	36
Tabel II.6	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Jakabaring	36
Tabel II.7	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Jakabaring	37
Tabel II.8	Fasilitas Pelayanan Terminal Tipe B Petanang	38
Tabel II.9	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Petanang.....	38
Tabel II.10	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Petanang	39
Tabel II.11	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Petanang	39
Tabel II.12	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Randik	41
Tabel II.13	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Randik	41
Tabel II.14	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Randik	41
Tabel II.15	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Randik	42
Tabel II.16	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya.....	43
Tabel II.17	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya.....	43
Tabel II.18	Fasilitas Utama Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	44
Tabel II.19	Fasilitas Penunjang TerTerminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	44

Tabel II.20	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Kota Baru	46
Tabel II.21	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Kota Baru	46
Tabel II.22	Fasilitas Terminal Tipe B Kota Baru	46
Tabel II.23	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Kota Baru	47
Tabel II.24	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo	48
Tabel II.25	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo.....	49
Tabel II.26	Fasilitas Terminal Tipe B Lubuk Harjo.....	49
Tabel II.27	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Lubuk Harjo	49
Tabel II.28	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua	51
Tabel II.29	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Muara Dua	51
Tabel II.30	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Muara Dua	51
Tabel II.31	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Muara Dua	52
Tabel II.32	Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata Di Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel II.33	Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel II.34	Jumlah Trayek dan Bus Antar Kota Dalam Di Provinsi Sumsel.....	54
Tabel II.35	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2017 - 2021.....	56
Tabel II.36	Data Kecelakaan Lalu Lintas Per Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2021	56
Tabel II.37	Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	57
Tabel II.38	Rute dan Panjang Rel KA Divre III di Wilayah Sumbagsel	62
Tabel II.39	Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2021	63
Tabel II.40	Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan Tahun.....	65
Tabel II.41	Kondisi Eksisting Angkutan Sungai Dari Kota Palembang.....	67
Tabel II.42	Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai.....	68
Tabel II.43	Daftar Dermaga Sungai dan danau di Sumatera Selatan	69
Tabel II.44	Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin	71

Tabel II.45	Data Kapal Sungai yang Beroperasi pada Perairan Sumatera Selatan	73
Tabel II.46	Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan	73
Tabel II.47	Klasifikasi Alur Pelayanan Sungai	73
Tabel II.48	Jumlah Rambu Sungai Provinsi Sumatera Selatan.....	74
Tabel II.49	Tarif Angkutan Sungai	75
Tabel II.50	Jumlah Kunjungan Penumpang Lima Tahun 2022	79
Tabel II.51	Jumlah Kapal Yang Beroperasi.....	80
Tabel II.52	Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api - api.....	80
Tabel II.53	Intensitas Angkutan kendaraan Berdasarkan Golongan.....	81
Tabel II.54	Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api -api.....	82
Tabel II.55	Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan	84
Tabel II.56	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang.....	85
Tabel II.57	Lalu Lintas Angkutan Udara Barang Melalui Bandara SMB II PLM.....	86
Tabel II.58	Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Transportasi Berdasarkan Kewenangan	89
Tabel III.1	Telaah Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Dengan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan	95
Tabel III.2	Telaah Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD	100
Tabel III.3	Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi Terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten / Kota dan Renstra K/L.....	103
Tabel III.4	Tabel Pohon Kinerja OPD	106
Tabel III.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	108
Tabel III.6	Penentuan Strategi.....	111
Tabel III.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	116

DAFTAR GAMBAR

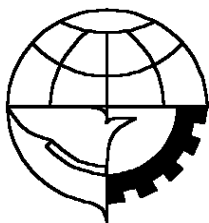
	Halaman
Gambar II.1	Terminal Tipe B Jakabaring..... 35
Gambar II.2	Terminal Tipe B Petanang..... 38
Gambar II.3	Terminal Tipe B Randik..... 40
Gambar II.4	Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya 43
Gambar II.5	Terminal Tipe B Martapura..... 45
Gambar II.6	Terminal Tipe B Lubuk Harjo..... 48
Gambar II.7	Terminal Tipe B Muara Dua..... 50
Gambar II.8	Peta Jalur Kereta Api Sumatera Selatan 62
Gambar II.9	Kapal Motor Ketek..... 76
Gambar II.10	Kapal Long Boat dan Speed Boat..... 77

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1 Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata Di Prov. Sumsel	53
Grafik II.2 Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi Di Prov. Sumsel	54
Grafik II.3 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017-2021	56
Grafik II.4 Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	58
Grafik II.5 Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api Di Prov. Sumsel Tahun 2017 – 2021	63
Grafik II.6 Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan.....	82
Grafik II.7 Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api – api	83
Grafik II.8 Jumlah Penumpang Berangkat Dari Bandara SMB II Palembang	85
Grafik II.9 Jumlah Penumpang Datang Ke Bandara SMB II Palembang	86

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) disusun setelah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 merupakan amanat dari UU No. 25/2004, UU No. 23/2014, PP No. 8/2008, dan Permendagri No. 86/2017, serta disesuaikan dengan arah RPJPD 2025–2045 dan SE Mendagri 600.3.1/1402/SJ 2023. Rencana Kerja [Renja – Perangkat Daerah] merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 [satu] tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Renja PD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan kewenangan urusannya sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan urusan bidang perhubungan atau yang menyangkut pelayanan terhadap jasa transportasi memuat kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam melayani masyarakat dari asal ke tujuan dan atau sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan. Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sektor transportasi diarahkan pada dimensi pembangunan spasial berbasis kewilayahan, sehingga diharapkan pembangunan transportasi dapat menjangkau sampai ke daerah terisolir di setiap daerah. Pembangunan yang berlandaskan pada azas pemerataan yang

berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kewilayahan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi ke bawah.

Transportasi merupakan matrantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang orang berkembang sangat dinamis, berperan dalam mendorong dan menunjang segala lapisan aspek kehidupan baik dalam politik, ekonomi, social dan budaya mau pun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi di wilayah Sumatera Selatan pada hakekatnya untuk mendukung tercapai pembangunan daerah Sumatera Selatan menuju kesejahteraan rakyat, adil dan merata sampai kedaerah pelosok.

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk suatu jaringan sistem pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi meliputi sarana, prasarana, tata guna lahan dan pergerakan yang terjadi.

Kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi diharapkan mampu menjawab tantangan dinamika perekonomian semakin kompleks. Kelancaran arus distribusi barang dan penumpang menjadi hal yang pokok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah terisolir, sehingga perlu adanya keseimbangan antara *supply and demand*. Untuk mengejar target kebutuhan *supply and demand* perlu dilakukan sinkronisasi program kegiatan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mendorong peran serta sektor swasta dalam pembangunan melalui program sponsorship atau melalui kerjasama Pemerintah Swasta atau Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Pertumbuhan sektor transportasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro, antara lain keberhasilan dalam pembangunan transportasi yang bersinergi akan berdampak pada ukuran nilai tambah dalam pembentukan Produk Domestik Brutto serta multiplier effect yang ditimbulkannya terhadap sektor-sektor lainnya. Selain itu juga dapat berdampak pada kemampuan dalam meredam laju inflasi dengan kelancaran arus distribusi barang hingga ke pelosok wilayah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan perkembangan transportasi yang semakin modern dan dinamis, perlu dikaitkan dengan peran yang cukup penting dalam teknologi informasi untuk penyebarluasan informasi dasar bagi pengguna jasa transportasi.

Kebutuhan transportasi makro di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, hal ini perlu dilakukan antisipasi dengan ketersediaan sarana/prasarana dari masing-masing moda dan mewujudkan sistem pelayanan transportasi yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur, efektif serta efisien dan mewujudkan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan serta terintegrasi dengan sistem transportasi Kabupaten/Kota maupun sistem transportasi nasional. Dengan demikian dibutuhkan perencanaan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara serta pos dan telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan agar program kerja dan kegiatan tahunan lebih efektif dan efisien baik dari

segi kinerja maupun yang dibutuhkan masing-masing kawasan dan jaringan pelayanan transportasi yang dikembangkan sebagai penunjang kegiatan ekonomi serta program pembangunan lainnya.

Penanganan kewenangan urusan bidang perhubungan dengan tantangan global yang semakin kompleks pada era digitalisasi menuntut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan teknologi informasi perhubungan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi apalagi menghadapi revolusi industri 4.0 menjadi hal yang sangat penting dari bagian proses terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dimana masyarakat membutuhkan akses informasi terhadap layanan jasa transportasi untuk membuka berbagai macam peluang ekonomi kreatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jaringan pelayanan informasi perhubungan juga harus mencapai ke pelosok daerah terisolir, sehingga pemerataan bidang transportasi tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat perkotaan saja.

Pemanfaatan teknologi informasi perhubungan untuk aktivitas perekonomian dinilai sangat mempengaruhi lancarnya perekonomian individu atau pun kerakyatan dan bahkan dapat menciptakan berbagai peluang usaha. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat memberi akses bagi produk, organisasi, masyarakat dan pemerintah. Dengan berkembangnya teknologi informasi perhubungan, maka peran informasi publik sangat dominan dalam usaha mencerdaskan masyarakat. Informasi perhubungan melalui peran informasi teknologi perhubungan yang dilakukan untuk penyebaran informasi terkait jasa transportasi melalui berbagai media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Komunikasi massa dan informasi transportasi yang tepat memiliki peran strategis sebagai komplemen dalam teknologi informasi perhubungan banyak berperan pada tingkatan teknis.

Dengan demikian teknologi informasi transportasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk menunjang kehidupan bermasyarakat yang berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk tampil gemilang dalam menghadapi persaingan global. Perkembangan teknologi informasi perhubungan yang semakin pesat mendorong peran strategis sebagai modal dasar pembangunan untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

Wilayah Sumatera Selatan mempunyai cakupan wilayah yang cukup besar atau sekitar 91.592,43 Km² dengan jumlah penduduk $\pm$ 8,4 juta jiwa dengan pembagian wilayah administrasi terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Sumatera Selatan memiliki potensi energi serta hasil bumi yang cukup besar, harus memiliki sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah serta sustainable yang ramah lingkungan, dengan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan yang ada harus mampu mengeksplorasi potensi yang ada. Sesuai dengan arahan dan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Selatan 2025 – 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 tahap ke Satu bahwa pertumbuhan

ekonomi diharapkan diakhir periode RPJMD di angka 7,4 - 8,1 persen. Untuk mendukung penguatan struktur ekonomi serta pertumbuhan ekonomi diatas, maka sektor infrastruktur transportasi memegang peranan strategis.

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan luas wilayah sebesar 87.421,24 km². Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan posisi geografisnya terdiri dari :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi,
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung

Untuk itu peranan, tantangan dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom provinsi di bidang perhubungan.

Sebagai PD yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang perhubungan, arah dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus mendukung RPJMD tahap ke Satu periodisasi 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diharapkan mengarah pada perbaikan sistem transportasi dengan pendekatan pembangunan infrastruktur perhubungan yang strategis berbasis spasial dengan potensi kewilayahan.

Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu terwujudnya jaringan transportasi wilayah yang sustainable, multimoda, tumbuh merata serta keterpaduan multimoda yang bersifat massal. Adanya jaringan transportasi wilayah akan menimbulkan simpul-simpul transportasi yang strategis diantaranya terminal, stasiun, pelabuhan serta bandar udara. Transportasi massal yang berteknologi tinggi diantaranya Light Rail Transit Sumatera Selatan.

Penyempurnaan kebijakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah bidang perhubungan dilakukan dalam upaya meningkatkan baik keandalan maupun kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Kelaikan prasarana transportasi diantaranya ketersediaan :

1. Peningkatan jaringan transportasi jalan yang menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan serta simpul transportasi berupa terminal di setiap wilayah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan prasarana angkutan sungai dan danau yang menjangkau daerah terpencil;
3. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan dan Laut Tanjung Api-api;
4. Mendorong Pembangunan New Palembang Port di Tanjung Carat;
5. Mendorong Pembangunan terminal terpadu multimoda Karya Jaya;
6. Mendorong penyediaan infrastruktur angkutan batu bara di Sumatera Selatan.

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renja Perangkat Daerah :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja

Pembentukan Tim penyusun Renja dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTD yang ada. Tugas tim penyusun Renja dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah.

b. Orientasi Mengenai Renja

Orientasi mengenai Renja kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja.

Bahan orientasi mengenai Renja, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pengumpulan data dan informasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan Renja bidang perhubungan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahunan pelaksanaan Renja periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan kewilayahan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perhubungan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
 - a. RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, dan Renja K/L;
 - b. RPJMD Kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renja PD periode lalu;
4. Data statistik perhubungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

I.2 Landasan Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
5. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Instruksi Presiden. No. 9 tahun 2000. Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional;
8. Inpres 3/2010 ttg Program Pembangunan yang Berkeadilan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
15. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Darat yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
16. Peraturan tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan dan Transportasi Laut yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
17. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Udara yaitu Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional
18. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Kereta Api yaitu Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

19. Permendagri 67 Tahun 2011 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
20. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029
24. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan pada tahun berjalan;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra Dinas Perhubungan periode waktu 2025 – 2029;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang termaksud di dalam Renstra periode waktu 2025 – 2029;

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan atau transportasi;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

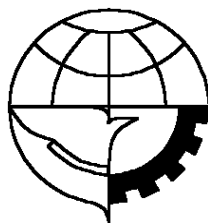
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB II

HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN III

II.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Pelaksanaan Renja Perhubungan tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan tahun ke – 1 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran, program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersaji dalam realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
10.	Koordinasi Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%
11.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%
12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
13.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%
14.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%
15.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
16.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
17.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
18.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%
19.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%
20.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
21.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
22.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
23.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
24.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%
25.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%
26.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%
27.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	100%

	Undangan	Disediakan	
28.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%
29.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
30.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
31.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
32.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	100%
33.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100%
34.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100%
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
35.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
36.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
37.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%
38.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%
39.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%
40.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100%
41.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	100%
42.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%
43.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
44.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
I	Peningkatan Pelayanan BLUD		

45.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%
-----	--	--	------

Penjelasan pokok – pokok anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program wajib rutin yang terdiri dari 9 kegiatan serta 45 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp.44.096.739.553 mengalami efesiensi anggaran sebesar Rp.1.810.893.116 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp.42.285.846.437 penurunan ini tidak mempengaruhi target kinerja program secara keseluruhan sebesar 92%;
2. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu sub kegiatan Rp.700.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp.452.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.800.000 atau sebesar 1.06%;
3. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 30.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.900.000 atau sebesar 16.33%;
4. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 30.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.400.000 atau sebesar 48.00% ;
5. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp.35.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan atau realisasi keuangan sebesar Rp. 16.010.000 atau sebesar 45.74%;
6. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 30.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
7. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 70.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 50.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %;
8. Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 70.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 50.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;

9. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu sub kegiatan sebesar Rp. 20.458.808.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 23.058.808.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.241.648.904 atau sebesar 66.10%;
10. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 414.222.353 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 330.095.000 atau sebesar 79.69%;
11. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 35.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
12. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 25.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
13. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 25.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
14. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp.50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
15. Pada Sub Kegiatan Pengamanan Barng Milik Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 207.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
16. Pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
17. Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 65.500.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
18. Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 90.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 125.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah

- ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.160.000 atau sebesar 6.53%;
19. Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai pagu sub kegiatan sebesar Rp. 60.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 32.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
 20. Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.475.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 282.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.57.550.700 atau sebesar 20.37%;
 21. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 175.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 156.110.250 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.988.610 atau sebesar 65.33%;
 22. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp.75.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp.40.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
 23. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp.240.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp.40.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000 atau sebesar 50.00%;
 24. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 300.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 61.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
 25. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 namun realisasi capaian tetap mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
 26. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
 27. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan kegiatan sebesar Rp. 150.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 120.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.200.000 atau sebesar 33.50%;

28. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 20.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 12.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.680.000 atau sebesar 14.00%;
29. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pagu sub kegiatan sebesar Rp.150.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.100.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.145.450 atau sebesar 71.15%;
30. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sub kegiatan sebesar Rp.100.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.433.000 atau sebesar 34.43%;
31. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 980.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 492.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 212.764.140 atau sebesar 43.20%;
32. Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 330.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. Rp. 20.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.798.392 atau sebesar 8.99%;
33. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sub kegiatan sebesar Rp. 2.750.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
34. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sub kegiatan sebesar Rp. 1.000.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.1.490.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
35. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sub kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
36. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD sub kegiatan sebesar Rp. 10.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.908.500 atau sebesar 19.09%;

37. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sub kegiatan sebesar Rp. 768.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 340.935.338 atau sebesar 44.39%;
38. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sub kegiatan sebesar Rp. 8.362.543.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.6.838.251.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.235.437.000 atau sebesar 61.94%;
39. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sub kegiatan sebesar Rp. 225.500.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.023.754 atau sebesar 36.37%;
40. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sub kegiatan sebesar Rp. 576.500.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.611.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 291.517.675 atau sebesar 47.67%;
41. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sub kegiatan sebesar Rp. 300.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.285.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
42. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
43. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sub kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.300.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 196.030.000 atau sebesar 65.34%;
44. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sub kegiatan sebesar Rp. 2.850.666.200 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.633.353.950 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 507.548.850 atau sebesar 80.18%;
45. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sub kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.230.000.000 sehingga

realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.840.050 atau sebesar 32.10%;

46. Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sub kegiatan sebesar Rp. 1.000.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.4.789.600.884 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
1.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
B	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100%
C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
3.	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100%
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%
D	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
5.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	100%
6.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%
E.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		
7.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	100%
F.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
8.	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%
9.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100%
10.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	

G	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Jota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	-
11.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	100%
12.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
H.	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	
13.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	100%
I.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	100%
14.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	
J.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	
15.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan program wajib non pelayanan dasar sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang

terdiri dari 10 kegiatan dan 15 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 20.523.235.987 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.121.333.477 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 16.407.902.510, efisiensi ini tidak mempengaruhi target kinerja program secara keseluruhan sebesar 0.720 Rasio;

2. Pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 4.043.895.987 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.5.702.161.710 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.021.550.287 atau sebesar 17.92%;
4. Pada Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) pagu sub kegiatan sebesar 7.100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.6.908.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 265.492.861 atau sebesar 3.84%;
5. Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) pagu sub kegiatan sebesar Rp. 565.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 547.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 204.059.500 atau sebesar 37.27%;
6. Pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 800.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 472.000.800 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp 128.247.620 atau sebesar 27.17%;
7. Pada Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.100.000.000 mengalami perubahan sebesar Rp. 90.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.160.000 atau sebesar 3.51%;
8. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin pagu sub kegiatan sebesar Rp.50.000.000 mengalami perubahan sebesar Rp.27.900.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%
9. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ pagu sub kegiatan Rp.100.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;

10. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal pagu sub kegiatan sebesar Rp.250.000.000 mengalami perubahan sebesar Rp.150.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.745.800 atau sebesar 61.16%;
11. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.250.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
12. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 5.964.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.697.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.472.501 atau sebesar 2.33%
13. Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.150.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.165.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.527.327 atau sebesar 59.11%;
14. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
15. Pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan Rp.400.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 405.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
16. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp.350.340.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.142.340.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	100%
B	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	
2.	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100%
C	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	
3.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barng, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%

	Terintegrasi Secara Elektronik		
D.	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKP	100%
4.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	100%
E.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun	
5.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%
6.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	100%
7.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	
F.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
8.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
9.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
G	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Pelayaran sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pelayaran merupakan program wajib non pelayanan dasar sub urusan Pelayaran yang terdiri dari 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 12.500.000.000 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.846.263.500 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. Rp.11.653.737.500 sehingga target kinerja program secara keseluruhan sebesar 3702 trip;
2. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp. 650.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 638.997.500 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.454.000 atau sebesar 2.57%;
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 400.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 228.730.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.672.900 atau sebesar 3.35%;
4. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp.150.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 108.155.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.460.000 atau sebesar 3.20%;
5. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.1.000.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 952.040.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 283.141.209 atau sebesar 29.74%;
6. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 53.320.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah

- ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.50.571.389 atau sebesar 94.85%;
- 7. Pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.8.000.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 7.825.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.925.012.287.30 atau sebesar 24.60%;
 - 8. Pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.1.000.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 791.400.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.365.561.143 atau sebesar 46.19%
 - 9. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 191.365.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.635.750 atau sebesar 6.60%;
 - 10. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 650.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 504.730.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.265.187.817 atau sebesar 52.54%;

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
1.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	100%
B	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi	
2.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	100%

3.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	
C.	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus	100%
4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perkeretaapian merupakan program wajib non pelayanan dasar sub urusan Perkeretaapian yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 728.282.300 mengalami efesiensi anggaran sebesar Rp.209.423.800 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp.518.858.550 sehingga target kinerja program secara keseluruhan sebesar 2.126.341 orang terlayani dengan angkutan kereta api;
2. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 253.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 358.497.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
3. Pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 236.690.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;
4. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

pagu sub kegiatan sebesar Rp. 138.592.300 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 106.493.650 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0%;

5. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 53.867.900 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.595.000 atau sebesar 2.96%;

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Sistem transportasi yang terintegrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi akan menunjang berbagai kegiatan ekonomi untuk [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan transportasi udara.

Pertumbuhan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari berbagai event yang diselenggarakan di Sumatera Selatan baik nasional maupun internasional. Semua itu membutuhkan transportasi yang baik. Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda transportasi yang lengkap baik transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, dan transportasi laut.

Profil transportasi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada penjelasan sebagai berikut :

II.1.1 Transportasi Darat

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 901/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor Primer-2 bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki panjang jalan, panjang jalan provinsi 2.113,747 Km

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah :

(a) Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung – Pematang Panggang – Simpang Penyandingan – Kayu Agung – Simpang Indralaya – Palembang – Betung – Batas Jambi sepanjang 405,32 Km dan melewati 5 (lima) kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

(b) Lintas Barat Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura – Baturaja – Simpang Sugiwaras – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Terawas – Batas Jambi sepanjang 472,35 Km dan melewati 6 (enam) kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

(c) Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari 2 (dua) jalan penghubung :

(1) Simpang Indralaya – Prabumulih – Muara Enim

Jalan ini sepanjang 147,46 Km melewati 3 (tiga) kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2) Betung – Sekayu – Muara Beliti

Sepanjang 253,43 Km dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(d) Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar 2 (dua) jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan – Simpang Kepuh – Kurungan Nyawa – Martapura sepanjang 138,74 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(e) Penghubung Alternatif Bagian Tengah

Jalan penghubung alternatif ini dilayani ruas Prabumulih – Simpang Prabumulih – Simpang Beringin – Baturaja sepanjang 106,14 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(f) Penghubung Alternatif Bagian Barat (Tengah Barat)

(1) Ruas Jalan Martapura – Ujan Mas – Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum

memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

- (2) Ruas Jalan Lahat – Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Bengkulu
Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti – Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5 – 4,5 meter.
- (3) Ruas Jalan Pagar Alam – Tanjung Raya – Batas Bengkulu
Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Kondisi angkutan umum yang melintasi Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1892 kendaraan per hari dan 1092 smp/jam. Asal daerah yang paling banyak adalah dari Kota Palembang yaitu sebesar 17,03%, urutan kedua yang terbanyak adalah Kabupaten OKU Selatan 10,92%, Kota Lubuk Linggau berada di urutan ketiga 9,17%. Sedangkan daerah tujuan yang paling banyak Kota Palembang 17,92%, Kabupaten Ogan Ilir 7,04% dan kabupaten/kota lainnya.

Jaringan angkutan barang berupa batubara di wilayah Sumatera Selatan yaitu :

- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Tanjung Lago (Banyuasin)
- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim
Muara Enim – PLTU – Tanjung Enim
- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- ❖ Pendopo, Muara Enim
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Kertapati, Palembang
- ❖ Merapi Timur, Lahat
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin
- ❖ Merapi Timur, Lahat
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- ❖ Merapi Barat, Lahat
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin
- ❖ Merapi Barat, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang

❖ Merapi Selatan, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin

Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pertambangan serta menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas umum, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap operasional jalan khusus angkutan batubara di wilayah provinsi, khususnya yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak swasta. Pengoperasian jalan khusus ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi beban jalan umum, yang selama ini kerap mengalami kemacetan dan kecelakaan akibat lalu lintas truk batubara. Dengan dialihkannya angkutan batubara ke jalur khusus, telah terjadi peningkatan signifikan dalam aspek keselamatan jalan, pengurangan kerusakan infrastruktur publik, serta menurunnya tingkat gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan turut berperan aktif dalam:

- Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan kelancaran operasional jalan khusus.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengalihan truk batubara dari jalan umum ke jalur khusus.
- Memberikan rekomendasi teknis untuk peningkatan standar keselamatan, kelayakan operasional, dan integrasi sistem logistik berbasis darat.

Untuk mewujudkan Langkah strategis tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan efisiensi logistik nasional. Di masa mendatang seiring dengan pengembangan jaringan jalan khusus yang lebih luas dan terintegrasi serta mendukung kebijakan pusat melalui Kementerian Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong implementasi kebijakan Zero Over Dimensi Over Loading (ODOL).

Sebagaimana diketahui Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya mineral berupa Batubara yang cukup besar dan tersebar di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagaimana daerah penghasil batubara lainnya, isu angkutan batubara selalu

memiliki potensi gesekan terhadap lingkungan seperti gangguan penggunaan jalan umum, kerusakan jalan dan lain sebagainya.

Investasi dan gerak ekonomi mesti tetap berjalan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang kondusif, untuk itu diperlukan adanya pemecahan atau solusi atas berbagai potensi permasalahan yang terjadi. Permasalahan angkutan batubara tersebut sedapat mungkin diminimalisir dengan memenuhi infrastruktur pembangunan jalan khusus ataupun moda transportasi lainnya seperti Kereta Api.

Pengangkutan batubara merupakan elemen krusial dalam mendukung perekonomian dan keberhasilan distribusi batubara keberangkatan dari lokasi awal tambang ke lokasi tujuan seperti pelabuhan barang, stasiun khusus barang dan pusat industri lainnya sangat bergantung pada keberadaan jaringan transportasi angkutan barang yang efektif dan efisien. Kereta api menjadi moda transportasi pilihan karena mampu mengangkut volume besar batubara dalam sekali perjalanan dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan angkutan darat.

Selain itu, penggunaan kereta api juga berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas serta menurunkan emisi karbon, sehingga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Dengan kapasitas pengangkutan yang besar, kereta api mampu mengurangi penggunaan truk berat yang selama ini menjadi penyebab kerusakan jalan dan gangguan keselamatan di jalan umum.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi angkutan batubara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong ketersediaan terwujudnya jaringan transportasi angkutan barang dengan fasilitasi, kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Adapun salah satu fokus pengerjaan hal tersebut adalah berupaya mengembangkan jaringan rel kereta api ataupun stasiun khusus yang berada pada potensi lokasi di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya mendukung perluasan jalur rel kereta api, tetapi juga memperkuat infrastruktur pendukung seperti terminal multimoda dan fasilitas penunjang lainnya untuk memastikan kelancaran pengiriman batubara melalui peti kemas. Dukungan ini sejalan dengan regulasi yang melarang angkutan batubara melalui jalan umum, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.

Melalui sinergi yang baik, diharapkan pengangkutan batubara menggunakan kereta api di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan optimal, memberikan manfaat ekonomi yang besar, serta menjaga keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan Masyarakat.

Tabel II.1
Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi

NO.	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS	V/C RATIO			
						2019	2020	2021	2022
1	39			PLAJU – SP. SUNGAI PINANG-BTS. KAB. OKI (BANYUASIN)	2990,1	0.19	0.22	0.18	0,22
2	39	12	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	2453	0.3	0.28	0.34	0,34
3	39	13	K	JLN.KAPT. ABDULLAH – JLN. ROBANI KADIR (PALEMBANG)	2843	0.21	0.19	0.21	0,22
4	40			BTS. KAB. BANYUASIN – KAYU AGUNG	4582	0.17	0.18	0.16	0,18
5	41	11	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	1335	0.2	0.17	0.15	0,35
6	41	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2990,1	0.16	0.2	0.19	0,19
7	41	13	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO (PALEMBANG)	1598,16	0.48	0.49	0.51	0.53
8	41	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	2990,1	0.26	0.25	0.25	0.24
9	41	16	K	JLN. RADIAL (PALEMBANG)	2428	0.44	0.41	0.41	0.4
10	41	17	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	7033,1	0.38	0.42	0.43	0.46
11	42	11	K	JLN. KOLONEL ATMO (PALEMBANG)	1504,2	0.38	0.38	0.36	0.36
12	43	11	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	2453	0.38	0.38	0.36	0.36
13	43	12	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	2422	0.46	0.48	0.48	0.49
14	43	13	K	JLN. PSW SUBEKTI (PALEMBANG)	1746,4	0.72	0.65	0.65	0.6
15	43	14	K	JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	1335	0.07	0.07	0.07	0.07
16	43	18	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG / JLN. CIK AGUS KEMAS (PALEMBANG)	1288,38	0.13	0.13	0.13	0.13
17	43	19	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) – BTS. KAB. BANYUASIN	1406,1	0.35	0.35	0.34	0.33
18	43	20	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN	1445	0.42	0.39	0.48	0,48
19	43	21	K	JL. PENDIDIKAN – JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	1445	0.21	0.21	0.2	0.2
20	44	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)		0.44	0.46	0.48	0.49
21	44	12	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	4582	0.46	0.48	0.48	0.49
22	44	13	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2494	0.34	0.34	0.33	0.32
23	44	14	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS. BANYUASIN	2843	0.41	0.41	0.4	0.39
24	44	14.	K	BTS. KOTA PALEMBANG – KENTEN LAUT (BANYUASIN)	5510	0.52	0.53	0.56	0.57

		A							
25	44	15	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	5611,94	0.14	0.17	0.18	0.2
26	44	17	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	5916,76	0.44	0.44	0.45	0.45
27	44	18	K	JLN. ADI SUCIPTO – BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	5698,72	0.33	0.35	0.36	0.41
28	44	19	K	JLN. H. M. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	1750	0.65	0.65	0.6	0.6
29	46			SP. MERANJAT – BTS. KAB. MUARA ENIM	1750	0.18	0.2	0.17	0,19
30	47			BTS. KAB. OGAN ILIR - BERINGIN	5611,76	0.19	0.21	0.18	0,19
31	50	11	K	JLN. SOETOMO (BATURAJA)	4582	0.23	0.24	0.2	0,21
32	51			TANJUNG RAJA – SP. TAMBANG RAMBANG	5698,72	0.18	0.16	0.14	0,16
33	52			SP. TAMBANG RAMBANG – BTS. KAB. OKI	5510	0.1	0.11	0.08	0,09
34	53			BTS. KAB. OGAN ILIR – LUBUK BATANG	1445	0.08	0.09	0.06	0,08
35	54			SP. PENYANDINGAN – BTS. KAB. OKUT	1445	0.23	0.26	0.24	0,24
36	55			BTS. KAB. OKI – SP. KEPUH	1406,1	0.2	0.22	0.19	0,21
37	56			SP. KEPUH – KURUNGAN NYAWA	1504,2	0.19	0.22	0.21	0,21
38	57			KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	2453	0.18	0.22	0.21	0,22
39	58			KURUNGAN NYAWA – GUMAWANG	1335	0.21	0.2	0.24	0,23
40	59			GUMAWANG – PETANGGAN	1288,38	0.2	0.21	0.18	0,19
41	60			PETANGGAN – TJ. KEMUNING – BTS. KAB. OKI	1746,4	0.18	0.19	0.16	0,18
42	61			DABUK REJO – BTS. KAB. OKUT	1598,16	0.1	0.12	0.09	0,10
43	62			BATURAJA – BTS. KAB. OKUT	2990,1	0.3	0.25	0.28	0,28
44	62	11	K	BTS. KAB. OKU – SP. MARTAPURA	991	0.4	0.4	0.4	0.4
45	63			MARTAPURA – SP. MARTAPURA	1335	0.18	0.21	0.24	0,24
46	64			SP. MARTAPURA – MUARA DUA	2453	0.21	0.24	0.23	0,23
47	65			MUARA DUA – KOTA BATU – BTS. PROV. LAMPUNG	2453	0.22	0.19	0.21	0,22
48	66			MUARA DUA – SP. HAJI	1406,1	0.19	0.22	0.18	0,17
49	67			SP. HAJI – SP. CAMPANG	1598,16	0.23	0.18	0.14	0,17
50	68			SP. CAMPANG – UJAN MAS – BTS. PROV. BENGKULU	1288,38	0.14	0.12	0.08	0,09
51	69			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	2679,95	0.33	0.34	0.35	0.36
52	70			BTS. KAB. MUBA – SP. AIR ITAM	2453	0.26	0.15	0.07	0,09
53	71			SP. AIR ITAM – SP. TALANG BULANG	1659,84	0.63	0.65	0.65	0.67
54	72			SP. SUGIHWARAS – BTS. KAB. LAHAT	2538,9	0.21	0.17	0.12	0,14
55	73			BTS. KAB. MUARA ENIM – SP. AIR DINGIN	2244,6	0.32	0.33	0.33	0.34
56	74			TEBING TINGGI – TANJUNG RAYA	2462,733	0.25	0.28	0.3	0.31
57	75			TANJUNG RAYA – BTS. PROV. BENGKULU	2538,9	0.19	0.21	0.23	0.24

58	76			PAGARALAM – TANJUNG RAYA	1925,1	0.4	0.44	0.46	0.48
59	78			MUARA SIBAN – SP. EMBACANG	2648,1	0.15	0.16	0.18	0.2
60	82			SP. PERIUK – TUGU MULYO – TERAWAS	1925,1	0.048	0.05	0.06	0.059
61	83			TERAWAS – TABATINGGI – MAUR	2513,511	0.4	0.42	0.42	0.43
62	84			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	1989,27	0.12	0.13	0.16	0.18
63	85			LEMBAK – BTS. KAB. OGAN ILIR	1659,84	0.24	0.11	0.1	0,12
64	87			JLN. SAUNG NAGA – TUGU BATU KUNING	2244,73	0.16	0.16	0.14	0,15
65	88			JLN. KTM RAMBUTAN – BTS. KAB. MUARA ENIM	5611,76	0.23	0.26	0.24	0,24
66	89			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA – BTS. KAB. OGAN ILIR	5916,76	0.22	0.2	0.19	0,19
67	90			JLN. PRABUMULIH – SP. MEO	4582	0.16	0.08	0.13	0.13
68	91			JLN. SP. BELIMBING – PENDOPO (PALI)	5698,72	0.13	0.07	0.15	0.14
69	92			JLN. AKSES MENUJU TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	2453	0.18	0.21	0.28	0.28
70	93			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKOMORO (BANYUASIN)	1335	0.18	0.19	0.17	0.18
71	94			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKAJADI (BANYUASIN)	1335	0.18	0.17	0.19	0.19
72	95			TEBING TINGGI – PENDOPO	4582	0.2	0.19	0.21	0.20
73	96			TJ. CERMIN – PERANDONAN	2538,74	0.33	0.29	0.34	0.33
74	97			KEBAN AGUNG – SP. TJ. ARO	2538,74	0.2	0.19	0.21	0.20
75	98			MUARA RUPIT- KARANG DAFO – SP.4 KELINGI / a (BTS. MUARA)	2822	0.2	0.22	0.22	0,22
76	99	21	K	JLN. HANDAYANI – TUGU MULYO	2765	0.21	0.22	0.22	0,23
77	100			BTS. KAB. PALI – SP. SEMAMBANG	2654	0.18	0.19	0.21	0,21
78	101			SP.3 MARGA BARU (BTS. MURATARA) – MUARA LAPITAN	2765	0.2	0.19	0.22	0,22
79	102			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) – BTS. KAB. MURA	2622	0.21	0.23	0.22	0,23
80	103			SP. RAJA – MODONG	2742	0.2	0.2	0.23	0,23
81	104			LEMBAK – GELUMBANG	1435	0.2	0.21	0.2	0,21
82	105			SUNGAI DUA – SP. INPRES RSA – MUARA SUGIHAN	1615	0.15	0.17	0.18	0,19
83	106			SP. INPRES RSA – MUARA PADANG	1615	0.14	0.16	0.18	0,18
84	107			MUARA PADANG – MUARA SUGIHAN	1627	0.13	0.15	0.18	0,18
85	108			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	2750	0.2	0.19	0.21	0,20
86	109			TRANS SP2 TANAH ABANG – SP. TANAH ABANG	2567	0.18	0.19	0.2	0,19
87	110			SUMBU SARI – SURYA ADI	1627	0.12	0.14	0.17	0,17
88	111			LUBUK SEBERUK – SURYA ADI	1627	0.13	0.15	0.17	0,17
89	112			BETUNG – PETANGGAN	2781	0.16	0.19	0.21	0,21

90	113		GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUK)	2581	0.21	0.22	0.3	0,29
91	114		JLN. AKSES JEMBATAN CEMPAKA – TRANS SP2 TANAH ABANG	5916,76	0.35	0.37	0.38	0,38
92	115		JL. MATA MERAH (KOTA PALEMBANG) – JLN. MERAH MATA KAB. BANYUASIN	2581	0.22	0.25	0.25	0,26
	RATA – RATA				0,26	0,25	0,25	0,31

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2023

Tabel II.2
Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2023 - 2024

NO	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	Kapasitas (SMP/JAM)	V/C Rasio	
						2023	2024
1	1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)	2.834,00	0,33	0,33
2	1	2	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	3.643,00	0,40	0,40
3	1	3	K	JLN. KOL ATMO (PALEMBANG)	5.881,00	0,37	0,37
4	1	4	K	JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	2.652,00	0,51	0,51
5	1	5	K	JLN. KOL. AHMAD BADARUDDIN - JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	2.940,50	0,51	0,51
6	1	6	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	3.421,00	0,60	0,60
7	1	7	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	2.842,00	0,44	0,44
8	1	8	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	3.324,00	0,58	0,58
9	1	9	K	JLN. WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	3.258,00	0,35	0,35
10	1	10	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO (PALEMBANG)	3.000,00	0,76	0,76
11	1	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)	2.492,00	0,62	0,62
12	1	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2.940,50	0,59	0,59
13	1	13	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	2.290,00	0,59	0,59
14	1	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	3.322,00	0,33	0,33
15	1	15	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	3.000,00	0,54	0,54
16	1	16	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN (PALEMBANG)	2.940,50	0,48	0,48
17	1	17	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	2.940,50	0,43	0,43
18	1	18	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	3.197,50	0,78	0,78
19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	3.013,00	0,76	0,76

20	1	20	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS. BANYUASIN	2.690,00	0,39	0,39
21	1	21	K	JL. PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	2.290,00	0,26	0,26
22	1	22	K	JLN. KAPT ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	3.048,00	0,46	0,46
23	1	23	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) - BTS. KAB. BANYUASIN	2.490,00	0,41	0,41
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	3.196,00	0,54	0,54
25	1	25	K	BTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	2.530,00	0,40	0,40
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	2.346,97	0,37	0,37
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAH (PALEMBANG) - MERAH MATA (BTS. BANYUASIN)	2.490,00	0,28	0,28
28	1	28	K	JLN. ADI SUCIPTO - BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	2.690,00	0,45	0,45
29	2			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKAJADI (BANYUASIN)	2.690,00	0,35	0,35
30	3			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKOMORO (BANYUASIN)	2.690,00	0,34	0,34
31	4			PLAJU - SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB. OKI	2.690,00	0,33	0,33
32	5			JLN. KTM RAMBUTAN - SP. LOROK	2.290,00	0,27	0,27
33	6			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	2.750,00	0,24	0,24
34	7			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA - SP. LOROK	1.750,00	0,27	0,27
35	8			BTS. KAB. BANYUASIN - CELIKAH (KAYU AGUNG)	2.697,00	0,36	0,36
36	9			SP. MERANJAT - BTS. KAB. MUARA ENIM	1.650,00	0,24	0,24
37	10			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	2.150,00	0,20	0,20
38	11			TANJUNG RAJA - SP. TAMBANG RAMBANG	2.797,00	0,26	0,26
39	12			SP. PENYANDINGAN - BTS. KAB. OKUT	1.537,39	0,27	0,27
40	13			JLN. AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	2.453,00	0,19	0,19
41	14			TRANS SP. 1 - SP. TANAH ABANG	2.567,00	0,20	0,20
42	15			CEMPAKA - TRANS SP. 1	2.436,59	0,38	0,38
43	16			SP. TAMBANG RAMBANG - BTS. KAB. OKU	2.797,00	0,19	0,19
44	17			LUBUK SEBERUK - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	1.664,26	0,19	0,19

45	18		BTS. KAB. OKI - SP. KEPUH	1.664,26	0,23	0,23
46	19		BTS. KAB. OGAN ILIR - PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII)	1.664,26	0,13	0,13
47	20		SEKAYU – BTS. KAB. PALI	2.679,95	0,36	0,36
48	21		BETUNG – PETANGGAN	1.664,26	0,22	0,22
49	22		DABUK REJO - BTS. KAB. OKUT	1.564,26	0,18	0,18
50	23		PETANGGAN - TJ. KEMUNING - BTS. KAB. OKI	1.764,26	0,19	0,19
51	24		GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUH)	1.664,26	0,26	0,26
52	25		PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII) - SP. LUBUK BATANG	1.764,26	0,14	0,14
53	26		GUMAWANG - PETANGGAN	1.288,88	0,24	0,24
54	27		SP. KEPUH - KURUNGAN NYAWA	1.504,63	0,25	0,25
55	28		KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	1.335,00	0,25	0,25
56	29		KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	2.453,00	0,25	0,25
57	30		MARTAPURA - SP. MARTAPURA	2.127,30	0,27	0,27
58	31		SP. SUKJADI (BATURAJA) - SP. LENGKITI	2.427,30	0,35	0,35
59	32		SP. LENGKITI - SP. MARTAPURA	2.167,87	0,27	0,27
60	33		SP. MARTAPURA - MUARA DUA	2.327,30	0,28	0,28
61	34		MUARA DUA - SP. HAJI	2.064,17	0,19	0,19
62	35		SP. HAJI - SP. CAMPANG	2.064,70	0,18	0,18
63	36		SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	1.664,26	0,13	0,13
64	37		SP. MUARA SIDANG - BTS. PROV BENGKULU	1.457,76	0,12	0,12
65	38		MUARA DUA - SP. SENDER	1.664,26	0,16	0,16
66	39		SP. SENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	1.764,26	0,21	0,21
67	40		LEmbak - BTS. KAB. OGAN ILIR	1.664,26	0,13	0,13
68	41		LEmbak - MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	1.564,26	0,12	0,12
69	42		BTS. KAB. OGAN ILIR - BERINGIN	1.335,00	0,10	0,10
70	43		SP. RAJA – MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	2.742,00	0,25	0,25

71	44			SP. AIR ITAM - SP. TALANG BULANG	1.664,26	0,69	0,69
72	45			BTS. KAB. MUBA - SP. AIR ITAM	2.453,00	0,13	0,13
73	46			JLN. SP. BELIMBING - PENDOPO (PALI)	2.742,00	0,17	0,17
74	47			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) - BTS. KAB. MURA	2.767,00	0,24	0,24
75	48			SP. 9 BANGUN JAYA - SP. KULIM (BTS. PALI)	2.679,95	0,22	0,22
76	49			SP. SUGIHWARAS - BTS. KAB. LAHAT	2.538,90	0,16	0,16
77	50			SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	2.111,75	0,15	0,15
78	51			BTS. KAB. MUARA ENIM - SP. AIR DINGIN	2.244,60	0,35	0,35
79	52			MUARA SIBAN - SP. EMBACANG	2.648,10	0,24	0,24
80	53			KEBAN AGUNG - SP. TJ. ARO (PAGARALAM)	2.427,00	0,24	0,24
81	54			TJ. CERMIN - PERANDONAN (PAGARALAM)	2.111,75	0,25	0,25
82	55			TEBING TINGGI - PENDOPO (EMPAT LAWANG)	2.261,75	0,22	0,22
83	56	K		JLN. HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	2.261,75	0,35	0,35
84	57			TEBING TINGGI - TANJUNG RAYA	2.462,73	0,34	0,34
85	58			SP. PERIUK - TUGU MULYO - TERAWAS	1.925,10	0,084	0,084
86	59			PAGARALAM - TANJUNG RAYA	1.925,10	0,49	0,49
87	60			TERAWAS - TABATINGGI - MAUR	2.513,50	0,48	0,48
88	61			TANJUNG RAYA - BTS. PROV BENGKULU	2.538,900	0,28	0,28
RATA - RATA						0,32	0,32

Tabel II.3
Tipe Terminal Berdasarkan Kewenangan
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya 2. Alang-Alang Lebar 3. Plaju 4. Jakabaring 5. Tangga Buntung 6. Lemabang 7. Sako	A A	B	C C C C
2	Prabumulih	1. Prabumulih 2. Kota Prabumulih			C C
3	Pagaralam	1. Nendagung 2. Pagar Gading			C C
4	Lubuk Linggau	1. Petanang 2. Muara 3. Kalimantan 4. Watas 5. Satelit		B	C C C C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
8	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung 2. Tanjung Raja 3. Tulung Selapan	A		C C
9	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
10	OKU Timur	1. Kota Baru 2. Lubuk Harjo		B B	
11	OKU Selatan	1. Muara Dua		B	
12	Muara Enim	1. Muara Enim 2. Simpang Kodim 3. Bantingan 4. Talang Ubi	A		C C C
13	Musi Rawas	1. Simpang Periuk 2. Lakitan 3. Trawas	A		C C
14	Lahat	1. Batay 2. Muara Sibon 3. Lembayung	A		C C
15	Empat Lawang	-	-	-	-
16	PALI	-	-	-	-
17	Muratara	-	-	-	-
	Jumlah		8	7	21

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel Dalam Angka, 2024

• **Terminal Tipe B**

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan sub urusan terminal, untuk terminal tipe A menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi serta terminal tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Sumatera Selatan ada 7 (tujuh) terminal tipe B baru diserahkan pada tahun 2018 yang menjadi penugasan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengelola terminal tersebut telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Terminal. Kinerja pengelolaan terminal tipe B disajikan pada tabel II.5 sebagai berikut :

Tabel II.4
Kinerja Pengelolaan Terminal Tipe B
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Terminal	Kinerja*)	Keterangan
1.	Terminal Jakabaring di Kota Palembang		
a.	Aset terdiri dari :		
-	Luas Tanah	8000.00 m ²	
-	Luas Bangunan	56 m ²	
b.	Jumlah penumpang		
c.	Jumlah personil	19 Orang	
2.	Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau		
a.	Aset terdiri dari :		
-	Luas Tanah	35.770 m ²	
-	Luas Bangunan	494 m ²	
b.	Jumlah penumpang		
c.	Jumlah personil	6 Orang	
3.	Terminal Randik di Kab. Musi Banyuasin		
a.	Aset terdiri dari :		
-	Luas Tanah	2.2 H	
-	Luas Bangunan	360 m ²	
b.	Jumlah penumpang		
c.	Jumlah personil	11 Orang	
4.	Terminal KM. 32 Inderalaya		
a.	Aset terdiri dari :		
-	Luas Tanah	15.000 m ²	
-	Luas Bangunan	369 m ²	
b.	Jumlah penumpang		
c.	Jumlah personil	11 Orang	

5.	Terminal Kota Baru di Kab. OKU Timur				
	a.	Aset terdiri dari :			
		-	Luas Tanah	33.128 m ²	
		-	Luas Bangunan	526	
	b.	Jumlah penumpang			
	c.	Jumlah personil			13 Orang
6.	Terminal Lubuk Harjo di Kab. OKU Timur				
	a.	Aset terdiri dari :			
		-	Luas Tanah	26.857 m ²	
		-	Luas Bangunan	535 m ²	
	b.	Jumlah penumpang			
	c.	Jumlah personil			16 Orang
7.	Terminal Muara Dua di Kab. OKU Selatan				
	a.	Aset terdiri dari :			
		-	Luas Tanah	3.000 m ²	
		-	Luas Bangunan	48 m ²	
	b.	Jumlah penumpang			
	c.	Jumlah personil			9 Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Jakabaring di Kota Palembang**

Terminal Jakabaring merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Madya yang terletak di dalam Kota Palembang pada Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan titik koordinat 104°46'29.75"BT dan 3°01'33.94"LS. Terletak pada ruas jalan Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.1
Terminal Tipe B Jakabaring

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Jakabaring merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kota Palembang. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Jakabaring tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	17.518	17.518	188.747	125.832
2.	2021	18.359	18.356	102.364	84.968
3.	2022	17.591	17.541	98.258	98.551
4.	2023	13.330	13.330	102.897	82.816
5.	2024	21.748	13.540	104.051	107.464

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.4 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 24,45% sementara kinerja layanan penumpang juga mengalami kenaikan sebanyak 11,3%. Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Jakabaring tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.6
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih	3
2.	Palembang – Muara Enim	1
3.	Palembang – Tanjung Enim	1
4.	Palembang – Tugu mulyo	1
5.	Palembang – pematang Panggang	1
6.	Jakabaring – Plaju	13
7.	Palembang – Sp padang	2
8.	Palembang – Selapan	4
9.	Palembang – Pampangan	1
10.	Palembang – Pangkalan Lampam	2
11.	Palembang – Sp. Padang	4
12.	Palembang – Selapan	2
13.	Palembang – Pampangan	3
14.	Palembang – Riding	3
15.	Palembang – Pangkalan Lampam	1
16.	Jakabaring – Ampera	30

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut

fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Jakabaring tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.7
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	300 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	300 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	
4.	Parkir Kendaraan	Ada	2753,34m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	6,8 m ²
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	2
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	1,50 m ²
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	503,3 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Ada	14,22 m ²
17.	Papan Perambuan	Ada	3 m ²
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.8
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi	Belum Ada	

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

	Operasional Bus		
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Belum Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau**

Terminal Petanang merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kota Lubuk Linggau pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dengan titik koordinat 102°50'28" BT dan 3°11'11" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Petanang Ilir Kota Lubuk Linggau yang merupakan jalan penghubung arteri primer.



Gambar II.2
Terminal Tipe B Petanang

Terminal Petanang merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kota Lubuk Linggau pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dengan titik koordinat 102°50'28" BT dan 3°11'11" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Petanang Ilir Kota Lubuk Linggau yang merupakan jalan penghubung arteri primer.

Tabel II.9
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Petanang

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	2.185	2.185	33.510	22.340
2.	2021	1.512	1.490	31.209	31.657
3.	2022	1.489	1.479	30.102	31.057
4.	2023	1.692	1.597	38.720	35.697
5.	2024	660	712	14.468	17.280

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada Table II.8 diatas, diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 58,28% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 57,33%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Petanang tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.10
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Petanang

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Jambi – Lubuk Linggau	2
2.	Pagaralam – Jambi	2
3.	Bengkulu - Jambi	1
4.	Palembang – Prabumulih – M. Enim – Iahat – Pagaralam – Empat Lawang – Tebing Tinggi Lubuk Linggau	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Petanang tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.11
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Petanang

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	64 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	64 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	25 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	231 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Belum ada	
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Belum Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Belum ada	
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.12
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Petanang

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyangga Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Belum Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Randik di Kabupaten Musi Banyuasin**

Terminal Randik merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten Musi Banyuasin pada Kecamatan Sekayu dengan titik koordinat 103°51'18.46"BT dan 2°52'26.65"LS. Terletak pada ruas jalan Terminal Randik Desa Kelurahan Kayu Ara Kota Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.3
Terminal Tipe B Randik

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Randik merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Randik tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.13
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Randik

NO .	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	1.251	1.251	16.535	11.024
2.	2021	1.194	1.181	14.491	13.300
3.	2022	1.158	1.160	13.548	13.256
4.	2023	1.236	1.240	15.914	14.575
5.	2024	858	876	9.520	9.781

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.12 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 42,79% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 57,96%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Randik tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.14

Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Randik

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Babat Toman - Palembang	15
2.	Sukarami – Babat Toman	6

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Randik tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.15

Fasilitas Utama Terminal Tipe B Randik

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	1152 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	1152 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	96 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	950 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	1
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	360 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	96 m ²
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	119 m ²
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Ada	
18.	Papan Perambuan	Ada	1
19.	Papan Pengumuman	Ada	
20.	Layanan Bagasi	Ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	144 m ²
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.16
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Randik

	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyangga Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Belum Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal KM. 32 Inderalaya**

Terminal KM. 32 Inderalaya merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Madya yang terletak di dalam Kabupaten Ogan Ilir pada Kecamatan Inderalaya Utara dengan titik koordinat 104°39'13.68"BT dan 3°12'22.21" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Timbangan Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan jalan penghubung arteri primer.



Gambar II.4
Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten Ogan Ilir. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya tergambar pada Table berikut.

Tabel II.17
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	993	993	22.644	15.096
2.	2021	15.238	15.237	20.316	14.558
3.	2022	14.581	14.561	19.845	19.851
4.	2023	20.154	20.167	18.541	18.454
5.	2024	20.166	20.174	19.451	19.632

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.16 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 1,04% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 0,87%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.18

Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Terminal Karya Jaya – Inderalaya	16
2.	Terminal jakabaring – Inderalaya	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.19

Fasilitas Utama Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	240 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	3400 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	40 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	1 m ²
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Ada	9 m ²
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	80 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	120 m ²
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	
15.	Ruang Pembelian Tiket Untuk Bersama	Belum Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Ada	2
19.	Papan Pengumuman	Ada	
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.20
Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B KM. 32
Inderalaya

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyanggah Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Martapura di Kabupaten OKU Timur**

Terminal Martapura merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Timur pada Kecamatan Martapura dengan titik koordinat 104°39'13.68"BT dan 3°12'22.21"LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Sukomulyo Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan jalan penghubung arteri primer.



Gambar II.5
Terminal Tipe B Martapura

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Martapura merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Timur. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Martapura tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.21
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Martapura

NO .	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	8.257	8.257	92.255	61.503
2.	2021	14.829	13.840	90.635	82.155
3.	2022	14.528	14.458	91.525	78.524
4.	2023	16.661	16.661	118.865	119.593
5.	2024	9.812	9.812	79.394	83.400

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.20 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 41,10%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 68,26%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Martapura tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.22

Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Martapura

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih - Muara Enim – Baturaja - Martapura	15
2.	Palembang – Prabumulih – Martapura – Muaradua	2
3.	Palembang – Prabumulih – Baturaja – Martapura	8
4.	Dst	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Kota Baru tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.23

Fasilitas Utama Terminal Tipe B Martapura

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	65 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	65 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	20 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	100 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	1
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	72 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	20 m ²
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	25 m ²
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	

18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	1
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	9 m ²
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	4 m ²
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	65 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	65 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	20 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	100 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	1
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	72 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	20 m ²
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	25 m ²
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	1
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	9 m ²
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	4 m ²
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.24

Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Martapura

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Ada	

2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Ada	

2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

• **Terminal Lubuk Harjo di Kabupaten OKU Timur**

Terminal Lubuk Harjo merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Timur pada Kecamatan Belitang Madang Raya dengan titik koordinat 104°38'30.1"BT dan 4°03'36.3"LS. Terletak pada ruas jalan

Lubuk Harjo Desa Jati Mulyo 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.6
Terminal Tipe B Lubuk Harjo

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Timur. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Lubuk Harjo tergambar pada table berikut:

Tabel II.25
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	422	422	5.846	4.667
2.	2021	3.097	3.096	5.631	4.445
3.	2022	2.951	2.965	5.534	4.358
4.	2023	1.692	1.597	38.720	35.697
5.	2024	1.016	1.033	5.685	5.056

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.24 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 37,70%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 85,56%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.26

Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Angdes Gumawang – Jalur Komerling	4

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.27

Fasilitas Utama Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	40 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	135 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	48 m ²
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	4 m ²
20.	Layanan Bagasi	Ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	5 m ²
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	80 m ²
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Ada	135 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.28
 Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Lubuk Harjo

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Muara Dua di Kabupaten OKU Selatan**

Terminal Muara Dua merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Selatan pada Kecamatan Muara Dua dengan titik koordinat 104°04'14.19"BT dan 4°32'23.65"LS. Terletak pada ruas jalan Baturaja / Muara Dua, Bumi Agung Kabupaten Oku Selatan yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.7
Terminal Tipe B Muara Dua

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Muara Dua merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Selatan. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Muara Dua tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.29
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	3.917	3.917	53.311	35.541
2.	2021	4.670	4.670	50.201	33.174
3.	2022	4.578	4.541	51.054	32.541
4.	2023	8.362	4.244	43.091	54.036
5.	2024	6.759	7.883	71.256	87.686

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.28 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 13,90%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 38,89%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Muara Dua tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.30

Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih – Martapura – Muaradua	2
2.	Palembang – Prabumulih – Baturaja – Muaradua – Danau Ranau	42

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Muara Dua tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.31

Fasilitas Utama Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	296 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	600 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	120 m ²
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Ada	
17.	Papan Perambuan	Ada	
18.	Papan Pengumuman	Ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.32
 Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum da	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Belum Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Bus Pariwisata**

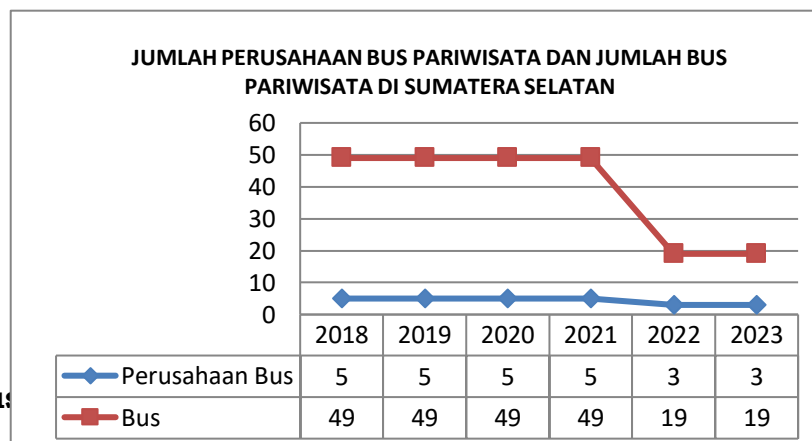
Jumlah angkutan bus pariwisata yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tidak mengalami kenaikan dari 49 unit pada tahun 2023 tetap 49 unit pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketersediaannya masih terbatas karena dipengaruhi minimnya rute paket wisata dengan menggunakan bus dan minimnya kerjasama pemerintah dengan agen pariwisata untuk penawaran paket wisata menggunakan bus.

Tabel II.33
Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Bus Pariwisata	Jumlah Bus Pariwisata (Unit)
1	2020	5	49
2	2021	5	49
3	2022	3	49
4	2023	3	49
5	2024	3	49

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.1
Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata
Di Provinsi Sumatera Selatan



- **Bus**

Jumlah angkutan bus antar provinsi mengalami penurunan secara kuantitatif dari tahun 2021 sebanyak 241 unit bus antar provinsi dan turun menjadi 159 unit pada tahun 2024, hal ini disebabkan adanya pilihan moda transportasi udara yang masih terjangkau dengan daya beli masyarakat Sumatera Selatan sehingga load factor angkutan bus antar provinsi terus menurun dari 62% menjadi 58%. Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sejak 2018 – 2024 harga tiket pesawat udara untuk low cost carrier menyentuh rupiah sebesar Rp.

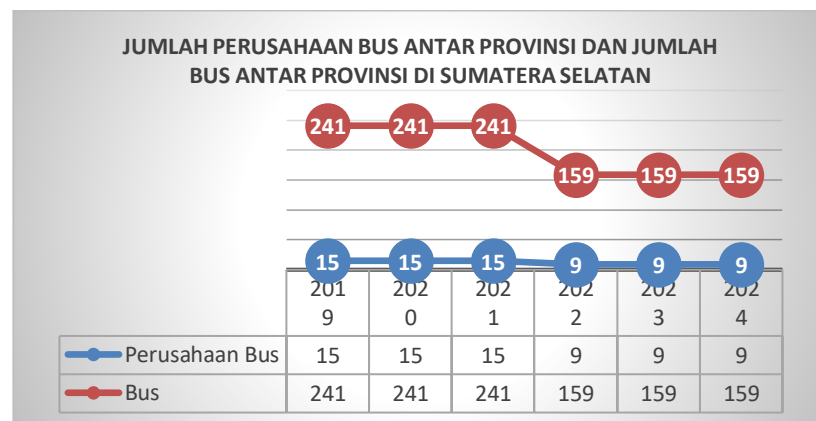
480.000,00 dengan gap harga tiket angkutan bus antar provinsi sebesar Rp. 250.000,00 (untuk rute Palembang – Jakarta).

Tabel II.34
Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Bus AKAP	Jumlah Bus AKAP (Unit)
1	2018	15	241
2	2019	15	241
3	2020	15	241
4	2021	15	241
5	2022	9	159
6	2023	9	159
7	2024	9	159

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.2
Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- Bus Antar Kota Dalam Provinsi**

Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota harus terkoneksi jaringan pelayanan bus antar kota dalam provinsi untuk memobilisasi angkutan orang. Saat ini trayek antar kota dalam provinsi berjumlah 25 trayek dengan total 159 unit kendaraan.

Tabel II.35
Jumlah Trayek dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan	Jumlah Kendaraan
1	2	3	4
1	Baturaja - Palembang - Lubuk Linggau	CV. PO BHW	3
2	Muara Dua - Baturaja - Palembang - Lubuk Linggau (2)	CV. PO BHW	2
3	Palembang - Baturaja	PT. BINTANG PAMUNGKAS SEJAHTERA	6
4	Palembang - Prabumulih - Baturaja	CV. DANILAH	2
5	Palembang - Kayu Agung - Tanjung Batu	CV. DANILAH	2
6	Palembang - Lintang PP	CV. PUTRA MARLIN	10
7	Palembang - Prabumulih	CV. DANILAH	1
		CV. PO BHW	7
8	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua - Ranau PP	PT. TITISAN SANG PANGERAN	14
9	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua	CV. PO BHW	6
10	Palembang - Prabumulih - Martapura - Muara Dua	CV. DANILAH	2
11	Palembang - Prabumulih - Muara Enim	CV. DANILAH	1
12	Palembang - Prabumulih - Pagar Alam	CV. DANILAH	2
13	Palembang-Prabumulih-Baturaja-Martapura-Belitang-Ranau PP	PO. TRAVEL 2002	21
14	Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Baturaja-Muara Dua-Ranau PP	CV. SEJIWA JIWA BARU	5
15	Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Tebing Tinggi PP	CV. BAHTERA KARUNIA ILLAHI	6
16	Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang - Tanjung Api-Api	CV. PO BHW	3
17	Term. Alang-alang Lebar Palembang - Sekayu PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
18	Term. Jaka Baring Palembang - Indralaya PP	ORGANDA KOTA PALEMBANG	24

		PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
19	Term. Jaka Baring Palembang - Kayu Agung PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
20	Term. Jaka Baring Palembang - Prabumulih PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	5
21	Term. Jaka Baring Palembang - Tanjung Enim PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	6
22	Term. Jaka Baring Palembang - Pematang Panggang PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
23	Term. Jaka Baring Palembang - Baturaja PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	2
24	Term. Alang-alang Lebar Palembang - Tangjung Api-API PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	4
25	Palembang - Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Pagar Alam - Pendopo	PT. SRIWIJAYA PRATAMA EXPRESS	13
TOTAL			159

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Kecelakaan Transportasi Darat**

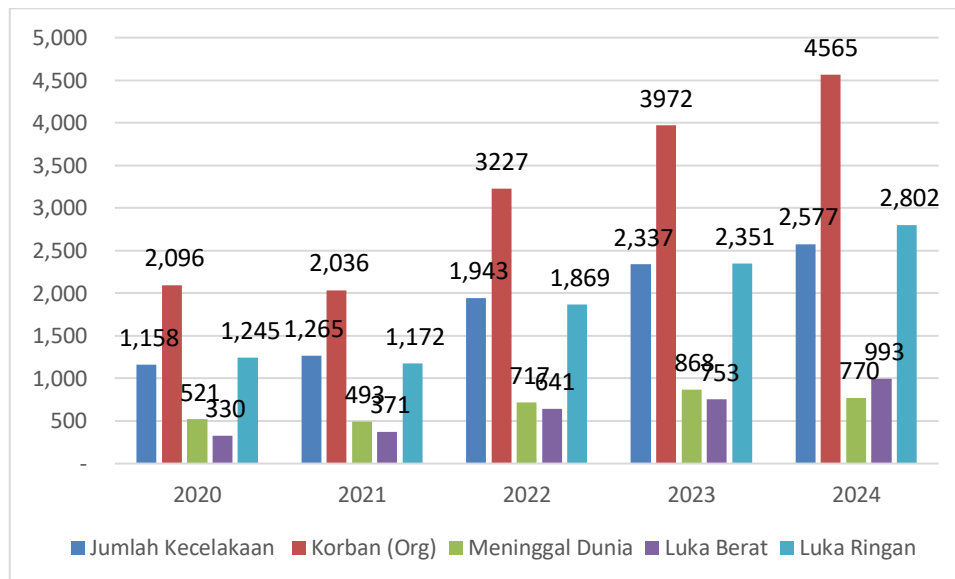
Kinerja angka kecelakaan transportasi darat di Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja dengan kecenderungan yang semakin tinggi dengan nilai angka kejadian kecelakaan semakin meningkat (trend meningkat 10,26%) dimana pada tahun 2019 sebanyak 1.648 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 704 meninggal dunia, 545 mengalami luka berat serta 1.494 mengalami luka ringan dan total kerugian material akibat kecelakaan di perkirakan mencapai Rp. 72.424.140.000. Sementara pada tahun 2024 sebanyak 2.577 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 770 meninggal dunia, 993 mengalami luka berat serta 2.802 mengalami luka ringan dan total kerugian material akibat kecelakaan di perkirakan mencapai Rp. 115.182.000.000.

Tabel II.36
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecelakaan	1.158	1.540	1.943	2.337	2.577
Korban (Org) :	2.096	2.036	3.227	3.972	4.565
Meninggal Dunia	521	712	717	868	770
Luka Berat	330	362	641	753	993
Luka Ringan	1.245	1.417	1.869	2.351	2.802
Kerugian Materil (Rp. juta)	4.718	6.979	10.385	10.148	115.182

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.3
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024



Tabel II.37
Data Kecelakaan Lalu Lintas Per Kabupaten / Kota
Tahun 2020 – 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD
1.	Ogan Komering Ulu	45	33	42	31	47	31	56	35	89	30
2.	Ogan Komering Ilir	59	43	111	67	112	69	107	42	198	79
3.	Muara Enim	90	57	142	80	144	80	125	88	194	69
4.	Lahat	48	36	82	51	84	51	120	59	97	38
5.	Musi Rawas	48	32	64	38	65	38	79	35	96	43
6.	Musi Banyuasin	84	66	125	100	127	100	135	54	176	95
7.	Banyuasin	120	44	155	69	157	69	125	84	222	97
8.	OKU Selatan	18	14	21	17	25	17	65	35	33	18
9.	OKU Timur	35	17	49	37	50	37	55	40	154	57
10.	Ogan Ilir	68	35	133	54	233	54	268	125	176	70
11.	Empat Lawang	25	15	15	9	2	9	25	12	19	14
12.	PALI	19	11	14	11	14	11	25	4	31	8
13.	Musi Rawas Utara	25	19	23	14	68	14	48	24	58	28

14.	Palembang	478	47	443	89	645	94	821	147	846	84
15.	Prabumulih	18	14	21	15	46	15	70	15	56	9
16.	Pagar Alam	13	9	22	8	22	8	12	5	21	8
17.	Lubuk Linggau	52	29	78	22	102	22	201	65	111	23
	TOTAL	1.245	521	1.540	712	1.943	717	2.337	868	2.577	770

• **Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi**

Dengan kinerja angka kecelakaan transportasi darat yang semakin membaik (trend menurun sebesar 18,91%) tidak terlepas dari adanya pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan baik di Jalan Nasional oleh Kementerian Perhubungan, Jalan Provinsi oleh Dinas Perhubungan Provinsi serta Jalan Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Sepanjang 1.513,66 KM jalan provinsi, kinerja pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan disajikan oleh tabel berikut :

Tabel II.38
Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

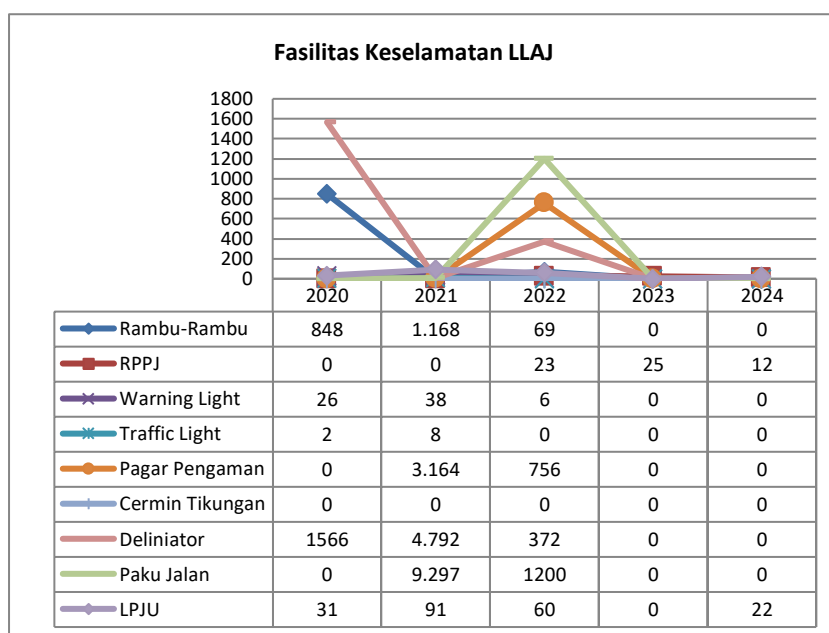
No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu-Rambu		848	1,168	69	0	0
	- APBD	Buah	649	0	27	0	0
	- APBN	Buah	199	1,168	42	0	0
2	RPPJ		0	0	23	25	12
	- APBD	Buah	0	0	23	25	12
	- APBN	Buah	0	0	0	0	0
3	Marka Jalan		107,038	178,451	130,253	14,107	0
	- APBD	M'	84,35	30,276	3,725	14,107	0
	- APBN	M'	22,688	148,175	126,528	0	0
4	Warning Light		26	38	6	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	26	38	6	0	0
5	Traffic Light		2	8	0	0	0
	- APBD	Buah	1	0	0	0	0
	- APBN	Buah	1	8	0	0	0
6	Pagar Pengaman		0	3,164	756	0	0
	- APBD	M'	0	0	0	0	0
	- APBN	M'	0	3,164	756	0	0
7	Cermin Tikungan		0	0	0	0	0

	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	0	0	0	0
8	Deliniator		1566	4,792	372	0	0
	- APBD	Buah	811	0	72	0	0
	- APBN	Buah	755	4,792	300	0	0
9	Paku Jalan		0	9,297	1200	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	9,297	1,2	0	0
10	LPJU		31	91	60	0	22
	- APBD	Buah	26	0	0	0	22
	- APBN	Buah	5	91	60	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jenis fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan telah terpasang sebanyak 2.085 unit rambu lalu lintas, 60 unit RPPJ, 429,85 m' marka jalan, 70 unit warning light, 10 unit traffic light, 759,16 m' pagar pengaman jalan, 1.942,79 unit delineator, 1.209,30 unit paku marka, 204 unit LPJU /PJUTS

Grafik II.4
Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024



II.1.2 Transportasi Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.UKO.104/IV/4/KA-2016 tentang Penghapusan Struktur Organisasi Divisi Regional III Sumatera Selatan, SUB Divisi Regional III.1 Kertapati dan SUB Divisi III.2 Tanjung Karang, maka untuk optimalisasi operasional kereta api dan menjalankan proses bisnis PT. KAI (Persero) di wilayah Palembang, dibentuklah organisasi Divisi Regional III Palembang berdasarkan Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/IV/5/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Divisi Regional III Palembang.

Divisi Regional III Palembang adalah satuan organisasi yang berada di bawah Direktur Utama dan berkedudukan di Palembang. Batas wilayah Divisi Regional Palembang dengan Divisi Regional IV Tanjung Karang terletak pada kilometer 318+200 petak jalan antara Stasiun Prabumulih X5 – Stasiun Tanjung Rambang, berada di Desa Tanjung Raman, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Wilayah operasional Divisi Regional III Palembang meliputi Stasiun Kertapati sampai dengan Stasiun Lubuk Linggau yang berjarak 485,150 meter sepur dengan jumlah 34 stasiun dengan klasifikasi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Stasiun Besar A | : 2 Stasiun |
| 2. Stasiun Besar C | : 6 Stasiun |
| 3. Stasiun Kelas 1 | : 1 Stasiun |
| 4. Stasiun Kelas 2 | : 20 Stasiun |
| 5. Stasiun Kelas 3 | : 5 Stasiun |

Divisi Regional III Palembang dipimpin oleh Kepala Divisi Regional dan Deputi Kepala Divisi Regional yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Bandung. Divisi Regional III Palembang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa transportasi perkeretaapian (barang dan penumpang) dan pengelolaan asset, dengan produk sebagai berikut :

1. Kereta Api Penumpang yang terdiri dari beberapa Kereta Api, diantaranya Kereta Api *Publik Service Obligation* (PSO) Serelelo (Kertapati – Lubuk Linggau), Kereta Api *Publik Service Obligation* (PSO) Raja Basa

- (Kertapati – Tanjungkarang), Kereta Api Komersil Sindang Marga (Kertapati – Lubuk Linggau);
2. Kereta Api Barang yang terdiri dari Kereta Api Barapati, Baracinta, Barasari, Baralawai, Baramerapi, Pulp, BBM;
 3. Pengeloaan asset railways dan non railways

Kereta Api Penumpang tidak berhenti disetiap stasiun, hanya stasiun keberangkatan dan pemberhentian saja yaitu Stasiun Kertapati, Payakabung, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi dan Lubuk Linggau. Saat ini Kereta Api yang beroperasi adalah Kereta Api Serelo dan Kereta Api Raja Basa sesuai dengan arahan dari kantor Pusat PT. KAI.

Angkutan penumpang khususnya di wilayah Divisi Regional III Palembang sempat mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019, namun sejak adanya pandemi Covid – 19 tahun 2020 dan beberapa kereta api dibatalkan, jumlah penumpang mengalami penurunan drastis. Sementara untuk Kereta Api Barang di Divisi Regional III Palembang saat ini memiliki 15 mitra kerja yaitu :

1. PT. Bukit Asam (PT. BA)
2. PT. Bara Alam Utama (PT. BAU)
3. PT. Budi Gema Gempita (PT. BGG)
4. PT. Bara Manunggal Sakti (PT. BMS)
5. PT. Baramulti Sugih Sentosa (PT. BMSS)
6. PT. Dizamatra Powerindo (PT. DP)
7. PT. Golden Great Borneo (PT. GGB)
8. PT. Gumay Prima Energi (PT. GPE)
9. PT. Mustika Indah Permai (PT. MIP)
10. PT. Manambang Muara Enim (PT. MME)
11. PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT. SMS)
12. PT. Truba Bara Banyu Enim (PT. TBBE)
13. PT. Pertamina
14. PT. Semen Baturaja
15. PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL)

Angkutan barang dengan kereta api di wilayah Divisi Regional III Palembang di dominasi oleh angkutan batubara (Babaranjang), trend volume

angkutan kereta api barang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini, jalur ganda telah beroperasi di wilayah Divisi Regional III Palembang dari Kertapati – Prabumulih – Muara Enim – Tanjung Enim Baru, X6 – X5 – batas Divisi Regional III dan Divisi Regional IV sepanjang 329.350 meter sepur. Sedangkan untuk wilayah Prabumulih – X5, Muara Enim – Lubuk Linggau masih jalur tunggal dengan panjang 155.800 meter sepur.

Jumlah penumpang kereta api di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 1.036.166 penumpang (103%), pada tahun 2023 jumlah penumpang sebesar 765.764 (76%), pada tahun 2022 jumlah penumpang sebesar 661.626 (66%) dan pada tahun 2021 jumlah penumpang sebesar 184.709 (18%). Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan jumlah penumpang karena adanya pandemic Covid-19 sedangkan pada tahun 2022 jumlah penumpang mengalami peningkatan kembali seiring dengan perubahan dari status *pandemic* Covid-19 menjadi *endemic*.

Jumlah angkutan barang Sumatera Selatan pada tahun 2020 jumlah barang sebesar 14.856.396 ton, pada tahun 2021 jumlah barang sebesar 18.678.576 ton, pada tahun 2022 jumlah barang sebesar 22.574.537 ton, pada tahun 2023 jumlah barang sebesar 26.029.055 ton dan tahun 2024 sebesar 29.218.814 ton. Untuk angkutan barang terjadi peningkatan jumlah barang setiap tahunnya.

Kereta Api dari Stasiun Kertapati ke Stasiun Lubuk Linggau tidak terisi penuh. Untuk Kereta Api Sindang Marga I (kelas eksekutif dan bisnis) hanya 65,7% saja yang terisi oleh penumpang, sebagiannya lagi tidak ada penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Serelo I (kelas ekonomi) hanya 81,56% yang terisi, begitu juga untuk Kereta Api dari Stasiun Lubuk Linggau ke Stasiun Kertapati. Kereta Api Sindang Marga II yang melayani kelas eksekutif dan bisnis terisi penumpang sebesar 75,4%. Kereta Api Serelo II yang melayani kelas ekonomi hanya terisi sebagiannya saja (48,76%). Ini mungkin disebabkan dengan waktu keberangkatan yang tidak sesuai dengan keinginan penumpang dan kebanyakan penumpang lebih memilih moda lain (travel) dibandingkan Kereta Api.

Kereta Api yang berasal dari Stasiun Kertapati dengan tujuan Stasiun Tanjung Karang juga tidak berbeda jauh dengan kereta yang lainnya. 73,2% Kereta Api Sriwijaya I (kelas eksekutif dan bisnis) yang terisi oleh penumpang. Sedangkan untuk kereta api kelas ekonomi yaitu Kereta Api Raja Basa I lebih penuh yaitu sebesar 92,1% yang terisi penumpang. Sebaliknya untuk Kereta Api yang berasal dari Stasiun Tanjung Karang tujuan Stasiun Kertapati hampir terisi penuh malah sampai melebihi kapasitas tempat duduk yang ada. Untuk Kereta Api Sriwijaya II (kelas eksekutif dan bisnis) 94,7% terisi penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Raja Basa II (kelas ekonomi) melebihi kapasitas yang ada yaitu sebesar 103,04%. Hal ini terlihat bahwa banyaknya aktivitas yang dilakukan di wilayah Palembang sehingga penumpang untuk tujuan ke Palembang lebih banyak dibandingkan tujuan ke Tanjung Karang.

Angkutan Kereta Api barang dari Lubuk Linggau sudah tutup, yang ada hanya kereta api angkutan BBM. Angkutan yang masih primadona kereta api masih batubara (kereta api babaranjang). Dalam satu hari terdapat 10 kereta api barang dengan berbagai jenis komoditi yang dibawanya beroperasi. Kereta Api barang yang berasal dari Tanjung Enim sebanyak 7 buah kereta, dengan jenis komoditi yang diangkut adalah batubara. Kereta Api yang mengangkut batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) adalah Kereta Api B.12, B.13, B.15, B.17, B.19 dan B.21. Sedangkan Kereta Api K.12 adalah kereta api barang batubara dengan tujuan ke Stasiun Kertapati Palembang.

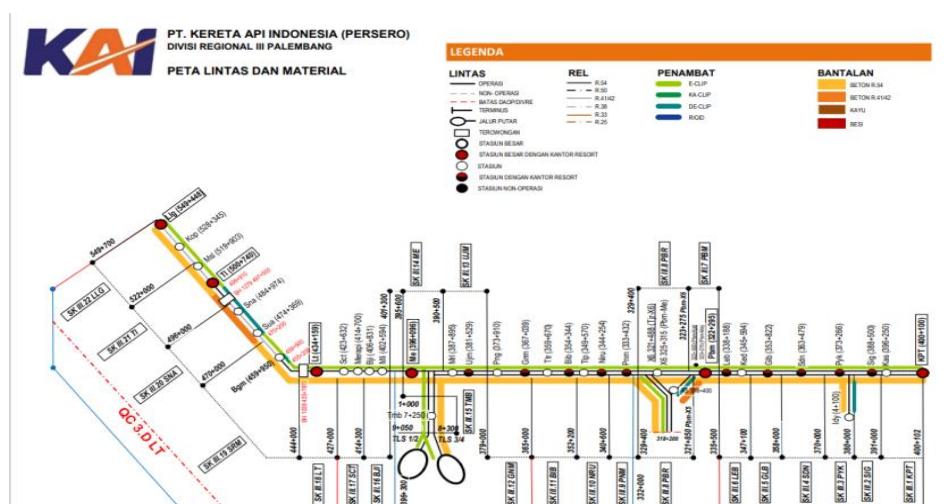
Berat total batubara yang diangkut dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) per harinya adalah 12.700 ton dengan 6 buah kereta api barang. Sedangkan berat yang diangkut dari Tanjung Enim ke Stasiun Kertapati Palembang adalah 1050 ton. Selain batubara, kereta api barang juga mengangkut jenis komoditi yang lain yaitu BBM dan Pulp. Kereta Api angkutan barang yang membawa jenis komoditi BBM yaitu Kereta Api 2725 dan Kereta Api 2723. Kereta Api 2725 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 434,2 ton. Kereta Api 2723 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 573,5 ton. Satu kereta api barang yaitu Kereta Api 2727 membawa jenis komoditi pulp dengan berat 700 ton yang berasal dari Stasiun Niruh Prabumulih menuju Stasiun Tarahan Lampung Selatan.

Untuk pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta api yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau. Dari 675 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan single track dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur double track. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel II.39
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
Total		675,95	

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024



Gambar II.8
Peta Jalur Kereta Api Sumatera Selatan

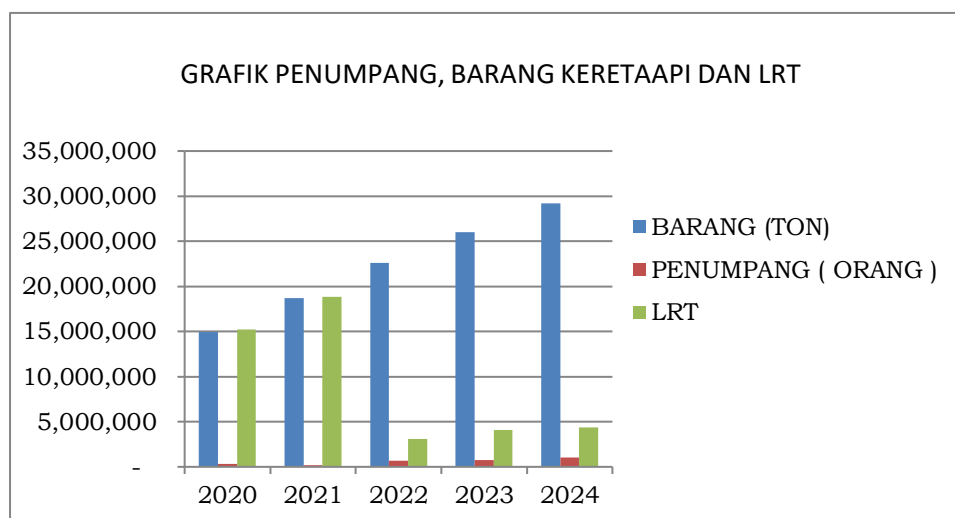
Kondisi perkeretaapian Sumatera Selatan, proyek partial double track KA Sumsel sampai akhir tahun 2014 telah berhasil dibangun 52,69 km. Selanjutnya untuk tahun 2015-2016 sedang dikerjakan penambahan partial double track 76,35 km, masing-masing untuk ruas Sta. Lebak Sta. Simpang 40 km dan Martapura-Baturaja 36,35 km. Diperkirakan awal 2018, Partial Double Track di wilayah Sumatera Selatan sudah mencapai 129 km lebih. Pembangunan jalan KA di Sumsel selain diprioritaskan untuk angkutan barang, khususnya Batubara, Klingkers, dan BBM juga mulai diprioritaskan.

Tabel II.40
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BARANG (TON)	14.934.008	18.678.576	22.574.537	26.029.055	29.218.814
2	PENUMPANG KERETA API (ORANG)	302.896	184.709	661.626	765.764	1.036.166
3	PENUMPANG LRT (ORANG)	1.053.637	1.599.133	3.156.280	4.082.719	4.130.911

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.5
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024



Perhitungan jarak rel kereta api dimulai dari stasiun Panjang, Lampung (KM 0) yang telah ditutup sejak beroperasinya Pelabuhan Bakauheni yang menghentikan hegemoni pelayanan kapal penumpang dari Pelabuhan Panjang

yang terintegrasi dengan jalur kereta api melalui stasiun Panjang. Dari pelabuhan tersebut, ruas jalur kereta api berakhir di Stasiun Prabumulih (Sumatera Selatan) km 332 + 705. Setelah itu, jalur kereta api di Stasiun Prabumulih bercabang dua ke barat dan timur.

Ke arah barat, jalur kereta berakhir di Lubuklinggau (Sumatera Selatan) di Km 549 + 448, sedangkan ke arah timur kereta berakhir di Kertapati (Palembang, Sumatera Selatan) di Km 400 + 102. Karena wilayah Divre III ini cukup luas dibandingkan kedua divre lain di Sumatera Selatan dan meliputi dua provinsi (Sumatera Selatan dan Lampung), maka dibagilah dua wilayah (subdivre) dengan fungsi operasional yang serupa dengan Daop KAI di Pulau Jawa, namun dengan tingkatan administratif dalam lingkup KAI yang lebih rendah daripada Divre maupun Daop. Divre III memiliki dua subdivre yaitu Sub Divre III. 1 Kertapati (KPT) dan Sub Divre III. 2 Tanjungkarang (TNK).

- **Light Rail Transit (LRT)**

Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Kota Palembang dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Manfaat dari LRT bagi Kota Palembang adalah peningkatan mutu pelayanan transportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi; mensukseskan pergelaran ASIAN Games 2018; gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang; moda transportasi ramah lingkungan; dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Kota Palembang dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,- , sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Sejak diremikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Tabel II.41
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

NO.	BULAN	PENUMPANG				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	313.502	102.919	193.990	316.521	323.935
2	Februari	243.181	91.648	146.524	261.581	295.087
3	Maret	160.475	117.297	195.847	279.622	289.600
4	April	14.759	112.398	166.525	361.765	423.579
5	Mei	12.586	147.850	352.840	336.260	353.112
6	Juni	21.924	159.542	260.725	355.364	337.977
7	Juli	31.470	102.550	286.984	370.468	376.200
8	Agustus	48.483	89.951	254.043	345.598	377.504
9	September	39.673	125.082	268.444	351.428	361.877
10	Oktober	46.806	178.417	310.179	344.388	388.746
11	November	52.462	173.679	310.179	342.228	384.692
12	Desember	68.171	197.598	410.000	417.496	218.602
	TOTAL	1.053.492	1.598.931	3.156.280	4.082.702	4.130.911

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Jumlah penumpang LRT Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 3.156.280 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 4.082.702 penumpang, pada tahun 2024 jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 4.130.911 hal ini menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain sebagai berikut :

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi) dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbonenya* yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT.
2. Integrasi tiket LRT dengan Bus Damri dari Stasiun DJKA menuju Kampus UNSRI Indralaya dengan biaya Rp. 7.000,00

3. Mengembangkan *Transit Oriented Development* (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikkan kinerja performance pendapatan operator dan meningkatkan *load factor* penumpang.
4. Pengembangan lokasi *park and ride* di beberapa stasiun LRT.
5. Menciptakan kebijakan agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
6. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamflet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT dan angkutan umum.
7. Membuat Surat edaran atau peraturan gubenur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum.
8. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti Advertising, Transit Joint Development dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana sata ini operasional dilakukan oleh PT. KAI.

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak perusahaan prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan non fare box diluar tiket penumpang seperti pendapatan advertising.

II.3.1.3 Transportasi Sungai

Salah satu dari sembilan sungai terbesar yang ada di Sumatera Selatan adalah Sungai Musi. Sungai Musi berada di tengah-tengah Kota Palembang, sungai tersebut banyak dimanfaatkan untukm pengangkutan atau transportasi. Selain mengangkut orang, angkutan sungai digunakan untuk membawa hasil bumi, terutama kelapa sawit dan CPO yang banyak terdapat disekitar aliran sungai.

Angkutan sungai di dalam Kota Palembang diwarnai dengan keberadaan kapal-kapal barang dan penumpang yang melakukan aktivitas disepanjang Sungai Musi. Mobilitas tersebut dimungkinkan walaupun sudah

ada Jembatan Ampera, Musi II, Musi IV dan Musi VI karena kebutuhan masyarakat yang berbeda – beda.

Tabel II.42
Trayek Angkutan Sungai dan Danau
Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	RUTE / LINTASAN
Zona A - Timur Laut			
1	TL-01	Palembang - Jalur 20 Muara Padang	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Desa Tanjung Baru Muara Padang - Margo Mulyo Desa Muara Padang - Jalur 20 Desa Purwodadi Kec. Muara Padang (Banyuasin)
2	TL-02	Palembang - Jalur 13 Muara Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Pantai Gigi Macan Air Solok Batu - Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan - Jalur 13 Muara Sugihan - Jalur 13 Desa Gilirang Kec. Muara Sugihan (Banyuasin)
3	TL-03	Palembang - Jalur 23 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Tongkrongan Boyo Sugih Waras / Jalur 19 - Jembatan Muara Sugihan & Air Sugihan - Makam Sayid Syarif Sulaiman- Pos Lama Betet Mekar Jaya - Tirta Mulya/PT SAML Divisi 2 - Jalur 25 Tepung Sari - Jalur 25 Desa Suka Mulya Kec Air Sugihan (OKI)
4	TL-04	Palembang - Jalur 25 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Tongkrongan Boyo Sugih Waras / Jalur 19 - Jembatan Muara Sugihan & Air Sugihan - Makam Sayid Syarif Sulaiman - Pos Lama Betet Mekar Jaya - Jalur 25 Marga Tani - Jalur 25 Desa Bandar Jaya Kec. Air Sugihan (OKI)

5	TL-05	Palembang - Jalur 27 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Pantai Gigi Macan Air Solok Batu - Simpang Parit 4 Air Solok Batu - Jalur 16 Sugih Waras Muara Sugihan - Makam Sayid Syarif Sulaiman - Jalur 27 Nusantara - Jalur 27 Desa Kertamukti - Jalur 27 Desa Nusakarta Kec. Air Sugihan (OKI)
6	TL-06	Palembang - Jalur 29 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Tongkrongan Boyo Sugih Waras / Jalur 19 - Jembatan Muara Sugihan & Air Sugihan - Jalur 29 Desa Simpang Heran Kec. Air Sugihan (OKI)
7	TL-07	Palembang - Jalur 31 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Jembatan Muara Padang & Muara Sugihan - Jalur 18 Suaka Margasatwa/Pusat Pelatihan Gajah Desa Sidomulyo Muara Padang - Pos Airud Sei Baung - Jalur 31 Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan (OKI)
8	TL-08	Palembang - Sungai Baung Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Jembatan Muara Padang & Muara Sugihan - Jalur 18 Suaka Margasatwa/Pusat Pelatihan Gajah Desa Sidomulyo Muara Padang - Pos Airud Sei Baung - Sungai Baung Desa Sungai Batang Kec. Air Sugihan (OKI)
9	TL-09	Palembang - Jalur 6 Air Salek	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Saleh Makmur/Air Saleh - Jalur 6 Desa Saleh Jaya - Jalur 6 Desa Damar Wulan Kec. Air Salek (Banyuasin)
10	TL-10	Palembang - Jalur 8 Air Salek	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Jalur 8 Air Salek Desa Bintaran Kec. Muara Padang (Banyuasin)
11	TL-11	Palembang - Jalur 10 Air Salek	16 Ilir (Palembang) - Simpang Air Kumbang - Simpang Upang - Jalur 10 Air Salek (Banyuasin)

Zona B - Barat Laut			
12	BL-01	Palembang - Sumber Marga Telang	16 Ilir (Palembang) - Upang Marga / Dermaga Penyeberangan Muara Telang - Dermaga Penyeberangan Muara Telang - Pulau Gundul - TPU Tanjung - Muara Telang - Simpang Pulau Sudimara - Pos Garuda Jalur 5 - Desa Terusan Tengah - Muara Telang Marga Kec. Sumber Marga Telang (Banyuasin)
13	BL-02	Palembang Jalur 8 Telang	16 Ilir (Palembang) - Upang Marga / Dermaga Penyeberangan Muara Telang - Simpang Jalur 8 Telang - Jalur 8 Telang Jembatan 1 Upang Ceria Kec Makarti Jaya (Banyuasin)
14	BL-03	Palembang - Muara Telang	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Simpang Jalur 10 Muara Telang - Mukti Jaya Kec Muara Telang (Banyuasin)
15	BL-04	Palembang - Makarti Jaya	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Upang Makmur - Muara Makarti Jaya Timur - Makarti Jaya Kec Makarti Jaya (Banyuasin)
16	BL-05	Palembang - Sei Semut	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Upang Makmur - Bagan Sedi/Pulau Anyar - Simpang Sei Semut - Sei Semut Kec. Simpang Hilir (Banyuasin)
Zona C - Upang (Banyuasin)			
16	UP-01	Palembang - Upang Marga	16 Ilir (Palembang) - Upang Marga (Banyuasin)
17	UP-02	Palembang - Upang Makmur	16 Ilir (Palembang) - Upang Makmur (Banyuasin)
18	UP-03	Palembang - Simpang 3 Air Kumbang	16 Ilir (Palembang) - Simpang 3 Air Kumbang (Banyuasin)
Zona D - Hulu (Muara Enim, Pali, Banyuasin)			
19	HU-01	Palembang - Tanjung Baru	16 Ilir (Palembang) - Tanjung Baru (Muara Enim)
20	HU-02	Palembang - Gedung	16 Ilir (Palembang) - Gedung Buruk / Patra Tani

		Buruk (Patra Tani - Muara Belido)	dan Muara Belido (Muara Enim)
21	HU-03	Palembang - Harapan Mulia	16 Ilir (Palembang) - Harapan Mulia (Muara Enim)
22	HU-04	Palembang - Rantau Harapan	16 Ilir (Palembang) - Rantau Harapan (Banyuasin)
23	HU-05	Palembang - Sementul	16 Ilir (Palembang) - Sementul (Banyuasin)
Zona E - Cabang (Muba, Banyuasin, Muara Enim, PALI)			
24	CA-01	Simpang PU - Karang Agung P6	Simpang PU (Banyuasin) - Karang Agung P6 (Musi Banyuasin)
25	CA-02	Simpang PU - Lalan P13	Simpang PU (Banyuasin) - Lalan P13 (Musi Banyuasin)
26	CA-03	Simpang PU - Lalan P11	Simpang PU (Banyuasin) - Lalan P11 (Musi Banyuasin)
27	CA-04	Simpang PU - Muara Primer Lalan	Simpang PU (Banyuasin) - Muara Primer Lalan (Musi Banyuasin)
28	CA-05	Sungai Rotan Muara Lematang - Perambatan	Sungai Rotan Muara Lematang (Muara Enim) - Perambatan (PALI)
29	CA-06	Sungai Rotan Muara Lematang - Rantau Bayur	Sungai Rotan Muara Lematang (Muara Enim) - Rantau Bayur (Banyuasin)

Sumber : Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 157/KPTS/DISHUB/2025 tentang Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 ke camatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Tabel II.43
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komerling	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejaw, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Rambang Dangku, Sungai Rotan, Muara Belida	3	23
		PALI	Penukal, Penukal Utara	2	6
8	Dawas	Banyuasin	Tungkal Ilir	1	2
		Musi Banyuasin	Sungai Lilin, Sanga Desa	2	3
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Pedada	OKI	Tulung Selapan	1	1
11	Jeruju	OKI	Cengal	1	1
12	Menang	OKI	Sungai Menang	1	4
13	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
14	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		PALI	Abab	1	1
		Musi Banyuasin	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
15	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65
16	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
17	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
18	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
19	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
Total				62	355

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017 dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen, dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik, 3 persen dalam kondisi rusak dan sisanya 10 persen tidak diketahui kondisinya.

Tabel II.44
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Keterangan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008	Pemprov	Proses serah terima
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993	Pemkot	
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006	Pemkot	
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995	Pemkot	
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014	Pemkot	
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot	
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004	Pemkot	
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot	
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011	Pemkot	
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998	Pemkot	
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot	
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009	Pemkot	

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Keterangan
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011	Pemkot	
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012	Pemkot	
20	4 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot	
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000	Pemkot	
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005	Pemkot	
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot	
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot	
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008	Pemkot	
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot	
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot	
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009	Pemkot	
33	Pemulutan(Po s Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990	Pemkot	
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994	Pemkab	
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990	Pemkab	
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
37	Lebong Hitam	S. Lebong	Ponton	Baik	1990	Pemkab	

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Keterangan
		Hitam, OKI					
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990	Pemkab	
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000	Pemkab	
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab	
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab	
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab	
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komerling, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab	
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006	Pemkab	
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983	Pemkab	
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab	
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab	
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003	Pemkab	
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992	Pemkab	

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Keterangan
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997	Pemkab	
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005	Pemkab	
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab	
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001	Pemkab	
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab	
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998	Pemkab	
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990	Pemkab	
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985	Pemkab	
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemprov	Proses serah terima
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993	Pemkab	
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009	Pemkab	
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab	
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab	
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000	Pemkab	
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001	Pemkab	
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab	
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab	

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Keterangan
75	Simpang	S. Komerling, OKU	Ponton	Baik	2000	Pemkab	
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993	Pemkab	
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja, Lantai Kayu	Rusak	1994	Pemkab	
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006	Pemkab	
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemprov	Proses serah terima
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008	Pemkab	
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011	Pemkab	
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemkab	
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000	Pemkab	
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000	Pemkab	
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998	Pemkab	
86	Muara Enim	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab	
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab	
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008	Pemkab	
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011	Pemkab	

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Selain Dermaga Sungai, terdapat juga tambatan perahu sebanyak 77 Unit yang dibangun melalui alokasi belanja bantuan Keuangan bersifat khusus

untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020 jumlah tambatan perahu yang dibangun sebanyak 22 unit, Tahun 2021 sebanyak 25 Unit dan Tahun 2022 sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.45

Daftar Tambatan Perahu Bantuan

Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
I	2020			
1	2020	Air Salek	Saleh Mukti	Beton
2	2020	Air Salek	Saleh Mulya	Beton
3	2020	Air Salek	Bintaran	Beton
4	2020	Air Salek	Air Solok Batu	Beton
5	2020	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Beton
6	2020	Muara Sugihan	Gilirang	Beton
7	2020	Muara Sugihan	Rejosari	Beton
8	2020	Muara Padang	Air Gading	Beton
9	2020	Muara Padang	Purwodadi	Beton
10	2020	Muara Padang	Karang Anyar	Beton
11	2020	Muara Telang	Telang Jaya	Beton
12	2020	Banyuasin II	Sungsang III	Beton
13	2020	Banyuasin II	Sungsang IV	Beton
14	2020	Selat Penuguan	Mekarsari	Beton
15	2020	Karang Agung Ilir	Tabala Jaya	Beton
16	2020	Karang Agung Ilir	Sumber Rejeki	Beton
17	2020	Sumber Muara Telang	Muara Telang	Beton
18	2020	Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Beton
19	2020	Makarti Jaya	Makarti Jaya	Beton
20	2020	Makarti Jaya	Muara Baru	Beton
21	2020	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	Beton
22	2020	Pulau Rimau	Dana Mulya	Beton
II	2021			
1	2021	Air Salek	Enggal Rejo	Beton
2	2021	Air Salek	Upang	Beton
3	2021	Air Salek	Salek Agung	Beton
4	2021	Banyuasin I	Pulau Borang	Beton
5	2021	Muara Padang	Tirta Jaya	Beton
6	2021	Muara Padang	Tirto Raharjo	Beton
7	2021	Muara Padang	Air Gading	Beton
8	2021	Muara Padang	Sumber Makmur	Beton
9	2021	Muara Padang	Daya Utama	Beton
10	2021	Muara Padang	Daya Makmur	Beton
11	2021	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	Beton
12	2021	Muara Sugihan	Mekar Jaya	Beton
13	2021	Muara Sugihan	Cendana	Beton
14	2021	Muara Sugihan	Daya Murni	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
15	2021	Tanjung Lago	Bangun Sari	Beton
16	2021	Selat Penuguan	Karang Manunggal	Beton
17	2021	Selat Penuguan	Purwodadi	Beton
18	2021	Selat Penuguan	Ringin Harjo	Beton
19	2021	Muara Telang	Sumber Mulya	Beton
20	2021	Muara Telang	Upang Cemara	Beton
21	2021	Makarti Jaya	Upang Mulya	Beton
22	2021	Pulau Rimau	Rukun Makmur	Beton
23	2021	Banyuasin II	Sungsang	Beton
24	2021	Tanjung Lago	Gasing	Beton
25	2021	Sumber Marga Telang	Karang Baru	Beton
III	2022			
1	2022	Makarti Jaya	Tanjung Mas	Beton
2	2022	Makarti Jaya	Tirta Kencana	Beton
3	2022	Air Saleh	Saleh Agung	Beton
4	2022	Air Saleh	Srikaton	Beton
5	2022	Air Saleh	Air Solok Batu	Beton
6	2022	Air Saleh	Enggal Rejo	Beton
7	2022	Muara Padang	Tanjung Baru	Beton
8	2022	Karang Agung Ilir	Karang Sari Primer 10	Beton
9	2022	Karang Agung Ilir	Mekar Sari	Beton
10	2022	Muara Telang	Telaga Makmur	Beton
11	2022	Muara Telang	Upang Karya	Beton
12	2022	Sumber Marga Telang	Talang Lubuk	Beton
13	2022	Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Beton
14	2022	Sumber Marga Telang	Muara Telang Marga	Beton
15	2022	Sumber Marga Telang	Karang Anyar	Beton
16	2022	Rantau Bayur	Rantau Harapan	Beton
17	2022	Banyuasin III	Ujung Tanjung	Beton
18	2022	Muara Sugihan	Margo Mulyo 16	Beton
19	2022	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	Beton
20	2022	Banyuasin II	Teluk Payo	Beton
21	2022	Banyuasin II	Rimau Sungsang	Beton
22	2022	Selat Penuguan	Mekar Sari	Beton
23	2022	Tanjung Lago	Manggar Raya	Beton
24	2022	Talang Kelapa	Kenten Laut	Beton
25	2022	Air Kumbang	Sebubus	Beton

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melalui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur

pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi (Kelas II dan Kelas III) sepanjang 221 Nautical Mile, Alur Sungai Banyuasin (Kelas I) sepanjang 11 Nautical Mile dan Alur Sungai Lematang 115 Nautical Mile.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Angkutan sungai yang beroperasi di Perairan Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jenis kapal antara lain : speedboat, tugboat, kapal gandeng/ tunda, tongkang, jukung dan ponton. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik.

Tabel II.46

Data Kapal Sungai yang Beroperasi pada Perairan Sumatera Selatan

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH
1	TONGKANG	75
2	TUG BOAT	358
3	JUKUNG	548
4	SPEEDBOAT	114
	TOTAL	1095

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2024

Tabel II.47

Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi
Provinsi Sumatera Selatan

No	Sub WS	Luas (Km ²)	Sungai Utama	Panjang (Km)	Beberapa Nama Anak Sungai
1	Harileko	4.013	Batangharileko	1.250	Kapas, Menanti, Lain
2	Rawas	5.841	Rawas	2.485	Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam
3	Lakitan	2.563	Lakitan	1.113	Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai
4	Kelingi	1.898	Kelingi	1.100	Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang,

					Saling
5	Musi	15.226	Musi	8.887	Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan, Padi, Saleh Upang, Padang, Lematang, Keramasan, Ogan
6	Semangus	1.972	Semangus	865	Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta
7	Lematang	7.168	Lematang	4.412	Enim, Selangis, Endikat, Lengi
8	Ogan	8.358	Ogan	5.445	Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye
9	Komering	10.275	Komering	6.260	Saka, Penaku, Gilas, Lempuing
10	Padang	2.040	Padang	1.200	Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebusus
Total		59.354		33.017	

Sumber: Studi Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu, Dept. PU.

Tabel II.48
Klasifikasi Alur Pelayaran Sungai

Klasifikasi	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)	Ruang Bebas Ketinggian (meter)	Sudah Ditetapan Menteri
Kelas I	> 10	> 250	Lebih dari 15	Sungai Musi Hilir, Banyuasin Hilir
Kelas II	5 s/d 10	100 s/d 250	10 s/d 15	Sungai Musi Hulu, Sungai Lematang
Kelas III	< 5	< 100	Kurang dari 10	-

Sumber : PP 5/2010, PM. Menteri Perhubungan 52/2012

Tabel II.49
Jumlah Rambu Sungai Provinsi Sumatera Selatan

NO.	Lokasi	Rambu Dipasang (Unit)	Kondisi
1	Sungai Musi	100	a. Baik 15 unit
			b. Hilang & Rusak 285 unit
2	Sungai Rawas	20	Hilang
3	Sungai Batang	17	Hilang

NO.	Lokasi	Rambu Dipasang (Unit)	Kondisi
4	Sungai Batanghari Leko	30	Hilang
5	Sungai Kumbang	23	Hilang
6	Sungai Lematang	30	Hilang
7	Sungai Lakitan	30	Hilang
8	Sungai Musi (Pulokerto ke Hulu Semanggis	250	Hilang
9	Sungai Ogan (Pegayut-Desa. Sungai Lebung	70	Hilang
10	Sungai Air Salek-Sungai Air Padang	242	Hilang
11	Sungai Lilin dan Sungai Lalan	258	Hilang
12	Sungai Kenten	100	Hilang
13	Sungai Telang	100	Hilang

Sumber : Cetak Biru Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Provinsi Sumatera Selatan, 2010

Dari hasil kajian dan didukung dari hasil survey di lapangan didapat bahwa jumlah penumpang di hampir semua trayek yang ada di jaringan transportasi Sungai Musi Bagian Hilir ini terus mengalami penurunan. Menurunnya penumpang pada trayek angkutan sungai musini dikarenakan di sekitar wilayah jaringan angkutan sungai musini juga terlayani oleh angkutan darat, sehingga penumpang beralih untuk menggunakan transportasi darat.

Maka dengan terus menurunnya jumlah penumpang angkutan Sungai Musi Bagian Hilir ini diindikasikan trayek-trayek tersebut tidak berpotensi untuk dilanjutkan.

Rute angkutan sungai dari kota Palembang ke arah hilir Sungai Musi adalah menuju Sungai Lalan dan sekitarnya, Sungai Sungsang dan sekitarnya, Muara Sugihan dan sekitarnya, serta Sungai Lumpur dan sekitarnya. Trayek angkutan sungai di luar Kota Palembang cenderung untuk kepentingan transportasi lokal. Kegiatan utama adalah sebagai penghubung "captive" antara satu desa dengan desa lain yang berseberangan (berada di seberang sungai), atau antar desa-desa di daerah yang terpencil dengan kota kecamatan atau ibu kota kabupaten terdekat. Jaringan layanan angkutan sungai di hilir Sungai Musi secara keseluruhan sudah terlayani angkutan sungai umum kapal motor.

Tabel II.50
Tarif Angkutan Sungai

NO.	LINTASAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF BATAS BAWAH (Rp.) – 20%		TARIF DASAR		TARIF BATAS ATAS (Rp.) + 20%	
			SOLAR	BENSIN	SOLAR	BENSIN	SOLAR	BENSIN
1	Palembang (Ampera) – Sungai Pinang	23	7.346	11.956	9.183	14.945	11.019	17.933
2	Palembang (Ampera) – Muara Lematang	85	27.149	44.184	33.936	55.230	40.723	66.276
3	Palembang (Ampera) – Teluk Kijing	134	42.799	69.654	53.499	87.068	64.189	104.482
4	Palembang (Ampera) – Muara Teladan	168	53.658	87.328	67.073	109.160	80.487	130.992
5	Palembang (Ampera) – Pangakalan Bulian	267	85.278	138.789	106.598	173.486	127.917	208.183
6	Palembang (Ampera) – Pemulutan	15	4.791	7.797	5.989	9.746	7.186	11.696
7	Palembang (Ampera) – Tanjung Raja	41	13.095	21.312	16.369	26.640	19.643	31.968
8	Palembang (Ampera) – Muara Kuang	102	32.578	53.021	40.723	66.276	48.867	79.531
9	Palembang (Ampera) – Sekayu	178	56.852	92.526	71.065	115.657	85.278	138.789
10	Palembang (Ampera) – Babat	224	71.544	116.437	89.430	145.546	107.317	174.656
11	Palembang (Ampera) – Musi Rawas	260	83.043	135.150	103.803	168.938	124.564	202.725
12	Palembang (Ampera) – Pauh	293	93.583	152.304	116.978	190.380	140.374	228.456
13	Palembang (Ampera) – Bingin Teluk	359	114.663	186.611	143.328	233.264	171.994	279.917
14	Palembang (Ampera) – Muara Rupit	388	123.925	201.686	154.906	252.107	185.888	302.529
15	Palembang (Ampera) – Tulung Selapan	105	33.536	54.580	41.921	68.225	50.305	81.870
16	Palembang (Ampera) – Sungai Lumpur	173	55.255	89.927	69.069	112.409	82.883	134.890
17	Palembang (Ampera) – Muara Batun	25	7.985	12.995	9.981	16.244	11.977	19.493
18	Palembang (Ampera) – Sp. Padang	50	15.970	25.990	19.962	32.488	23.955	38.986
19	Palembang (Ampera) – Pampangan	70	22.358	36.387	27.947	45.483	33.536	54.580
20	Palembang (Ampera) – Muara Lakitan	292	93.263	151.784	116.579	189.730	139.895	227.676
21	Palembang (Ampera) – Muara Kelingi	342	109.233	177.775	136.541	222.218	163.849	266.662
22	Palembang (Ampera) – Gunung Megang	85	27.149	44.184	33.936	55.230	40.723	66.276
23	Palembang (Ampera) – Muara Enim	272	86.875	141.388	108.594	176.735	130.313	212.082
24	Palembang (Ampera) – Muara Padang	75	23.955	38.986	29.943	48.732	35.932	58.478
25	Palembang (Ampera) – Air Sugihan	80	25.552	41.585	31.939	51.981	38.327	62.377
26	Palembang (Ampera) – Muara Sugihan	208	66.434	108.120	83.043	135.150	99.651	162.180
27	Palembang (Ampera) – Upang	44	14.053	22.872	17.567	28.589	21.080	34.307
28	Palembang (Ampera) – Makarti Jaya	71	22.677	36.906	28.346	46.133	34.016	55.360
29	Palembang (Ampera) – Sungsang	85	27.149	44.184	33.936	55.230	40.723	66.276
30	Palembang (Ampera) – Simpang PU	75	23.955	38.986	29.943	48.732	35.932	58.478
31	Palembang (Ampera) – Telang	80	25.552	41.585	31.939	51.981	38.327	62.377
32	Palembang (Ampera) – Bayung Lencir	200	63.879	103.962	79.849	129.952	95.818	155.943
33	Palembang (Ampera) – Penuguan	115	36.730	59.778	45.913	74.723	55.096	89.667
34	Palembang (Ampera) – Pulau Rimau	130	41.521	67.575	51.902	84.469	62.282	101.363
35	Palembang (Ampera) – Sungai Lilin	180	57.491	93.566	71.864	116.957	86.236	140.348
36	Palembang (Ampera) – Karang Agung	160	51.103	83.169	63.879	103.962	76.655	124.754

Sumber: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 682/KPTS/DISHUB/2022

Jenis kapal yang melayani jaringan angkutan sungai dan penyeberangan di Kota Palembang secara jenis ada 3 yaitu Speed Boat (besar, kecil), Ketek dan Jukung (besar, kecil).

Perahu Motor Ketek adalah salah satu kapal yang beroperasi di sungai Musi, sering disebut "KETEK". Kapal ini merupakan moda transportasi sungai untuk penumpang dan barang dalam jumlah kecil dan dioperasikan hanya

untuk melayani penyeberangan dalam Kota Palembang, yaitu umumnya antar wilayah seberang ulu dan seberang ilir yang saling berhadapan dan jaraknya relatif dekat. Untuk menggerakkan kapal ini digunakan mesin klotok dengan kekuatan 24 PK atau dibawahnya, dan berbahan bakar solar. Daya angkut maksimal 8-10 orang dalam posisi duduk pada ruang muat sepanjang 4 sampai 9 m dan selebar 1 hingga 1,5 m dan kapal ini pada umumnya tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan peralatan navigasi yang memadai, seperti pelampung, lampu, bendera dan lain sebagainya. Keberadaan kapal ketek ini dapat ditemui hampir di semua dermaga, baik yang berada sepanjang Sungai Musi. Dan meskipun sulit untuk menghitung secara keseluruhan jumlah ketek yang beroperasi di sungai Musi dan anak sungainya karena tidak semuanya terdaftar di Dinas Perhubungan Kota/Kab se Sumatera Selatan.



Gambar II.9

Kapal Motor Ketek

Sementara dari data lapangan dapat dicatat bahwa rata-rata kapal ketek yang beroperasi di sungai Musi, masih berusia kurang dari 8 tahun atau paling tidak merupakan kapal buatan tahun 2005. Sistem operasi kapal ketek dilakukan dengan cara mangkal di dermaga tertentu untuk meunggu penumpang, dan hanya dapat mengambil penumpang di tempat kapal tersebut bersandar, jadi setelah mengantar penumpang ke tempat tujuan maka ketek tersebut kembali ke pangkalannya dalam kondisi kosong. Dan mengingat cukup banyaknya kapal ketek yang bersandar maka kapal akan segera berangkat begitu ada penumpangnya, namun disatu dua tempat sudah

lebih tertata dengan sistim antri yaitu kapal datang lebih dulu akan mendapat prioritas pengisian penumpang dengan batas tertentu misal lima atau enam penumpang, dan setelah berangkat tempatnya diisi oleh kapal dibelakangnya, lalu saat kembali lagi dalam kondisi kosong kapal tersebut mengisi antrian yang paling belakang, demikian seterusnya saling susul.

Pada umumnya kapal kapal ketek tersebut dibuat di beberapa galangan kapal yang terdapat di sepanjang sungai Musi. Dengan usaha galangan kapal yang dijalankan dengan cara tradisional dan sangat sederhana serta dikelola oleh satu keluarga secara turun menurun, satu kapal ketek berbahan sekitar 2 meterkubik kayu meranti dapat diselesaikan selama 15 hari oleh satu orang tukang dibantu satu orang tenaga kasar.

Speed Boat yang beroperasi di Kota Palembang digunakan khusus untuk angkutan penumpang dengan trayek antar kota/kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Speed Boat yang beroperasi ada speed boat kecil dengan satu mesin dan speed boat besar dengan 2 mesin. Kapal jenis ini mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kapal yang lain dengan mesin berkekuatan 40 PK berbahan bakar bensin mampu melaju dengan kecepatan maksimum 40 km / jam sehingga untuk trayek-trayek tertentu kapal yang mempunyai ukuran lambung lebar 1,5 – 2,5 m, panjang 5,5 – 12 m dan mampu mengangkut penumpang sampai 8 – 22 orang ini sangat diperlukan keberadaannya.



Gambar II.10

Kapal Long Boat dan Speed Boat

Operasional speed boat mengingat jumlah serta jarak tempuhnya yang memakan waktu cukup panjang, sebagian besar hanya satu kali mangkal tiap harinya dengan mengambil dan membawa penumpang yang diambil dan diangkut dari pinggir sungai yang dilaluinya sepanjang alur pelayaran menuju tempat tujuan, dan hal yang sama berlangsung saat dalam perjalanan kembali ke tempat mangkal semula atau dermaga awal. Kondisi ini juga disebabkan maskin banyaknya jumlah armada speed boat sehingga diatur dan pemerataan.

Kondisi yang sangat kontras dapat ditemui pada pangkalan yang memiliki mobilitas penduduk sangat rendah, seperti tampak pada daerah - daerah pedalaman, dengan jarak tempuh yang cukup jauh serta waktu tempuh cukup panjang membuat satu speed boat hanya akan berlayar dua sampai tiga kali pulang pergi dalam satu minggunya. Sebagian besar speed boat yang ditemui sudah memiliki kelengkapan administrasi namun sebagian besar diantaranya pula tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan perlengkapan navigasi yang memadai.

Kapal Jukung adalah kapal sungai di Sungai Musi dengan konstruksi dari kayu yang melayani angkutan barang dan penumpang, prioritas adalah untuk angkutan barang. Jenis barang yang diangkut utamanya adalah hasil – hasil pertanian dan perkebunan serta sembilan bahan pokok seperti beras, kelapa, kopra, pisang, gula, minyak sayur, tepung dan lain lain.

Kapal Jukung berukuran sangat variasi diantaranya berukuran panjang 15 sampai 20 meter dengan lebar 4 sampai 6 meter ini dapat menampung barang 30 sampai 60 ton, dan dengan kekuatan mesin mobil dan berbahan bakar solar. Kapal Jukung akan melayani trayek antar kota/kabupaten terutama ke daerah hilir yang belum terjangkau oleh jaringan jalan dan angkutan umum.

Keberadaan jenis kapal jukung lebih dikarenakan untuk memaksimalkan kapasitas angkut, meskipun sesungguhnya membawa juga resiko yang tidak sedikit terutama dalam keseimbangan kapal. Sesuai dengan fungsi dan kapasitas barang yang di bawa, keberadaan kapal – kapal jukung ini lebih banyak ditemui pada dermaga atau pangkalan pasar dimana frekuensi mobilitas barang cukup tinggi. Berdasarkan survei lapangan

diperoleh data bahwa dari waktu datang kemudian bongkar lalu menunggu muatan serta waktu pergi, lama berlabuh/mangkal pada setiap dermaga rata - rata berkisar antara 1 hingga 3 hari, dan selama itu pula awak kapal yang biasanya berjumlah 3 atau 4 orang menginap di dalam kapal. Sehingga rata – rata kapal jukung ini beroperasi satu minggu satu rit atau satu kali melayani trayek pergi pulang (PP).

Angkutan sungai sebagai jaringan layanan tersendiri di hampir seluruh Sumatera Selatan berpusat di Dermaga Pasar 16 Ilir dan Dermaga Bawah Jembatan Ampera melayani rute-rute ke seluruh Sumatera Selatan serta rute lokal kota Palembang dan sekitarnya. Untuk jaringan layanan angkutan sungai musi bagain hilir dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: angkutan sungai dari dan ke kota Palembang, dan angkutan sungai antar Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, untuk trayek angkutan sungai antar Kecamatan tidak ada trayek resmi, kebanyakan dari masyarakat di sekitar sungai musi hilir, menggunakan kapalnya sendiri untuk menuju kecamatan yang dituju. Hal ini sangat sulit untuk diidentifikasi kepastian trayek tetap untuk pergerakan antar Kecamatan, namun pergerakan menggunakan angkutan sungai antar kecamatan masih digunakan penduduk sekitar.

Adapun jumlah kunjungan penumpang pada 2 (dua) dermaga yaitu Dermaga Pasar 16 Ilir dan Dermaga Bawah Jembatan Ampera sebelum masa pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (Covid – 19)* yaitu antara tahun 2016 – 2018 mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah pergerakan orang pelaku perjalanan serta perkembangan wilayah. Namun pada tahun 2019 – Mei 2021 jumlah kunjungan penumpang pada 2 (dua) dermaga tersebut mengalami penurunan, seperti unjuk kerja pada tabel berikut ini :

Tabel II.51

Jumlah Kunjungan Penumpang Tahun 2022

Jumlah Kunjungan Penumpang Lima Tahun Terakhir (2017 – 2022)

NO	DERMAGA	JENIS KAPAL	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar 16 Ilir	Speed Boat	36.255	47.223	41.263	39.463	37.588	29.111
		Ketek	15.023	18.402	16.120	14.550	16.207	13.736
		TOTAL	51.278	65.625	57.383	54.013	53.795	42.847
2	Bawah Jembatan Ampera	Speed Boat	75.726	98.995	82.402	76.983	99.821	109.915
		Long Boat	150.446	159.633	157.363	142.921	282.396	282.396
		Ketek	24.516	31.221	28.306	22.259	26.093	26.736
		TOTAL	250.688	289.849	253.071	249.163	408.310	421.064
3	7 ULU	Jukung	7.603	7.814	7.984	8.145	8.473	7.127
		Speed Boat	-	-	-	-	-	-
		Ketek	17.443	17.609	17.778	17.906	18.167	21.179
		TOTAL	25.046	25.423	25.762	26.051	26.640	28.306

Sumber : Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Prov. Sumsel - Babel

II.1.4 Transportasi Danau

Satu-satunya angkutan danau di Provinsi Sumatera Selatan yang masih eksis adalah angkutan Danau Ranau, di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan, yang melayani trayek Ranau (Sumatera Selatan) ke Kota Batu (Lampung Selatan). Angkutan danau di Danau Ranau mendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten OKU Selatan, dan masuk dalam kajian MP3EI sebagai kawasan strategis terpadu pariwisata Danau Ranau.

II.1.5 Transportasi Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api menjadi satu-satunya Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan ke Provinsi Bangka Belitung. Waktu tempuh dari Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api lebih singkat sekitar 2,5 – 3 jam menuju Pelabuhan Tanjung Kalian di Provinsi Bangka Belitung.

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api memiliki 2 (Dua) unit dermaga Movable Bridge Hydraulic.

Tabel II.52
Jumlah Kapal Yang Beroperasi

NO.	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL	GROSS TONAGE (GT)	KAPASITAS PENUMPANG (seat)	KAPASITAS KENDARAAN
1.	KMP. Dharma Kartika VII	PT. Dharma Lautan Utama	1547	362	30TS
2.	KMP. Dharma Sentosa	PT. Dharma Lautan Utama	536	200	10TS – 5KK
3.	KMP. Dharma Kartika I	PT. Dharma Lautan Utama	1305	400	50TS-50R2
4.	KMP. Dharma Kosala	PT. Dharma Lautan Utama	625	200	25TS-5KK
5.	KMP. Adhi Swadarma III	PT. Jembatan Nusantara	511	200	30R4-32R2
6.	KMP. Jembatan Musi I	PT. Jembatan Nusantara	406	250	22R4- 32R2
7.	KMP. Adhika Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1229	250	27Mix (TS dan KK)
8.	KMP. Belanak	PT. ASDP (PERSERO)	1163	204	4 TB – 10 TS – 8 KK
9.	KMP. Garda Maritim V	PT. Multi Guna Maritim	821	243	22 Mix (TS dan KK)
10.	KMP. Mutis	PT. ASDP (PERSERO)	621	250	78 KK – 4 TS
11.	KMP. Gunsa VIII	PT MUNIC LINE	1276	350	36 Mix (TS dan KK)
12.	KMP. Munic VII	PT MUNIC LINE	1279	250	24 TB – 6 TS
13.	KMP. Munic XI	PT MUNIC LINE	1681	300	75 Mix (TS dan KK)
14.	KMP. Mutiara Pertiwi III	PT. ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	303	250	21 Mix (TS dan KK)
15.	KMP Dharma Kartika VII	PT. Dharma Lautan Utama	1547	362	50TS-50R2
16.	KMP. MADANI	PT. ASDP (PERSERO)	1106	242	4 TB – 10 TS – 8 KK

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel 2024

Dalam penyelenggaraan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan, saat ini Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api telah memiliki beberapa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan. Kondisi fasilitas pelabuhan eksisting masih terus dilakukan pembenahan dari pelayanan minimal operasi menuju pelayanan prima. Berikut tabulasi fasilitas pelabuhan yang ada sebagai berikut.

Tabel II.53
Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api

NO.	FASILITAS PELABUHAN		UKURAN
A.	Fasilitas Perairan		
	1.	Movable Bridge	P = 26 m, L = 7,4 m, kapasitas beban maksimum 50 Ton
	2.	Trestle	Panjang = 204,78 m, Lebar = 10 m
	3.	Causeway	Panjang = 133 m, Lebar = 12 m
	4.	SBNP	3 (tiga) unit Rambu Suar
	5.	Rumah Genset MB	Luasan = 13,69 M ²
B.	Fasilitas Daratan		
	6.	Gedung Terminal	2 (dua) lantai dengan luas 2.376 M ²
	7.	Gangway	Panjang 700 meter
	8.	Pelataran Jalan Keluar Masuk	Luasan 2.893,37 M ²
	9.	Pelataran Parkir	Luasan 2.688,22 M ²
	10.	Gapura Pintu Masuk	1 unit
	11.	Pagar Keliling	Panjang 200 meter
	12.	Toll Gate	Tinggi = 6 m, Lebar = 16,4 m
	13.	Loket Kendaraan	Luasan = 8 M ²
	14.	Timbangan Kendaraan	Luasan = 18,75 M ² beban maks 40 ton
	15.	Rumah Genset	Luasan = 22,5 M ²
	16.	WTP	Kapasitas 100 M ³
	17.	Tanki BMM	Kapasitas 10.000 Liter
C.	Fasilitas Angkutan Lanjutan		
	18.	Bus Damri	10 unit kapasitas seat 28
	19.	Kendaraan Penumpang Travel	Tentatif

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel 2024

Dengan Adanya Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api akan membuka kawasan Tanjung Api-api sebagai Penunjang Kawasan *Deep Sea Port* Tanjung Carat.

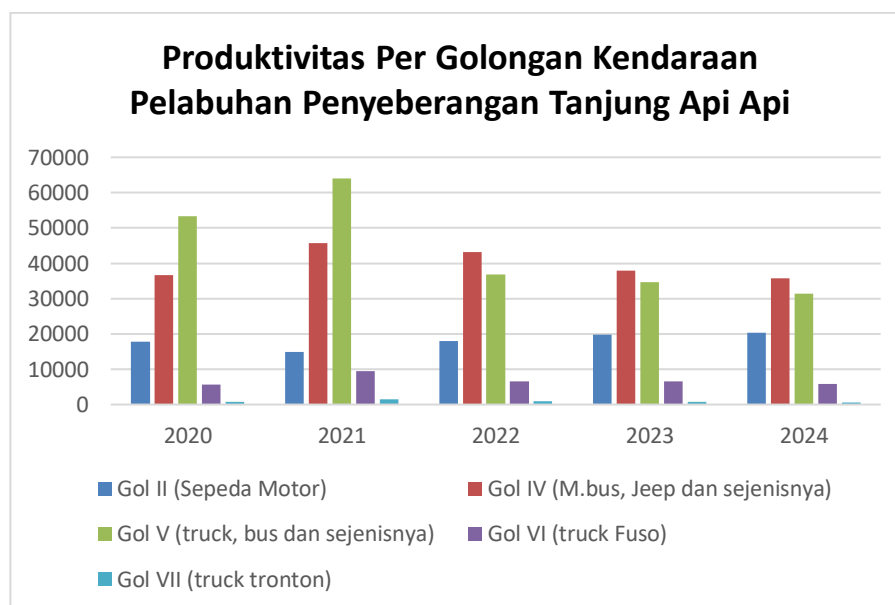
Tabel II.54
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gol II (Sepeda Motor)	17,881	14,849	17,934	19,705	20.322
	- Keberangkatan	7,389	7,905	8,754	10,403	11,202
	- Kedatangan	10,492	6,944	9,180	9,302	9,120
2	Gol IV (M.bus, Jeep	36,605	45,781	43,181	37,857	35,819

	dan sejenisnya)					
	- Keberangkatan	18,139	24,965	23,541	20,852	21,504
	- Kedatangan	18,466	20,816	19,640	17,005	14,315
3	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	53,311	64,060	36,788	34,573	31,470
	- Keberangkatan	26,340	34,081	25,756	22,343	21,140
	- Kedatangan	26,971	29,979	11,032	12,230	10,330
4	Gol VI (truck Fuso)	5,725	9,401	6,557	6,536	5,901
	- Keberangkatan	2,999	5,209	3,542	4,112	3,501
	- Kedatangan	2,726	4,192	3,015	2,424	2,400
5	Gol VII (truck tronton)	706	1,437	876	777	593
	- Keberangkatan	403	700	452	453	421
	- Kedatangan	303	737	424	324	172

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.6
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

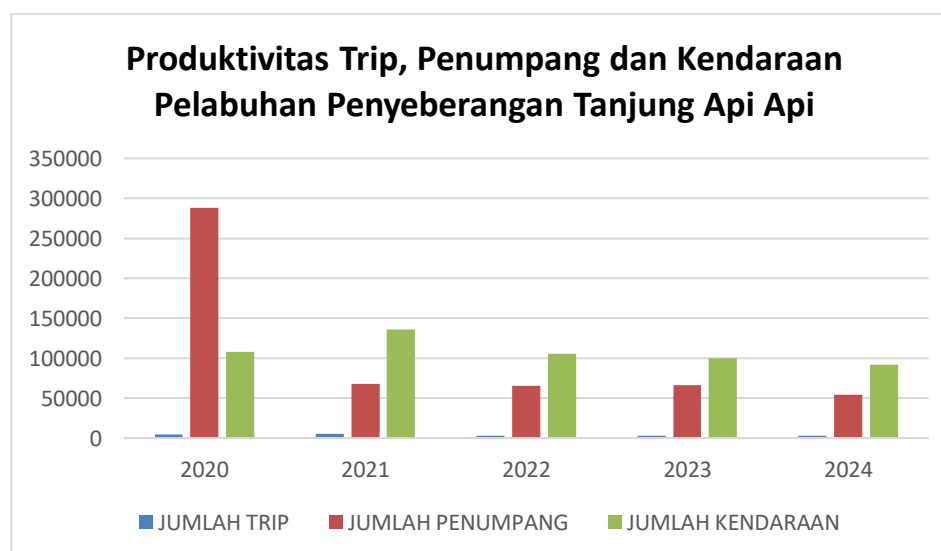


Tabel II.55
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api

NO	URAIAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	JUMLAH TRIP	4,543	5,171	3,074	3,164	3,039
	BERANGKAT	2,269	2,615	1,474	1,782	1,622
	TIBA	2,274	2,556	1,600	1,382	1,382
2	JUMLAH PENUMPANG	287,969	67,525	65,096	66,263	54,156
	BERANGKAT	135,279	34,465	33,204	34,130	28,034
	TIBA	152,690	33,060	31,892	32,133	26,122
3	JUMLAH KENDARAAN	108,006	136,071	105,503	99,549	92,243
	BERANGKAT	55,364	70,465	58,048	50,240	51,346
	TIBA	52,642	65,606	47,455	49,309	42,897

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.7
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api – api



Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

II.1.6 Transportasi Laut

New Palembang Port atau Pelabuhan Baru Palembang yang direncanakan terletak di Desa Marga Sungsang, Sungsang I dan Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu program pembangunan strategis Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan pada Sektor Perhubungan. Pelabuhan ini termasuk dalam kategori pelabuhan laut dalam atau pelabuhan samudera, dan direncanakan akan menggantikan peran Pelabuhan Boom Baru terletak di Kota Palembang yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mempersiapkan infrastruktur unggulan dan salah satu prioritas utama adalah pembangunan New Palembang Port di Tanjung Carat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembangunan pelabuhan tersebut sebagai bagian untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

New Palembang Port diproyeksikan menjadi pelabuhan utama di Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengintegrasikan aktivitas perdagangan internasional dan mendukung sektor perekonomian lainnya. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Provinsi Sumatera Selatan pada pelabuhan lain di luar Provinsi Sumatera Selatan serta menekan tingginya biaya logistik. New Palembang Port akan menjadi hub strategis untuk mempercepat distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan New Palembang Port tentu harus didukung adanya infrastruktur lainnya, seperti akses jalan dan konektivitas kawasan industri. Hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan agar pelabuhan dapat beroperasi dengan optimal setelah selesai dibangun.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk percepatan pembangunan New Palembang Port, antara lain pemenuhan dokumen teknis maupun dokumen administrasi. Pemenuhan dokumen teknis dan dokumen administrasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan regulasi serta melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

Rencana pembangunan New Palembang Port merupakan proyek strategis, untuk itu dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 menyusun tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyiapan Proyek (2026-2027)

Fokus utama adalah pada pemenuhan dokumen administrasi dokumen teknis, sertifikasi lahan dan penentuan model pembangunan serta

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan konektivitas kawasan industri.

2. Transaksi Proyek (2027-2028)

Pada tahap transaksi proyek ini berupa penyiapan berbagai dokumen dan fasilitasi, baik pembangunan fisik pelabuhan maupun operasional. Pada tahap ini dapat berupa penentuan skema pembangunan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi langsung, dengan mempedomani ketentuan regulasi.

3. Konstruksi Proyek (2028-2029)

Periode ini adalah tahap rencana pembangunan fisik yang merupakan konstruksi pelabuhan dan tahap penting sebagai tonggak sejarah salah satu penggerak daya saing perekonomian Provinsi Sumatera Selatan untuk upaya menyejahterahkan Masyarakat.

II.1.7 Transportasi Udara (Non Kewenangan)

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II telah dikenal sebagai bandara internasional sejak 1 Januari 1970 dan telah 54 tahun operasional melayani rute luar negeri. Namun pada 2 April 2024 status downgrade Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang berubah dari internasional ke domestic setelah Keputusan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2024 yang menyatakan Bandara SMB II Palembang tidak bisa lagi melayani penerbangan internasional namun penerbangan luar negeri tujuan Arab Saudi untuk keberangkatan umroh dan haji masih operasional.

Perubahan Status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II disebabkan pemerintah ingin meningkatkan kunjungan wisata domestic melalui program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Namun Bandara Sulatan Mahmud Badaruddin II Palembang di tetapkan Kembali menjadi Bandara Internasional yang tertuang dakam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 26 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandara standard Internasional yang terletak 12 km arah barat laut dari pusat kota Palembang. Bandara ini mempunyai luas 234.197 Ha dengan luas terminal penumpang 10.155 m² dan luas terminal kargo 2.020 m².

Fasilitas peralatan mekanikal bandara meliputi timbangan, conveyor belt, trolley, garbarata, escalator, dan AC sedangkan untuk keamanan meliputi X-ray, Walk Through Metal Detector, Hand Held Metal Detector, dan security CCTV.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandar udara internasional yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk moda yang digunakan dari tempat asal ke bandara bervariasi. 33,33 orang menuju bandara menggunakan mobil pribadi, disusul dengan kendaraan kantor dan sewa mobil sebesar 26,67%. Sedangkan orang yang menggunakan sepeda motor sebesar 23,33% yang menggunakan bus sebesar 10% dan taksi sebesar 6,67%.

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan terevitalisasi. Total 8 bandar udara yang ada hanya 3 yang beroperasi yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaram, sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasi.

Tabel II.56
Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Nama Bandara	Run Way	Jenis Pesawat	Keterangan
1	Palembang	SMB II	3000 x 45 m	Boeing 737/ Air Bus 330	Operasional Bandara Internasional
2	Muara Enim	Pendopo	1300 x 20 m	-	<i>Vacuum</i>
3	Muara Enim	Tanjung Enim	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>
4	Muara Enim	Serdang Gelumbang	1000 x 18 m	DHC-6	<i>Vacuum</i>
5	Lubuk Linggau	Silampari	2050 x 30 m	Fokker 50	Operasional dengan rute Lubuk Linggau- Palembang dan Lubuk Linggau Jakarta (PP)
6	Oku Selatan	Banding Agung	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>
7	Pagaralam	Atung Bungsu	1400 x 30 m	Fokker 50	Mulai Operasional Tahun 2014
8	Muba	Sekayu	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Dari gambaran kondisi infarstruktur tersebut ada beberapa fokus yang harus dihadapi kedepannya, antara lain Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor unggulan masih perlu ditingkatkan terutama untuk mengangkut barang (produk dalam skala besar yaitu Batubara, CPO, Karet, Kayu, Pulp, Semen, dll), pembangunan infrastruktur juga harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan pembangunan infrastruktur kedepannya juga harus mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel II.57
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara SMB II Palembang

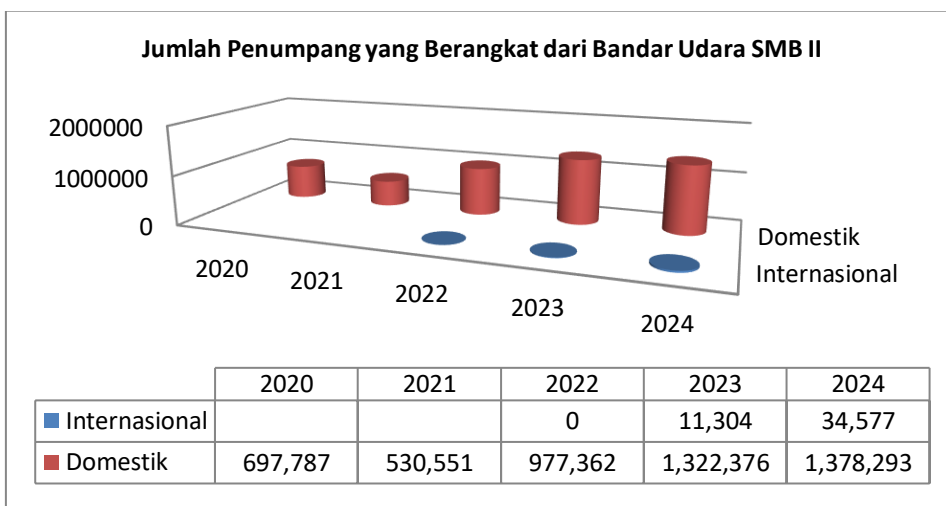
Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
BERANGKA T	Domestik	Pesawat	8,895	6,664	8,607	9,345	9,395
		Penumpang	697,787	530,551	977,362	1,322,376	1.378.293
	Internasion al	Pesawat	0	0	0	73	125
		Penumpang	0	0	0	11,304	34.577
DATANG	Domestik	Pesawat	8,775	6,634	8,540	9,349	9,400
		Penumpang	735,522	521,074	965,579	1,313,711	1.370.741
	Internasion al	Pesawat	0	0	0	92	129
		Penumpang	0	0	0	15,169	34.665
TOTAL		Pesawat	37,265	17,670	13,298	17,147	19.049
		Penumpang	3,966,122	1,433,309	1,051,625	1,942,941	2.749.034

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2024

Grafik II.8
Jumlah Penumpang Berangkat Dari Bandara SMB II Palembang



Grafik II.9
Jumlah Penumpang Datang Ke Bandara SMB II Palembang



Tabel II.58
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara Silampari Lubuk Linggau

TAHUN	JENIS PESAWAT	PESAWAT		PENUMPANG (Org)		BAGASI (Kg)		CARGO (Kg)	
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
2019	ATR72	337	337	14,755	17,140	15,602	23,649	6,781	998
	B737-500	355	355	33,465	29,756	251,284	211,368	38,527	39,166
	A320	365	365	40,152	40,601	288,066	266,246	23,074	17,340
2020	ATR72	129	129	5,067	6,240	7,638	9,953	4,561	2,459
	B737-500	69	69	4,896	3,972	37,435	28,505	14,094	5,505
	A320	124	124	14,372	133,349	108,490	116,898	14,794	11,296
2021	ATR72	24	24	724	792	2,568	2,289	53	5
	B737-500	1	1	64	147	481	1,378	13	29
	A320	79	78	7,606	8,571	58,869	72,593	2,984	4,860
2022	A320	168	168	21,058	21,388	178,351	178,259	1,021	-
2023	A320	317	317	42,673	41,847	347,433	346,401	5,891	26
2024	A320	376	376	51.489	49.723	410.888	372.947	8.239	0

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Silampari, 2024

Tabel II.59
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	SPM Bidang Perhubungan																		
A.	Angkutan Jalan																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																		
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																		
	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe B pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84

3	Fasilitas Perlengkapan Jalan																		
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%	41%	42%	43%	44%	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44
4	Keselamatan																		
	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
5	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
B.	Angkutan Sungai dan Danau																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau																		

	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	100%	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	80%	81%	82%	83%	84%
	SPM Bidang Perhubungan																		
3.	Keselamatan																		

	Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	72%	75%	78%	80%	82%	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82
	SPM Bidang Perhubungan																		
4.	Sumber Daya Manusia																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
C.	Angkutan Penyeberangan																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan																		

	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan																		
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	95%	0.75	0.80	0.85	0.90	
3.	Keselamatan																		

	Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	82%	85%	88%	90%	0.80	0.82	0.85	0.88	0.90
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
D.	Angkutan Laut																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut																		

	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Laut																		
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
3.	Keselamatan																		

	Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	72%	75%	78%	80%	85%	0.72	0.75	0.78	0.80	0.85
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	96.6%	97%	98%	99%	100%	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

Pada Tabel II.57 dapat terlihat Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) Tahun terakhir yaitu Tahun 2020 – 2024, dimana tiap tahunnya realisasi capaian meningkat 1 – 2%, hal itu bisa terlihat dari Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Danau, Angkutan Penyeberangan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan capaian namun untuk Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi masih dibawah 80% hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan pengadaan Rambu tidak optimal.

Sedangkan dari Pelayanan Angkutan Laut, Indikator Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan dan Indikator Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan masih 0% dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Jaringan Pelayanan Angkutan Laut dan Jaringan Prasarana Angkutan Laut namun untuk Indikator Keselamatan dan Sumber Daya Manusia nya realisasi capaian mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selama 4 (Empat) tahun terakhir 2021 – 2024 dapat tergambar pada tabel dibawah ini, dimana pada Tahun 2025 anggaran telah menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Kepmendagri ini terkait dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tabel II.60
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Angaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		42.032.221.000	56.142.666.403	62.892.000.817	62.769.769.085	38.077.968.866	49.600.618.909	59.443.121.674	59.569.233.230	95%	94%	83%	92%	55.959.164.326	54.970.601.293
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.000.000	430.000.000	425.000.000	235.000.000	317.212.900	398.635.092	380.958.865	225.658.124	60%	93%	90%	96%	403.750.000	351.803.225
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	65.000.000	75.000.000	70.000.000	54.248.700	62.814.550	69.760.800	65.370.644	72%	97%	93%	93%	71.250.000	66.062.175
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75.000.000	65.000.000	85.000.000	30.000.000	26.473.500	59.585.278	76.724.515	28.250.650	35%	92%	90%	94%	63.750.000	51.618.375
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75.000.000	60.000.000	50.000.000	30.000.000	48.804.200	57.970.050	47.792.830	29.819.300	65%	97%	96%	99%	53.750.000	47.201.050
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	75.000.000	60.000.000	55.000.000	15.000.000	40.433.200	51.160.975	45.506.000	14.147.000	54%	85%	83%	94%	51.250.000	42.608.300
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	75.000.000	60.000.000	50.000.000	30.000.000	48.844.500	57.391.800	43.376.750	29.816.600	65%	96%	87%	99%	53.750.000	47.211.125
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	60.000.000	50.000.000	30.000.000	55.151.800	55.807.350	43.165.100	29.152.200	74%	93%	86%	97%	53.750.000	48.787.950
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	60.000.000	60.000.000	30.000.000	43.257.000	53.905.089	54.632.870	29.101.730	58%	90%	91%	97%	56.250.000	48.314.250
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.866.452.000	18.689.777.000	18.815.937.800	20.064.268.080	12.372.267.633	16.005.584.406	17.704.121.367	18.992.683.531	89%	86%	94%	95%	17.859.108.720	17.485.562.628
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.360.852.000	18.429.097.000	18.231.867.800	19.720.045.727	12.132.620.433	15.781.826.156	17.157.084.869	18.651.914.531	91%	86%	94%	95%	17.435.465.632	17.128.407.740
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	355.600.000	160.680.000	484.070.000	299.222.353	149.880.000	132.960.000	456.286.000	296.290.000	42%	83%	94%	99%	324.893.088	273.463.088
	10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	75.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	48.786.700	46.871.750	46.881.392	29.539.000	65%	94%	94%	98%	51.250.000	44.696.675
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	75.000.000	50.000.000	50.000.000	15.000.000	40.980.500	43.926.500	43.869.106	14.940.000	55%	88%	88%	100%	47.500.000	38.995.125
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	172.930.000	115.500.000	115.500.000	150.500.000	168.344.550,00	73.818.055	31.470.000,00	103.400.000	97%	64%	27%	69%	138.607.500	137.461.138
	12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.500.000	65.500.000	115.500.000	65.500.000	64.590.550	63.960.000	31.470.000	18.820.000	99%	98%	27%	29%	78.000.000	77.772.638

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	13	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	107.430.000	50.000.000	-	85.000.000	103.754.000	9.858.055	-	84.580.000	97%	20%	0%	100%	60.607.500	59.688.500
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	490.250.000	210.000.000	595.460.000	939.000.000	281.354.117	109.713.398	480.669.334	872.305.127	57%	52%	81%	93%	558.677.500	506.453.529
	14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215.250.000	-	-	600.000.000	199.490.830	-	-	593.460.000	93%	0%	0%	99%	203.812.500	199.872.708
	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	110.000.000	175.460.000	150.000.000	-	91.656.480	101.283.815	101.086.500	0%	83%	58%	67%	108.865.000	108.865.000
	16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	50.000.000	350.000.000	139.000.000	42.168.908	-	310.443.429	133.246.500	21%	0%	89%	96%	184.750.000	145.292.227
	17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	39.694.379	18.056.918	68.942.090	44.512.127	53%	0%	98%	89%	61.250.000	52.423.595
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.225.117.000	1.930.000.000	1.734.720.517	1.873.704.294	3.038.010.209	1.726.936.003	1.511.240.592	1.822.648.470	94%	89%	87%	97%	2.190.885.453	2.144.108.755
	18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	39.811.000	29.960.000	30.000.000	29.900.000	99,53 %	99,87 %	100,0 0%	99,67 %	32.500.000	32.452.750
	19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.035.707.000	150.000.000	305.000.000	514.585.000	1.010.012.300	141.246.000	231.239.000	513.530.000	97,52 %	94,16 %	75,82 %	99,79 %	501.323.000	494.899.325
	20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	50.000.000	-	-	70.965.200	13.175.000	-	-	94,62 %	26,35 %	0%	0%	31.250.000	30.241.300
	21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	39.908.000	28.662.000	25.925.000	29.986.500	99,77 %	95,54 %	86,42 %	99,96 %	32.500.000	32.477.000
	22	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	160.000.000	120.000.000	120.000.000	103.502.827	157.111.700	119.832.950	110.201.650	103.499.100	98,19 %	99,86 %	91,83 %	100,0 0%	125.875.707	125.153.632
	23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	10.000.000	20.000.000	25.996.700	9.240.000	10.000.000	10.080.000	86,66 %	30,80 %	100,0 0%	50,40 %	22.500.000	21.499.175
	24	Penyediaan Bahan/Material	370.050.000	100.000.000	200.000.000	182.442.750	368.161.174	98.183.730	117.080.200	182.399.050	99,49 %	98,18 %	58,54 %	99,98 %	213.123.188	212.650.981
	25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	150.000.000	118.695.500	100.000.000	62.385.950	74.651.750	69.491.500	62.652.000	62,39 %	49,77 %	58,55 %	62,65 %	117.173.875	107.770.363
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.014.360.000	1.046.500.000	881.025.017	873.173.717	904.271.685	1.030.378.973	880.506.742	870.732.820	89,15 %	98,46 %	99,94 %	99,72 %	953.764.684	926.242.605
	27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	360.000.000	223.500.000	40.000.000	20.000.000	359.386.500	181.605.600	36.796.500	19.869.000	99,83 %	81,26 %	91,99 %	99,35 %	160.875.000	160.721.625

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.448.550.000	7.775.310.000	8.437.887.700	7.715.240.000	7.397.337.613,00	7.663.897.592,00	8.164.477.679,00	7.402.674.352,00	99,31%	98,57%	96,76%	95,95%	7.844.246.925	7.831.443.828
	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.995.000	3.790.000	2.584.500	1.750.000	99,90%	75,80%	51,69%	35,00%	5.000.000	4.998.750
	29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	821.350.000	908.350.000	1.036.647.700	860.697.000	772.362.613	906.207.592	811.996.179	744.188.352	94,04%	99,76%	78,33%	86,46%	906.761.175	894.514.328
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.622.200.000	6.861.960.000	7.396.240.000	6.849.543.000	6.619.980.000	6.753.900.000	7.349.897.000	6.656.736.000	99,97%	98,43%	99,37%	97,19%	6.932.485.750	6.931.930.750
	vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.637.470.000	1.762.000.000	13.951.557.000	11.727.788.631	1.519.074.011	1.557.177.307	13.466.062.470	11.157.180.095	92,77%	88,38%	96,52%	95,13%	7.269.703.908	7.240.104.911
	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	415.500.000	470.500.000	490.037.500	190.500.000	380.737.580	365.907.273	484.274.182	141.708.356	91,63%	77,77%	98,82%	74,39%	391.634.375	382.943.770
	32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.500.000	411.500.000	426.787.500	584.500.000	267.532.260	331.487.655	412.283.550	514.719.215	78,34%	80,56%	96,60%	88,06%	441.071.875	422.579.940
	33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	319.970.000	-	-	-	313.841.406	-	-	-	98,08%	0%	0%	0%	79.992.500	78.460.352
	34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.000.000	380.000.000	152.500.000	301.565.331	263.190.879	374.595.452	-	300.003.331	99,32%	98,58%	0,00%	99,48%	274.766.333	274.314.053
	35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.500.000	400.000.000	12.792.232.000	10.501.223.300	194.161.886	387.075.927	12.480.279.738	10.051.219.193	99,32%	96,77%	97,56%	95,71%	5.972.238.825	5.971.904.297
	36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	90.000.000	150.000.000	99.610.000	98.111.000	89.225.000	149.530.000	99,61%	98,11%	99,14%	99,69%	110.000.000	109.902.500
	viii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.000.000	6.540.302.403	-	-	612.100.200	6.059.272.650	-	-	76,51%	92,65%	0%	0%	1.835.075.601	1.788.100.651
	37	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-
	38	Pengadaan Alat Besar	-	903.402.403	-	-	-	903.054.800	-	-	0%	99,96%	0%	0%	225.850.601	225.850.601
	39	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	400.000.000	-	-	-	317.600.000	-	-	-	79,40%	0%	0%	0%	100.000.000	79.400.000
	40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	-	-	-	195.201.000	-	-	-	97,60%	0%	0%	0%	50.000.000	48.800.250
	41	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	4.925.550.000	-	-	-	4.488.630.260	-	-	0%	0%	0%	0%	1.231.387.500	1.231.387.500

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	711.350.000	-	-	-	667.587.590	-	-	0%	93,85 %	0%	0%	177.837.500	177.837.500
	43	Pengadaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	-	-	-	99.299.200	-	-	-	49,65 %	0%	0%	0%	50.000.000	24.824.800
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		5.129.087.600	3.242.287.500	5.660.206.000	4.658.848.190	4.955.101.252	3.052.047.245	4.717.484.107	4.377.691.728	84%	58%	49%	74%	4.672.607.323	4.629.110.736
	i	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	600.000.000	-	340.000.000	-	595.676.017	-	317.020.280	-	99,28 %	0%	93,24 %	0%	235.000.000	233.919.004
	44	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	600.000.000	-	-	-	595.676.017	-	-	-	0%	0%	0%	0%	150.000.000	148.919.004
	45	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-	340.000.000	-	-	-	317.020.280	-	0%	0%	93,24 %	0%	85.000.000	85.000.000
	ii	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.463.254.950	701.739.000	1.475.000.000	1.538.848.190	1.422.622.500,00	666.681.808,00	911.115.550,00	1.498.345.790	97,22 %	95,00 %	61,77 %	97,37 %	1.294.710.535	1.284.552.423
	46	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.463.254.950	701.739.000	1.475.000.000	1.538.848.190	1.422.622.500	666.681.808	911.115.550	1.498.345.790	97,22 %	95,00 %	61,77 %	97,37 %	1.294.710.535	1.284.552.423
	iii	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	289.227.650	773.944.500	590.000.000	556.000.000	282.120.253	753.924.176	585.307.822	547.709.200	97,54 %	97,41 %	99,20 %	98,51 %	552.293.038	550.516.188
	47	Pembangunan Gedung Terminal	-	241.350.000	-	-	-	230.577.350	-	-	0%	96%	0%	0%	60.337.500	60.337.500
	48	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	185.278.300	124.310.000	150.000.000	-	182.489.750	117.920.432	147.852.865	-	98,49 %	94,86 %	98,57 %	0,00 %	114.897.075	114.199.938
	49	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	-	-	300.000.000	0,00	-	0,00	297.610.700	0%	0%	0%	99%	75.000.000	75.000.000
	50	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	103.949.350	408.284.500	440.000.000	256.000.000	99.630.503	405.426.394	437.454.957	250.098.500	95,85 %	99,30 %	99,42 %	97,69 %	302.058.463	300.978.751
	iv	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.050.000.000	640.000.000	837.603.000	882.000.000	1.012.371.876	600.575.904	828.561.872	836.036.581	96,42 %	93,84 %	98,92 %	94,79 %	852.400.750	842.993.719
	51	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	250.000.000	65.000.000	-	252.000.000	248.102.425	60.518.600	-	249.000.000	99,24 %	93,11 %	0%	0%	141.750.000	141.275.606
	52	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	3.800.000	-	-	-	3.800.000	-	-	0%	100,00 %	0%	0%	950.000	950.000
	53	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	700.000.000	521.200.000	680.000.000	550.000.000	698.432.021	494.670.304	678.825.482	547.435.211	99,78 %	94,91 %	99,83 %	99,53 %	612.800.000	612.408.005

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	54	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	100.000.000	50.000.000	157.603.000	80.000.000	65.837.430	41.587.000	149.736.390	39.601.370	65,84 %	83,17 %	95,01 %	49,50 %	96.900.750	88.360.108
	v	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	115.000.000	50.000.000	-		113.839.678,00	47.014.874,00		0	98,9 9%	94,0 3%	0%	0%	41.250.000	40.959.920
	55	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100.000.000	-	-	-	98.890.000	-	-	-	98,89 %	0%	0%	0%	25.000.000	24.722.500
	56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15.000.000	50.000.000	-	-	14.949.678	47.014.874	-	-	99,66 %	94,03 %	0%	0%	16.250.000	16.237.420
	57	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-
	vi	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	561.605.000	325.000.000	500.000.000	375.000.000	516.099.052	312.004.329	481.143.192	320.044.603	91,9 0%	96,0 0%	96,2 3%	85,3 5%	440.401.250	429.024.763
	58	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	-	-	-	100.000.000	-			65.981.400	0%	0%	0%	65,98 %	25.000.000	25.000.000
	59	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	361.605.000	225.000.000	300.000.000	165.000.000	349.290.654	222.140.749	298.757.630	164.866.063	96,59 %	98,73 %	99,59 %	99,92 %	262.901.250	259.822.664
	60	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	200.000.000	100.000.000	200.000.000	-	166.808.398	89.863.580	182.385.562	-	83,40 %	89,86 %	91,19 %	0%	125.000.000	116.702.100
	61	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	-	-	-	110.000.000	-	-	-	89.197.140	0%	0%	0%	81,09 %	27.500.000	27.500.000
	vii	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		111.604.000	600.000.000	195.000.000	-	71.270.250	487.889.604,00	147.162.926	0%	63,8 6%	81,3 1%	75,4 7%	226.651.000	226.651.000
	62	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	111.604.000	-	160.020.000	-	71.270.250	-	117.256.700	0%	63,86 %	0%	73,28 %	67.906.000	67.906.000
	63	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	-	-	600.000.000	34.980.000	-	-	487.889.604	29.906.226	0%	0%	81,31 %	85,50 %	158.745.000	158.745.000
	viii	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	480.000.000	230.000.000	-	-	277.883.915,00	192.356.047	0%	0%	57,8 9%	83,6 3%	177.500.000	177.500.000
	64	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	-	-	134.000.000	130.000.000	-	-	79.151.020	115.975.170	0%	0%	59,07 %	89,21 %	66.000.000	66.000.000

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Elektronik														
	65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	346.000.000	100.000.000	-	-	198.732.895	76.380.877	0%	0%	57,44 %	76,38 %	111.500.000	111.500.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		2.825.188.750	4.807.780.000	23.461.821.600	2.971.742.200	2.053.157.451	4.475.098.231	22.185.613.628	2.717.177.595	54%	52%	35%	49%	8.516.633.138	8.323.625.313
	i	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	75.000.000	50.000.000		262.704.300	74.805.000,00	46.847.000,00	0,00	257.454.890	99,74 %	93,69 %	0%	98,00 %	96.926.075	96.877.325
	66	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	262.704.300	-	-	-	257.454.890	0%	0%	100%	98,00 %	65.676.075	65.676.075
	67	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	75.000.000	50.000.000	-	-	74.805.000	46.847.000	-	-	99,74 %	93,69 %	0%	0%	31.250.000	31.201.250
	ii	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	75.000.000	50.000.000	140.000.000	-	74.047.227	46.995.090	39.933.988	-	98,73 %	93,99 %	28,52 %	0%	66.250.000	66.011.807
	68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75.000.000	50.000.000	140.000.000	-	74.047.227	46.995.090	39.933.988	-	98,73 %	93,99 %	28,52 %	0%	66.250.000	66.011.807

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	iii	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	600.000.000	500.000.000	440.000.000	-	590.843.648	470.065.892	189.481.325	-	98,47%	94,01%	43,06%	0%	385.000.000	382.710.912
	69	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	600.000.000	500.000.000	440.000.000	-	590.843.648	470.065.892	189.481.325	-	98,47%	94,01%	43,06%	0%	385.000.000	382.710.912
	iv	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.450.188.750	3.270.000.000	21.751.821.600	1.229.912.900	794.825.001	3.116.251.275	21.041.382.379	993.218.772	54,81%	95,30%	96,73%	80,76%	6.925.480.813	6.761.639.875
	70	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	889.000.000	560.000.000	200.000.000	430.470.000	246.489.576	506.366.732	184.662.810	215.366.802	27,73%	90,42%	92,33%	50,03%	519.867.500	359.239.894
	71	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	1.910.000.000	2.935.750.000	-	-	1.821.384.385	2.804.663.452	-	0%	95,36%	95,53%	0%	1.211.437.500	1.211.437.500
	72	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	561.188.750	800.000.000	18.616.071.600	799.442.900	548.335.425	788.500.158	18.052.056.117	777.851.970	97,71%	98,56%	96,97%	97,30%	5.194.175.813	5.190.962.481
	v	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	475.000.000	290.000.000	690.000.000	1.179.125.000	369.631.500	229.563.100	475.851.230	1.169.482.369	77,82%	79,16%	68,96%	99,18%	658.531.250	632.189.125
	73	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	340.000.000	775.183.500	-	-	129.000.680	773.501.821	0%	0%	37,94%	99,78%	278.795.875	278.795.875
	74	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	475.000.000	290.000.000	350.000.000	403.941.500	369.631.500	229.563.100	346.850.550	395.980.548	77,82%	79,16%	99,10%	98,03%	379.735.375	353.393.250
	vi	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	75.000.000	597.780.000	440.000.000	150.000.000	74.644.075	533.956.074	438.964.706	148.510.782	99,53%	89,32%	99,76%	99,01%	315.695.000	315.606.019
	75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	75.000.000	597.780.000	440.000.000	150.000.000	74.644.075	533.956.074	438.964.706	148.510.782	99,53%	89,32%	99,76%	99,01%	315.695.000	315.606.019
	vii	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	75.000.000	50.000.000	-	150.000.000	74.361.000	31.419.800	-	148.510.782	99,15%	62,84%	-	99,01%	68.750.000	68.590.250
	76	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di	75.000.000	50.000.000	-	150.000.000	74.361.000	31.419.800	-	148.510.782	99,15%	62,84%	-	99,01%	68.750.000	68.590.250

BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Regional														
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		625.000.000	170.000.000	300.000.000	223.197.173	539.128.470	164.197.476	299.590.632	198.370.560	86,2 6%	96,5 9%	99,8 6%	88,8 8%	329.549.293	308.081.411
	i	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	400.000.000	-			388.848.724,00	-			97,2 1%	-	-	-	100.000.000	97.212.181
	77	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	400.000.000	-	-	-	388.848.724	-	-	-	97,21 %				100.000.000	97.212.181
	ii	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000	50.000.000	100.000.000	80.000.000	47.824.734,00	48.304.195	99.877.704	70.561.000	63,77 %	96,61 %	99,88 %	88,20 %	76.250.000	69.456.184
	78	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	75.000.000	50.000.000	100.000.000	80.000.000	47.824.734	48.304.195	99.877.704	70.561.000	63,77 %	96,61 %	99,88 %	88,20 %	76.250.000	69.456.184
	iii	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	75.000.000	50.000.000	100.000.000	80.000.000	53.691.762,00	48.167.050	99.999.770	72.053.913	71,5 9%	96,3 3%	100, 00%	90,0 7%	76.250.000	70.922.941
	79	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	75.000.000	50.000.000	100.000.000	80.000.000	53.691.762	48.167.050	99.999.770	72.053.913	71,59 %	96,33 %	100,0 0%	90,07 %	76.250.000	70.922.941
	iv	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000	70.000.000	100.000.000	63.197.173	48.763.250,00	67.726.231	99.713.158	55.755.647	65,0 2%	96,7 5%	99,7 1%	88,2 2%	77.049.293	70.490.106
	80	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75.000.000	70.000.000	100.000.000	63.197.173	48.763.250	67.726.231	99.713.158	55.755.647	65,02 %	96,75 %	99,71 %	88,22 %	77.049.293	70.490.106

II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perhubungan

a. Isu Permasalahan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan, jaringan pelayanan serta simpul transportasi darat yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya :

- 1) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga masih ada dispensasi penggunaan jalan umum menuju terminal khusus dan stockpile angkutan kereta api;
- 2) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
- 3) Masih belum optimalnya kinerja pelayanan terminal tipe B Sumatera Selatan;
- 4) Belum adanya terminal khusus angkutan barang;
- 5) Pelanggaran terhadap kelebihan muatan masih terjadi;
- 6) Belum optimalnya kinerja angkutan umum AKDP dengan tantangan angkutan berbasis online;
- 7) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum sehingga memerlukan subsidi angkutan jalan (keperintisan);
- 8) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;
- 9) Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dilatari dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan risiko serta penyelesaian pembebasan lahan;
- 10) Belum optimalnya kinerja penurunan emisi gas buang kendaraan tidak diiringi dengan upaya untuk mereduksi pengaruh emisi gas buang kendaraan;

b. Isu Permasalahan Pengelolaan Pelayaran;

Untuk pengelolaan pelayaran yang dalam penyelenggaraannya menyangkut masalah angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP serta

pengelolaan wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan pelayaran, terdapat beberapa isu permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :

1. Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Beberapa wilayah di Sumatera Selatan adalah perairan, sehingga perlu adanya angkutan sungai yang memadai untuk memfasilitasinya;
3. Belum optimalnya angkutan danau hal ini terkait dengan pengembangan danau sebagai objek pariwisata;
4. Fasilitas pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api masih minim perlu pengembangan (belum selesainya pembangunan dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api;
5. Belum optimalnya pemenuhan Standart Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan;
6. Belum tersedianya dermaga untuk fasilitas kapal cepat serta dermaga sungai di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
7. Belum tersedianya kolam pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api sebagai antisipasi mempertahankan kedalaman alur pelayaran;
8. Rendahnya pemahaman keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;
9. Kinerja pelayanan Pelabuhan Utama (Boom Baru) saat ini terkendala dengan terbatasnya alur pelayaran serta hinterland pelabuhan yang stagnan untuk pengembangan sehingga perlu pemindahan lokasi ke Tanjung Carat;
10. Terdapat 17 (tujuh belas) titik lokasi potensial pembangunan Pelabuhan dengan status hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional belum dilakukan kajian Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;

c. Isu Permasalahan Pengelolaan Perkeretaapian;

1. Tingginya biaya investasi untuk pembangunan jalan baru kereta api;
2. Belum adanya kerjasama pembangunan pintu perlintasan sebidang kereta api antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Belum sinkronisasi peraturan pusat dan kebijakan daerah;
4. Belum terlaksananya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyelenggaraan perkeretaapian provinsi, salah satu jalur potensial yaitu Tanjung Enim – Tanjung Api api;
5. Pembangunan jalur kereta api baru belum diarahkan ke keterpaduan konektivitas dengan rencana Pelabuhan di Tanjung Carat;

- 6. Belum optimalnya kinerja pelayanan kereta api mahasiswa (Railbus) karena membutuhkan perpanjangan jalur sampai ke Kampus UNSRI Indralaya.
- d. Isu Permasalahan Transportasi Perkotaan;
 - 1. Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);
 - 2. Belum ditetapkannya Kawasan Aglomerasi Perkotaan, salah satu potensial yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung;
- e. Permasalahan Transportasi Multimoda.
 - 1. Belum terlaksananya Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan sebagai simpul multimoda untuk memecah permasalahan angkutan barang dan kemacetan dalam Kota Palembang;
 - 2. Belum adanya Badan Layanan berbadan hukum yang mengurus multimoda;
 - 3. Belum optimalnya integrasi layanan multimoda, baik integrasi fisik, integrasi tiket dan integrasi waktu.

Tabel II.61
Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Transportasi Berdasarkan Kewenangan

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
A	Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1.	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jaringan LLAJ belum menyentuh sampai ke pelosok daerah
		Belum terealisasinya jaringan baru angkutan batu bara
2.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Belum adanya data dan informasi kebutuhan perlengkapan jalan provinsi
		Belum adanya prioritas pemasangan perlengkapan jalan terhadap daerah rawan kecelakaan
		Proporsional penurunan angka kecelakaan terhadap realisasi pemasangan perlengkapan jalan
3.	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Belum terpadunya jaringan lintas batas antar provinsi
		Belum optimalnya kinerja pelayanan di terminal type B
4.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
		Belum berjalannya evaluasi dan tindaklanjut atas manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan dengan LHR tinggi
5.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan LLAJ dengan jaringan jalan nasional,

		provinsi dan kabupaten/kota
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Anda Lalin
6.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan antar moda transportasi
		Belum berjalannya tim terpadu audit dan inspeksi keselamatan LLAJ lintas stakeholders
7.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Belum terpenuhinya kinerja SPM angkutan umum
		Belum optimalnya keterpaduan antar moda angkutan
		Masih rendahnya load factor angkutan
		Maraknya angkutan umum berbasis online
8.	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum adanya regulasi penetapan kawasan terintegrasi perkotaan sebagai kota peyanggah ibukota provinsi
9.	Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Belum ditetapkan kawasan aglomerasi perkotaan, salah satu potensial kawasan yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
10.	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Standart Pelayanan Minimal menjadi Standart Pelayanan Prima
11.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota / kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Adanya konsep Transit Oriented Development (TOD) pada salah satu terminal
12.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Izin trayek saat ini baru 25 trayek, belum mencakup 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
13.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum optimalnya pelayanan terminal sesuai dengan fungsinya
14	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum seluruhnya manajemen dan rekayasa persimpangan di jalan provinsi dengan penggunaan IT
B.	Sub Urusan Pelayaran	
1.	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam wilayah Daerah Provinsi	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
2.	Penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
3.	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah	Belum ditetapkan trayek tetap dan teratur pada penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

	provinsi yang bersangkutan	
4.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan / atau jaringan jalur kereta api provinsi.	<i>Moda share</i> angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
5.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	<i>Moda share</i> angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
6.	Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
7.	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi	<i>Moda share</i> angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
8.	Penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
9.	Pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
10.	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	<i>Moda share</i> angkutan sungai dengan angkutan jalan raya masih sangat rendah
11.	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
12.	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
13.	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
14.	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
15.	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
16.	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional

C.	Sub Urusan Perkeretaapian	
1.	Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	Rencana induk jaringan perkeretaapian belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur
2.	Penerbitan izin usaha, isin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota	Tingginya biaya investasi pembangunan kereta api umum namun KPBU belum optimal dikarenakan dukungan jaminan atas risiko dari Pemerintah masih rendah
3.	Penetapan jaringan jalur kereta api uang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan jalur kereta api masih melihat pangsa pasar yang ada
4.	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi	Penetapan kelas stasiun harus diikuti dengan pengembangan kawasan menjadi <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) atau pun Kawasan Industri sehingga dapat meningkatkan kinerja <i>Land Value Capture</i>
5.	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingginya biaya investasi pembangunan kereta api umum namun KPBU belum optimal dikarenakan dukungan jaminan atas risiko dari Pemerintah masih rendah
6.	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Moda share angkutan kereta api masih sangat rendah dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk jaringan pelayanan jarak dekat dan menengah
7.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Perekertaapian khusus masih harus diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya seperti integrasi pelabuhan, sehingga pengeluaran angkutan barang melalui moda transportasi kereta api lebih optimal (membangun dengan konsep <i>bundling</i> dengan moda transportasi lainnya)

II.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun anggaran 2026 tidak terlepas dari kondisi yang saat ini terjadi pada semester III tahun anggaran 2025 dimana isu perekonomian global dan laju inflasi sebagai akibat dari pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Kondisi ini menjadi cerminan terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 untuk memulihkan kondisi ekonomi dan jaminan kesehatan masyarakat yang tergambar pada 4 (empat) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibun;
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan;
- 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Telaaha Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPKD yaitu pada prioritas daerah yaitu meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan dimana Program Prioritas Daerah untuk mendukung ini adalah Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang diterjemahkan kedalam Program Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Konektivitas Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau dan Penyeberangan
2. Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Transportasi
3. Peningkatan Prasarana Transportasi terutama pada wilayah terisolir dan dalam rangka pengembangan wilayah
4. Pendekatan simpul transportasi untuk menciptakan ekonomi kreatif

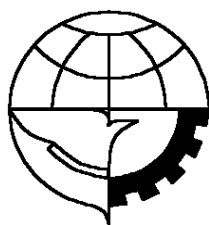
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat pengguna transportasi juga ikut berperan dalam merencanakan kegiatan transportasi yang di mulai dari masyarakat pedesaan, kelurahan, kecamatan serta kabupaten/kota secara berjenjang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Usulan program kegiatan masyarakat yang diinput melalui aplikasi SIPD diantaranya :

1. Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan;
2. Pembangunan beberapa dermaga pada daerah *captive area*
3. Alat keselamatan transportasi darat dan perairan sungai

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis OPD diharapkan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sebagai bahan komparasi capaian sasaran dalam Renstra OPD. Sehingga dengan adanya keselarasan akan tercapai sinergi dan satu kesatuan kesisteman transportasi dari mulai Sislognas, Sistranas, Tatranas, Tatrakil dan Tatraklok.

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025 – 2029

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju tahun 2045 dan mencapai cita – cita Indonesia Emas 2045. Maka untuk mendukung Visi Presiden 2025 - 2029 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 sebagai berikut: “Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ”.

Adapun Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 yaitu Sebagai Berikut :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industry transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman

- 4. Memperkuat kualitas SDM Transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
- 5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi dan sector ekonomi utama
- 6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
- 7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional
- 8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tabel III.1
Telaah Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Dengan
Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

NO.	ITEM TELAAH	RPJMD	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SINKRONISASI
1.	VISI	Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua	Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada "Maju Infrastruktur Transportasi Sumatera Selatan" dengan indikator Maju layanan transportasi, peningkatan persentase keselamatan transportasi, serta peningkatan kinerja pelayanan publik
2.	MISI	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada meningkatnya persentase pengguna moda transportasi umum yang berkeselamatan merata ke daerah pelosok
			2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industry transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada kualitas layanan transportasi Sumatera Selatan guna kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk

			3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada Integrasi Moda angkutan umum perkotaan serta revitalisasi trayek angkutan umum
			4. Memperkuat kualitas SDM Transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Perhubungan
			5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi dan sector ekonomi utama	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada konektivitas transportasi provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengurangan angka kemiskinan
			6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada Kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi wilayah pedalaman dan perbatasan Sumatera Selatan
			7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada kualitas layanan simpul transportasi
			8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada peningkatan persentase pengguna angkutan umum

TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025 – 2029

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 - 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara

lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025 - 2045;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025 – 2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, sasaran pembangunan tahunan tahap ke-1 (RPJMN 2025 - 2029) diarahkan pada "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2025 - 2029 juga mencantumkan target Indonesia. Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 memiliki 3 Sasaran Nasional dan 6 Sasaran Strategis.

Sasaran Nasional dalam RPJMN yaitu :

1. Penurunan Biaya Logistic (PN5)
2. Penurunan Emisi GRK (PN2)
3. Peningkatan Stok Infrastruktur (PN3)

Sasaran Strategis yaitu :

4. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional
5. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional
6. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional
7. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional
8. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten
9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pembangunan sektor transportasi ada 3 (tiga) fokus menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Konektivitas dan layanan transportasi;
- 2) Pengembangan Aglomerasi Industri di KI / KEK Prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru

3) Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : untuk menghubungkan berbagai wilayah dan moda transportasi agar mobilitas orang dan barang lebih efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : untuk meningkatkan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan dan pengembangan SDM Transportasi

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya Kualitas Kebijakan transportasi nasional

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatkan SDM transportasi yang kompeten melibatkan peningkatan keterampilan teknis, kepemimpinan, dan manajerial, serta pengembangan soft skills seperti berpikir kritis, kreatif, dan inovatif

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan tujuan : mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) sasaran strategis penunjang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama :
 - IKSS 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional.

- IKSS 1.2 Rasio Integrasi Transportasi Nasional
2. Mencakup SS-2 dengan Inikator Kinerja Utama
 - IKSS 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public sector transportasi
 3. Mencakup SS-3 dengan Inikator Kinerja Utama
 - IKSS 3 Tingkat Keselamatan transportasi nasional
 4. Mencakup SSP-4 dengan Inikator Kinerja Utama
 - IKSSp 4 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan
 5. Mencakup SSP-5 dengan Inikator Kinerja Utama
 - IKSSp 5 Meningkatnya SDM Transportasi yang kompeten
 6. Mencakup SS-6 dengan Inikator Kinerja Utama
 - IKSSp 6 Indkes RB Kementerian Perhubungan

Dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian Perhubungan, hal ini diselaraskan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Renstra OPD dan digambarkan pada ilustrasi pada tabel berikut.

Tabel III.2
Telaah Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

NO.	ITEM TELAAH	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		RENSTRA OPD	
1.	TUJUAN	1.	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025 - 2029	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	
		2.	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif dan berdaya saing		
		3.	Terwujudnya kebijakan dan SDM Transportasi yang berkualitas		
		4.	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang berintegras dan adaptif		
2.	SASARAN	1.	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi nasional	1.	Meningkatnya keselamatan Transportasi Provinsi
		2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional	2.	Meningkatnya Layanan Transportasi
		3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional	3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
		4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Nasional		
		5.	Meningkatnya SDM Transportasi yang Kompeten		
		6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Dari tabel III.2 diatas, telaaha sinkronisasi dianalisis sebagai berikut :

1. bahwa tujuan Rencana Strategis (Renstra OPD) guna Terwujudnya meningkatnya kualitas infrastruktur angkutan jalan & meningkatnya pelayanan transportasi umum di Sumatera Selatan *telah* sejalan dengan *tujuan* Kedua Kementerian Perhubungan yaitu Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif dan berdaya saing;
2. bahwa *sasaran strategis* (SS) Renstra OPD dalam upaya mewujudkan *tujuan* yaitu meningkatnya keselamatan Transportasi Provinsi Baik di Darat Sungai dan Penyeberangan *telah* sejalan dengan *sasaran strategis ketiga* (SS.3) Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional, meningkatnya Layanan Transportasi telah sejalan dengan *sasaran strategis kedua* (SS.2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional dan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah telah Selaras dengan *sasaran strategis keenam* (SS.6) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

HIGHLIGHT 1 : Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Indikasi Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan adalah

1. Highlight Kegiatan Prioritas:
 - a. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Jambi – Rengat)
 - b. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Probolinggo – Banyuwangi)
 - c. Pembangunan Jalan Tol Akses Simpul Transportasi (Akses Pelabuhan Patimban)
 - d. Pembangunan Jalan Pansela Jawa Timur (Jember – Banyuwangi)
 - e. Pembangunan Jalan Trans Papua (Mamberamo – Elelim)
 - f. Pembangunan Jalan Trans 3T (Pulau Enggano, Mentawai)
 - g. Pembangunan Jalan Akses PLBN Perbatasan Kalimantan dan Papua (Akses PLBN Long Nawang; Ubrub – Oksibil)
 - h. Pembangunan Fly Over/Underpass Simpang KA Perkotaan (FO Buah Batu dan Sudirman)
2. Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Jalan melalui layanan penyiapan RC termasuk lahan
3. Highlight Arah Pengembangan Wilayah :
 - KI: Kuala Tanjung, Tenayan, Kemingking
 - KEK: Sei Mangkei
 - KSPN: Danau Toba
4. Highlight Arah Pengembangan Infrastruktur Konektivitas :
 - Jalan Tol Trans Sumatera
 - Exit Tol (Jalan Daerah) terhubung ke Lokasi Kawasan –

Kawasan Industri sepanjang Koridor Jalan Tol

- Pelabuhan: Kuala Tanjung, Belawan
- Bandara: Kualanamu
- Aerocity dan hub Kargo
- KA Akses: KA Sei Mangke-Kuala Tanjung, KA Lahat-Tarahan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan delivery capacity system dan pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pengembangan Jaringan Jalan Tol

Diarahkan penilaian proyek prioritas yang mengintegrasikan Analisis Multi-Kriteria (MCA), Outline Business Cases (OBC), dan Full Business Cases (FBC), kelembagaan dan Skema pembiayaan alternative

2. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan mendukung sistem logistik Nasional dan akses daerah 3TP

Diarahkan pada koridor dengan trafik tinggi dan terpadu dengan pengembangan kawasan ekonomi;

3. Pembinaan Tata Kelola Jalan Daerah melalui Skema Hibah berbasis Kinerja
4. Pokja lintas sektor untuk penanganan ODOL

Pilot KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumsel dan Riau yang terintegrasi dengan Jewmbatan Timbang (UPPKB)

HIGHLIGHT 2 : Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang

Indikasi Kegiatan Prioritas

- Sumatera: koridor trans sumatera serta kereta akses menuju simpul transportasi dan kawasan prioritas
- Jawa: penyiapan/pembangunan kereta cepat Jawa, jalur ganda dan simpul transportasi, reaktivasi, dan peningkatan jalur dan persinyalan jalur KA
- Sulawesi: koridor trans Sulawesi untuk akses pelabuhan & kawasan prioritas
- Kalimantan: penyiapan KA Perkotaan IKN dan akses ke bandara Balikpapan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang adalah :

1. Penyiapan/Pembangunan KA cepat untuk meningkatkan efisiensi koridor antar kota kota besar konurbasi di Jawa
2. Pembangunan KA antar kota, akses simpul transportasi dan kawasan prioritas di Jawa dan Sumatera
3. Jaringan KA logistik dan penumpang di luar Jawa/Sumatera
4. Pemenuhan dukungan angkutan khususnya sarana KA untuk layanan non komersial dan pemenuhan IMO Perkeretaapian

HIGHLIGHT 3 : Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu

Indikasi Kegiatan Prioritas

- Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan
 - Pelabuhan simpul utama
 - Pelabuhan mendukung kawasan prioritas
 - Kawasan mendukung kawasan tertinggal dan perbatasan
- Penyediaan Layanan Angkutan Laut Penumpang dan BArang Nonkomersil
 - Pelayaran perintis
 - Pelayaran tol laut
 - Pelayaran kapal ternak
 - Pelayaran kapal rede
- Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Laut
 - Pelayaran perintis
 - Pelayaran tol laut
 - Pelayaran kapal ternak
 - Pelayaran kapal rede

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu yaitu :

1. Pembangunan hub di Timur dan integrasi dengan kawasan.
 - Integrasi pelayaran komersil dan pelayaran non komersil dengan titik hub ada di wilayah timur Indonesia.
 - Aktivasi jaringan *freight RoRo* yang memiliki efisiensi pada rute jarak menengah 500 km – 1.000 km dan volume dibawah 500 TEUs sebagai feeder di wilayah timur.
2. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang lebih kompetitif melalui penyedia jasa yang lebih lebih beragam
 - Tinjauan dan revisi SKB tentang TKBM
 - Reformasi tariff kepelabuhan yang menerapkan prinsip cost recovery pada semua terminal
3. Restrukturisasi pengelolaan pelabuhan dengan pembentukan *Master Developer* dalam pengelolaan pelabuhan komersial.
4. Opsi kebijakan untuk pengerukan:
 - 1) Mengalokasikan PNBP Jasa Labuh suatu Pelabuhan untuk pengerukan di Pelabuhan tersebut
 - 2) Menyerahkan pengelolaan pemasukan Jasa Labuh kepada operator pelabuhan
5. Peremajaan Kapal melalui pembentukan Badan Layanan Umum investasi kapal

HIGHLIGHT 4 : Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu

Indikasi Kegiatan Prioritas

- Sumatera: pengembangan Bandara Kualanamu, Hang Nadim; dan Bandara Perairan (*seaplane*), serta peningkatan bandara *feeder* di pulau terluar

- Jawa: pengembangan Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda, pengembangan fasilitas hub kargo udara, dan pengembangan *Aerocity* Kertajati
- Bali-Nusra: pengembangan Bandara Ngurah Rai dan Labuan Bajo, peningkatan fasilitas kargo udara dan bandara *feeder* pendukung pariwisata
- Kalimantan: pengembangan Multi-Airport System (IKN, Balikpapan, Samarinda) serta peningkatan bandara *feeder* di daerah perbatasan
- Sulawesi: pengembangan Bandara Sam Ratulangi, Sultan Hasanudin, Kendari, Morowali, Bau-Bau, serta peningkatan bandara *feeder* pendukung kawasan
- Maluku-Papua: pengembangan Bandara Sentani, Wamena dan DEO Sorong, dan Bandara Perairan (*seaplane*), peningkatan fasilitas kargo udara di Timur, peningkatan bandara hub dan *feeder* untuk perintis termasuk *Airstrip* di Papua

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu yaitu :

- Pengembangan infrastruktur dan layanan pada bandara utama dan *feeder* termasuk *airstrip* untuk keperintisan
- Optimalisasi layanan perintis udara dengan menerapkan skema MYC atau KPBU-AP
- Pengembangan bandara mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3TP termasuk bandara perairan (*seaplane*)
- Modernisasi layanan navigasi serta keselamatan & keamanan penerbangan
- Mendorong pengembangan industri penerbangan (*aerocity*, MRO, teknologi drone/UAV) dan implementasi penerbangan rendah karbon melalui penggunaan bioavtur secara bertahap
- Keterpaduan Bandara Utama dengan Kawasan Pariwisata Prioritas dengan strategi:
 - 1) Penguatan Hub Bandara, Penetapan hub dan peningkatan kapasitas dan layanan
 - 2) Aktivasi jaringan hub and spoke, penetapan dan utilisasi loop service
 - 3) Integrasi dengan pariwisata, pembangunan konektivitas dengan kawasan pariwisata

HIGHLIGHT 5 : Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- Penanganan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan pada setiap Lokasi Rawan Kecelakaan dan Perlintasan Sebidang.
- Penyelenggaraan, pengendalian dan pemenuhan persyaratan kendaraan laik jalan dan kendaraan yang Over Load dan Over Dimensi
- Penguatan koordinasi 5 (lima) pilar keselamatan LLAJ

- Penguatan integrasi data keselamatan dan perencanaan Keselamatan LLAJ
- Pengembangan kelembagaan dan skema pendanaan Keselamatan dalam mendukung program Keselamatan LLAJ.

Indikasi Lokasi Prioritas

- Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Super Prioritas dan Prioritas (tersebar)
- 2.721 lokasi (2025-2029, kumulatif) dan penyiapan (KPBU-AP) : Pembangunan Fly Over Panorama I (Sitinjau Lauik I).
- Jumlah perlintasan tidak dijaga mencapai 2.420 (resmi tidak dijaga dan liar).
- Pemenuhan jumlah alat uji kendaraan bermotor yang belum memiliki UPUBKB
- Jumlah Kabupaten/Kota yang belum memiliki alat uji sebanyak 41 Kab/Kota.
- Pendampingan penyusunan RAK Daerah : 20 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Pengembangan Proving Ground BPLJSKB : Bekasi (KPBU)
- Pembangunan/Pengembangan UPPKB: antara lain UPPKB Marisa (Gorontalo), UPPKB Pasar Panas, (Kalteng) UPPKB Datae (Sulsel), dan UPPKB Walenrang (Sulsel)
- Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PKNJ) (34 Provinsi) dan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (29 Provinsi)

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Konektivitas Darat yaitu :

- Pengembangan/pembangunan pelabuhan dan peremajaan kapal serta peningkatan kinerja lintas penyeberangan pada lintas utama komersial
- Integrasi layanan transportasi SDP dengan layanan transportasi lainnya secara efektif
- Penguatan layanan keperintisan penyeberangan
- Penyediaan skema pengadaan dan peremajaan kapal SDP melalui skema pendanaan yang berkelanjutan
- Penyediaan skema pembiayaan TKD ke Pemda untuk mendukung transportasi SDP
- Pemenuhan, pengendalian, dan pengawasan fasilitas keselamatan dan keamanan SDP
- Pemantapan model bisnis terpisah antara operator sarana dan prasarana penyeberangan

Indikasi Kegiatan Prioritas

1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

- *Highlight* Pengembangan pelabuhan pada lintas penyeberangan utama: Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Tj. Api-Api-Tj. Kelian, Bajoe-Kolaka, Kayangan-Pototano, Kariangau-Penajam

- Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru: *carry-over* sasaran pokok RPJMN 2020-2024 (berdasarkan kesiapan) di Sumatera, Nusra, Maluku, Sulawesi, Papua
 - Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau: Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua
2. Pembangunan Sarana Penyeberangan
- Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua
3. Layanan Angkutan Penyeberangan Nonkomersial pada Wilayah Lambat Tumbuh

HIGHLIGHT 6 : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mengembangkan sistem angkutan umum massal

Percepatan pembangunan sistem angkutan massal di wilayah Metropolitan Prioritas, melalui :

- Melanjutkan Sustainable Urban Mobility Plan berbasis wilayah fungsional (*metropolitan statistical area*) contoh: IKN- Balikpapan-Samarinda, Manado, Banjarmasin, Palembang
- Pengembangan kelembagaan pengelola transportasi metropolitan, contoh: Jabodetabek (MRT E-W), BRT Metropolitan Bandung, Medan
- Pengembangan skema integrasi pendanaan (co financing: tanggung jawab Pemda, optimalisasi swasta, dan dukungan pusat sejauh diperlukan), contoh MRT Jakarta
- Integrasi pengembangan angkutan umum dengan pengembangan perumahan, termasuk untuk MBR
- Implementasi Smart Mobility contoh: pemanfaatan ART di IKN
- Kegiatan Prioritas Mendukung Pembangunan Transportasi Hijau
 1. E-Bus untuk Angkutan Perkotaan
 2. Pengembangan Transportasi Rel Berbasis Bisnis

HIGHLIGHT 7 : Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi

- Peningkatan jumlah lulusan pengembangan SDM vokasi maupun teknis bidang transportasi.
- Pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan SDM transportasi.
- Penguatan skema *link and match* dalam pengembangan dan pemanfaatan SDM transportasi.

- Pengembangan pemberdayaan SDM untuk bidang *safety, security*, logistik, digitalisasi, IT, dan elektrifikasi sarana transportasi.

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi;
5. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten
6. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik

Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain :

1. Peningkatan konektivitas internasional didukung industry transportasi berdaya saing dan berorientasi global;
2. Peningkatan efektivitas konektivitas backbone antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan efesiensi sistem distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistic;
4. Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi;
5. Pemerataan jaringan transportasi ke kawasan perdesaan dan DTPK;
6. Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi;
7. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan public sebagai bagian dari pelayanan dasar sesuai SPM;
8. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pada melalui digitalisasi
9. Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan secara berkelanjutan;
10. Percepatan transisi energy serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim
11. Pemenuhan (compliance) standar teknis sarana dan prasarana serta standar kompetensi SDM transportasi
12. Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan
13. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi
14. Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan)
15. Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan Transportasi
16. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Transportasi

- 17. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industry, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi
- 18. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan
- 19. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan
- 20. Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
- 21. Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tabel III. 3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi terhadap
Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

Urusan Perhubungan :				
No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Rasio Konektivitas Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	meningkatnya rasio konektivitas provinsi menjadi 0,681	rata – rata meningkatnya rasio konektivitas Kab/Kota menjadi 0,526	meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763
2	V/C ratio jalan	terjaganya V/C ratio jalan provinsi pada kisaran ≤0,390	terjaganya V/C ratio jalan Kab/Kota ≤0,390	terjaganya V/C ratio ruas jalan nasional ≤0,750
3	Tingkat Keselamatan transportasi	meningkatnya tingkat keselamatan transportasi provinsi menjadi 100%	meningkatnya tingkat keselamatan transportasi Kabupaten / Kota menjadi ≥98%	meningkatnya tingkat keselamatan transportasi nasional menjadi 100%
4	Rata –rata Load Factor Angkutan Umum	meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum provinsi menjadi ≥ 60%	meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum Kabupaten / Kota menjadi ≥ 50%	meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum nasional menjadi ≥ 70%
5	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja	Meningkatnya persentase pemenuhan standar layanan kinerja transportasi provinsi menjadi ≥ 90%	Meningkatnya persentase pemenuhan standar layanan kinerja transportasi Kabupaten / Kota menjadi ≥ 85%	Meningkatnya persentase pemenuhan standar layanan kinerja transportasi nasional menjadi ≥ 95%

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPJMD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah satu tujuan. Adapun Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas"

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Terjaganya V/C Rasio jalan Provinsi pada Kisaran 0,390
2. Meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum provinsi menjadi $\geq 71\%$
3. Meningkatnya rasio konektivitas provinsi menjadi 0,634

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pembangunan transportasi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program nomenklatur dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pembangunan sektor transportasi dalam Rencana Strategis 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025 - 2026. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka

penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 (SS.1) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi

Untuk mewujudkan tujuan :

1. Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Jalan untuk mengurangi kecelakaan
2. Meningkatkan Pemenuhan Pintu Perlintasan Sebidang
3. Meningkatkan Pemenuhan Sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar

Sasaran Strategis 1 (SS.2) Meningkatnya Layanan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan :

1. Meningkatnya Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Sumatera Selatan
2. Meningkatnya Penggunaan Moda Transportasi Umum
3. Meningkatnya Layanan Simpul Transportasi

Sasaran Strategis 3 (SS.3) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra OPD tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* and *leaming and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Transportasi

Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 2 V/C Rasio

2. *Customer Perspective*

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 3 Rata – rata load factor angkutan umum

Perumusan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kinerja (pohon kinerja lengkap terlampir dalam dokumen Renstra PD) sebagai berikut :

Tabel III. 4
Tabel Pohon Kinerja OPD

VISI RPJMD	:	Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua	
MISI 4 RPJMD	:	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Tujuan OPD	:	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	
Indikator Tujuan	:	Rasio Konektivitas	: 0.634 Rasio
		V/C Rasio Jalan Provinsi	: 0.390 Rasio
	:	Rata – rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum	: 70 %
Sasaran Strategis		Intermediate Outcome 1	Intermediate Outcome 2
1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan yang sesuai standar		Tersedianya rencana keselamatan transportasi jalan yang terintegrasi
			Tersusunnya data lokasi rawan kecelakaan dan rekomendasi perlengkapan keselamatan
			Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi perlengkapan keselamatan jalan
			Terbitnya standar teknis dan spesifikasi perlengkapan keselamatan jalan
			Terlaksananya penganggaran prioritas untuk perlengkapan keselamatan
			Tersedianya data titik rawan kecelakaan dan kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan berbasis hasil analisis lalu lintas
			Terlaksananya audit keselamatan jalan secara berkala terhadap ruas jalan provinsi
			Tersedianya sistem pengaturan dan pengendalian lalu lintas berbasis teknologi di kawasan prioritas
			Terbitnya jadwal operasional dan skema pengaturan lalu lintas pada hari atau jam tertentu di ruas padat lalu lintas
			Tersedianya rencana penyediaan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang
	Meningkatnya keterpenuhan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang		Terbitnya standar teknis keselamatan perlintasan sebidang
			Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi petugas penjaga perlintasan

		Terlaksananya sosialisasi keselamatan pengguna jalan di sekitar perlintasan sebidang
		Terbitnya kemitraan dengan komunitas lokal untuk pengawasan dan pelaporan pelanggaran di perlintasan sebidang
		Tersedianya peta lokasi dan kebutuhan fasilitas keselamatan fisik pada perlintasan sebidang berbasis survei teknis
		Terbitnya pedoman teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang (rambu, palang, sinyal, marka)
		Terbitnya SOP pengaturan prioritas lalu lintas kereta api dan kendaraan di perlintasan sebidang
		Tersedianya sistem monitoring waktu tunggu dan volume lalu lintas di perlintasan sebidang
	Tersedianya sarana angkutan sungai yang memenuhi standar keselamatan	Terbitnya standar teknis keselamatan sarana angkutan sungai
		Tersedianya sistem sertifikasi dan uji kelayakan teknis angkutan sungai
		Tersedianya fasilitas tambat dan sarana keselamatan dermaga sesuai standar keselamatan pelayaran sungai
		Terbitnya dokumen hasil inspeksi dan audit keselamatan dermaga secara berkala
		Terbitnya regulasi teknis dan SOP operasional keselamatan bagi badan usaha pelayaran sungai
		Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan kelayakan kapal oleh petugas pengawas pelayaran secara periodik
		Tersedianya daftar kapal angkutan rakyat yang telah memenuhi standar keselamatan minimum
		Terlaksananya sosialisasi keselamatan dan pelatihan tanggap darurat bagi awak kapal dan pengguna jasa
2. Meningkatnya Layanan Transportasi	Meningkatnya konektivitas trayek angkutan antar wilayah dalam provinsi	Tersedianya rencana induk jaringan trayek angkutan umum antar wilayah dalam provinsi
		Tersusunnya basis data trayek eksisting, trayek

		prioritas, dan daerah tidak terlayani (blank spot)
		Terbitnya kebijakan pengembangan trayek angkutan antar wilayah berbasis kebutuhan dan konektivitas antar pusat kegiatan wilayah
		Tersedianya sistem informasi dan peta digital trayek angkutan umum provinsi
		Tersedianya forum koordinasi lintas kabupaten/kota dalam perencanaan trayek angkutan antar wilayah
		Terbitnya regulasi dan standar pelayanan minimum trayek antar wilayah
		Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi konektivitas trayek secara periodik
		Terbitnya regulasi dan zonasi operasional angkutan barang untuk mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas
	Meningkatnya penggunaan moda transportasi umum	Terbitnya kebijakan tarif yang kompetitif dan regulasi subsidi angkutan umum
		Tersedianya sistem informasi layanan angkutan umum berbasis digital
		Terbitnya standar pelayanan minimum (SPM) angkutan umum provinsi
		Tersedianya kampanye publik edukatif dan promosi penggunaan angkutan umum
		Tersedianya program insentif bagi operator yang menjaga tingkat keterisian (load factor) tertentu
		Tersedianya hasil evaluasi berkala terhadap trayek, kepadatan, dan perilaku pengguna
		Tersedianya sistem pengaduan dan respon cepat terkait pelayanan angkutan umum
	Meningkatnya Layanan Simpul Transportasi	Tersedianya rencana induk pengembangan terminal penumpang tipe B
		Terbitnya standar pelayanan minimum terminal penumpang
		Tersedianya sistem manajemen operasional terminal penumpang berbasis digital
		Terbitnya regulasi operasional dan jadwal

		layanan terminal penumpang
		Tersedianya sistem pengaduan dan pemantauan kepuasan pengguna terminal
		Terbitnya izin pengelolaan terminal sesuai ketentuan perundang-undangan
		Terbitnya perjanjian kerja sama pengelolaan terminal dengan pelaku usaha
		Tersedianya rencana induk pengembangan pelabuhan pengumpan regional
		Terbitnya standar pelayanan minimum pelabuhan pengumpan regional
		Tersedianya sistem manajemen jadwal dan sandar kapal berbasis digital
		Terbitnya regulasi operasional pelabuhan pengumpan regional
		Tersedianya sistem pemantauan Berth Occupancy Ratio (BOR) dermaga
		Terbitnya izin pengelolaan pelabuhan pengumpan sesuai ketentuan
		Terbitnya skema kemitraan pengelolaan pelabuhan dengan sektor swasta
		Terlaksananya pengaturan jadwal operasional dan sandar kapal secara tepat waktu di pelabuhan penyeberangan
		Tersedianya sistem pemantauan real-time lalu lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan
		Tersedianya sistem administrasi pelaporan dan dokumentasi operasional pelabuhan secara digital dan tepat waktu
		Terbitnya laporan evaluasi pelayanan pelabuhan secara berkala sebagai dasar peningkatan kinerja layanan
	Meningkatnya layanan transportasi perkeretaapian	Tersedianya jadwal perjalanan kereta api komuter yang terintegrasi dengan moda lanjutan di Stasiun Indralaya
		Terlaksananya pemantauan keselamatan operasional dan penumpang di lingkungan Stasiun Indralaya secara rutin
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata kelola perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Tersedianya sistem informasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah

		Terbitnya pedoman teknis perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja
		Tersedianya indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung yang terdokumentasi dan terukur
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan dan penganggaran berbasis digital
		Terbitnya pedoman teknis penganggaran berbasis kinerja dan prioritas pembangunan daerah
		Tersedianya laporan keuangan berkala yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
		Terbitnya kebijakan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan penganggaran
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian terintegrasi
		Terbitnya pedoman pengelolaan kepegawaian berbasis merit sistem
		Tersedianya peta jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah yang mutakhir
		Tersedianya sistem evaluasi kinerja pegawai yang terukur dan terstandar
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan BMD yang terintegrasi antar perangkat daerah
		Terbitnya pedoman teknis dan SOP pengelolaan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan
		Tersedianya hasil inventarisasi dan penilaian ulang BMD secara berkala
	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Tersedianya sistem informasi manajemen keuangan dan layanan BLUD yang terintegrasi
		Tersedianya mekanisme evaluasi kinerja BLUD secara berkala dan transparan
		tersedianya program peningkatan kapasitas manajerial dan teknis SDM BLUD
	Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sebagai berikut :	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	

Tabel III.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASELINE (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
				2. Rata – rata load factor angkutan umum	Persentase	70	71	71,5	72	72,5	73	73,5
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	3. Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	Persentase	97	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Layanan Transportasi	4. Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	5. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	94,67	100	100	100	100	100	100

III.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan Renstra Sektor Perhubungan pada periode tahun 2025–2029 merupakan pendekatan dalam memecahkan isu permasalahan, tantangan, peluang, serta hambatan yang dihadapi sektor transportasi, dalam skala prioritas yang perlu segera ditangani pada kurun waktu 2025–2029. Strategi dan arah kebijakan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD, serta mendukung sasaran strategis sektor perhubungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Strategi dan arah kebijakan ini memuat langkah konkret berupa program, kegiatan, dan sub-kegiatan sektoral maupun lintas sektor, yang bersifat indikatif dalam menjawab permasalahan transportasi seperti rendahnya tingkat keselamatan, terbatasnya konektivitas antarwilayah, menurunnya kinerja jalan, rendahnya penggunaan angkutan umum, serta belum optimalnya pelayanan transportasi publik.

Program dan kegiatan tersebut disusun untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Renstra sektor perhubungan tahun 2025–2029 secara efektif dan efisien, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan transportasi yang berkelanjutan, aman, terintegrasi, dan inklusif. Sebagai bagian dari sistem mobilitas masyarakat dan logistik daerah, sektor perhubungan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan mendukung sektor-sektor prioritas lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Perhubungan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan organisasi dirumuskan sebagai berikut:

Tabel III.6
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ISU STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
							2025	2026	2027	2028	2029
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio	Menurunnya kinerja jaringan jalan akibat kemacetan	Pengendalian V/C Ratio dan manajemen lalu lintas	Survei dan evaluasi kapasitas ruas jalan	Peningkatan kapasitas dan manajemen lalu lintas	Implementasi pengendalian lalu lintas berbasis ITS	Penataan ruang dan jalur kendaraan berat	Optimalisasi peran jalan alternatif
				2. Rata – rata load factor angkutan umum	Rendahnya tingkat keterisian angkutan umum	Revitalisasi angkutan umum	Pemetaan potensi dan trayek prioritas	Pengadaan Angkutan Perintis	Revitalisasi rute dan manajemen trayek	Promosi dan insentif penggunaan angkutan umum	Evaluasi load factor dan sistem subsidi
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	3.Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi provinsi	Penanganan titik rawan kecelakaan dan keselamatan	Identifikasi dan pemetaan titik rawan kecelakaan	Pembangunan dan penyediaan sarana keselamatan transportasi (rambu dan marka jalan)	Pelatihan pengemudi dan sosialisasi keselamatan	Penegakan hukum dan pengawasan keselamatan transportasi	Evaluasi dan penguatan sistem keselamatan transportasi daerah

BAB III Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD

			Meningkatnya Layanan Transportasi	4.Rasio Konektivitas Transportasi	Rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah	Penguatan simpul transportasi	Identifikasi missing link dan simpul prioritas	Sinkronisasi perencanaan konektivitas dengan kab / kota	Pembangunan jaringan konektivitas strategis berbasis data	Integrasi jaringan moda darat dan laut	Evaluasi dan pemutakhiran konektivitas wilayah
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	5.Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja layanan transportasi belum optimal	Digitalisasi dan peningkatan layanan public transportasi	Penetapan Indikator Layanan Minimum	Digitalisasi data dan Sistem informasi transportasi	Penguatan Sistem Pengaduan dan Monev layanan	Perlibatan masyarakat dalam penilaian layanan	Evaluasi kinerja dan reformasi kelembagaan
				6. Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Belum terpasangnya Perlengkapan Jalan Provinsi sesuai kondisi ideal	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 5%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 2%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 3%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 3%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 2%
				7. Cakupan / Persentase Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Belum optimalnya fasilitas keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Sosialisasi Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyusunan Dokumen Inventarisasi Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Sertifikasi Kompetensi SDM Penjaga Pintu Perlintasan Sebidang	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi

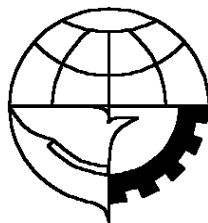
					8. Persentase sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar	Belum optimalnya konektivitas angkutan umum di Sumatera Selatan	Mendorong penyediaan angkutan umum pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Umum pada Daerah yang belum terlayani	
					9. Persentase Trayek Angkutan Umum yang Terlayani	Belum optimalnya penggunaan angkutan umum Darat	Optimalisasi Penggunaan Angkutan Umum Darat	Survei Load Factor Angkutan Umum	Survei Inventarisasi Angkutan Umum	Survei Interview pada Masyarakat dan melakukan pemetaan Demand Angkutan Umum	Mendorong penggunaan angkutan umum darat dengan analisa harga dan kebutuhan armada	Mendorong penggunaan angkutan umum dengan peningkatan fasilitas
					10. Load Factor Angkutan Umum Darat (AKDP)	Belum optimalnya angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumatera Selatan	Optimalisasi Penggunaan Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan	Survei Load Factor Angkutan Sungai danau dan penyeberangan	Survei Inventarisasi Angkutan Sungai danau dan penyeberangan	Survei Interview pada Masyarakat terkait keselamatan perjalanan	Optimalisasi Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai danau dan penyeberangan	Mendorong penggunaan angkutan sungai danau dan penyeberangan dengan peningkatan keselamatan dan penertiban izin operasi
					11. Load Factor Angkutan Umum Sungai (Lintas Kab/Kota)	Belum terpenuhinya simpul transportasi kewenangan provinsi yang sesuai standar	Mendorong peningkatan kualitas simpul transportasi yang sesuai standar	Survei Inventarisasi simpul	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar

BAB III Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD

				Belum optimalnya infrastruktur batubara	Mendorong percepatan jalan khusus sesuai aturan dan percepatan operasional alur sungai musi 24 jam	Pengawasan ODOL	Survey Alur Sungai Musi	Penyusunan DED terkait alur sungai musi 24 jam	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam
				Belum Optimalnya transportasi multimoda	Optimalisasi transportasi multimoda	Melaksanakan pemetaan terminal integrasi dan terminal multimoda	Melaksanakan evaluasi terhadap fasilitas integrasi pada simpul	Pembahasan Rencana Pebaikan Fasilitas Integrasi dan Multimoda bersama Stakeholder	Mendorong Rencana Pebaikan Fasilitas Integrasi dan Multimoda bersama Stakeholder	Penyusunan DED terkait Integrasi dan Multimoda
				Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi, dokumen teknis dan sertifikasi lahan	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi, dokumen teknis dan sertifikasi lahan	Mendukung penyiapan berbagai dokumen dan fasilitasi, baik pembangunan fisik pelabuhan maupun operasional	Mendukung pembangunan fisik New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung pembangunan fisik New Palembang Port Tanjung Carat
				Belum Optimalnya pengawasan angkutan barang	Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Barang

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan program ini meliputi penetapan program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, serta pagu indikatif sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.

Indikasi program berfungsi sebagai arah prioritas pembangunan sektor perhubungan untuk periode 2025–2029, sedangkan pagu indikatif mencerminkan estimasi kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan guna menjamin keberlangsungan program. Dengan demikian, perangkat daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan terukur.

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR

Untuk mencapai tujuan strategis pembangunan sektor perhubungan, ditetapkan beberapa program utama sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan dasar bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, kepegawaian, dan aset, program ini memastikan perangkat daerah mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan barang milik daerah, serta dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi pilar untuk meningkatkan profesionalitas aparatur serta kualitas

layanan publik. Dengan dukungan program ini, penyelenggaraan urusan transportasi dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdaya guna.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang tertib, aman, dan nyaman. Fokus kegiatan mencakup penetapan dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, serta pengelolaan dan pengembangan terminal tipe B. Program ini juga mengedepankan manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan, serta audit keselamatan. Selain itu, penyediaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan umum dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan penumpang. Dengan implementasi program ini, diharapkan tercipta kelancaran arus lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang berkualitas di wilayah provinsi.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan untuk memperkuat konektivitas maritim melalui pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan pelabuhan serta penataan badan usaha jasa kepelabuhanan. Program ini meliputi penyusunan dan penetapan rencana induk pelabuhan, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, hingga pengembangan pelabuhan sungai dan danau. Selain itu, pemberian izin usaha jasa terkait dan fasilitasi perizinan secara elektronik dilakukan guna mendukung iklim usaha kepelabuhanan yang sehat. Pengawasan terhadap badan usaha pelabuhan turut dijalankan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, serta memperkuat peran transportasi air sebagai penunjang ekonomi daerah.

4. Program Perkeretaapian

Program Perkeretaapian berfokus pada pengembangan sistem transportasi massal yang berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penetapan jaringan jalur kereta api kewenangan provinsi, penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian, serta sosialisasi dan uji coba kebijakan jaringan perkeretaapian. Di samping itu, program ini juga mencakup penerbitan izin pembangunan dan operasi perkeretaapian khusus serta fasilitasi perizinan melalui sistem elektronik. Implementasi program ini diharapkan mampu memperluas aksesibilitas,

memperlancar mobilitas barang dan penumpang, serta mendorong integrasi antar moda transportasi di tingkat provinsi.

Dengan adanya keempat program utama tersebut, arah pembangunan sektor perhubungan diharapkan dapat berjalan secara lebih terukur dan terintegrasi. Untuk mewujudkan pembangunan sektor perhubungan secara sistematis, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Struktur ini dirancang agar setiap langkah pembangunan transportasi dapat terukur, berjenjang, serta memiliki keterkaitan langsung antara kebijakan makro dan implementasinya di lapangan.

Tujuan pembangunan perhubungan menjadi dasar bagi pencapaian sasaran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program utama. Program-program tersebut selanjutnya dijabarkan secara rinci ke dalam rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2026 sebagai berikut :

TABEL
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
PROVINSI SUMATERA SELATAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RANCANGAN KUA DAN PPAS	USULAN PERUBAHAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	10	11	12	13	14
		TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,903,500,000	4,903,500,000	-				3,903,500,000			
		TOTAL BELANJA				65,359,606,532	45,331,787,104					49,864,965,815			
	2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi		90 %	42,384,681,353	36,836,494,009	(5,548,187,344)			90 %	40,520,143,410			
	2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelaporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah		85 %	26,851,471,753	25,162,152,960	(1,689,318,793)			85 %	27,678,368,256			
1	2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	220 Orang/Bulan	26,282,249,400	24,697,152,960	(1,585,096,440)	DAU		225 Orang/Bulan	27,166,868,256	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
2	2 15 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	419,222,353	400,000,000	(19,222,353)	APBD		1 Dokumen	440,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
3	2 15 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	50,000,000	25,000,000	(25,000,000)	APBD		1 Laporan	27,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
4	2 15 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	20,000,000	(30,000,000)	APBD		1 Dokumen	22,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
5	2 15 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	20,000,000	(30,000,000)	APBD		1 Dokumen	22,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Penataan Barang Milik Daerah		83 %	837,500,000	208,000,000	(629,500,000)			83 %	228,800,000			
6	2 15 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	1 Dokumen	212,500,000	118,000,000	(94,500,000)	APBD		1 Dokumen	129,800,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
7	2 15 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	1 Dokumen	625,000,000	90,000,000	(535,000,000)	APBD		1 Dokumen	99,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		75 %	610,000,000	240,000,000	(370,000,000)			75 %	264,000,000			
8	2 15 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	3 Dokumen	250,000,000	65,000,000	(185,000,000)	APBD		3 Dokumen	71,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
9	2 15 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	30,000,000	(20,000,000)	APBD		1 Dokumen	33,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
10	2 15 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	25,000,000	(25,000,000)	APBD		1 Dokumen	27,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
11	2 15 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	30,000,000	(20,000,000)	APBD		1 Dokumen	33,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
12	2 15 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	25,000,000	(25,000,000)	APBD		1 Dokumen	27,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
13	2 15 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumsel	1 Laporan	70,000,000	40,000,000	(30,000,000)	APBD		1 Laporan	44,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	

NO	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RANCANGAN KUA DAN PPAS	USULAN PERUBAHAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	10	11	12	13	14
14	2 15 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumsel	1 Laporan	90,000,000	25,000,000	(65,000,000)	APBD		1 Laporan	27,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah		80 %	628,850,000	189,460,000	(439,390,000)			80 %	208,406,000			
15	2 15 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	-	(50,000,000)	APBD		1 Dokumen	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
16	2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	10 Orang	235,000,000	94,000,000	(141,000,000)	APBD		5 Orang	103,400,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
17	2 15 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumsel	100 Orang	268,850,000	95,460,000	(173,390,000)	APBD		200 Orang	105,006,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
18	2 15 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumsel	10 Orang	75,000,000	-	(75,000,000)	APBD		10 Orang	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Layanan Umum Perangkat Daerah		85 %	1,762,000,000	663,000,000	(1,099,000,000)			85 %	729,300,000			
19	2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	10 Paket	40,000,000	30,000,000	(10,000,000)	APBD		10 Paket	33,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
20	2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	5 Paket	315,000,000	-	(315,000,000)	APBD		11 Paket	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
21	2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	2 Paket	120,000,000	48,000,000	(72,000,000)	APBD		2 Paket	52,800,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
22	2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumsel	1 Dokumen	12,000,000	-	(12,000,000)	APBD		1 Dokumen	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
23	2 15 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	100,000,000	40,000,000	(60,000,000)	APBD		1 Paket	44,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
24	2 15 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumsel	1 Laporan	150,000,000	56,000,000	(94,000,000)	APBD		1 Laporan	61,600,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
25	2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumsel dan Luar Sumsel	1 Laporan	990,000,000	468,000,000	(522,000,000)	APBD		1 Laporan	514,800,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
26	2 15 1 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	1 Dokumen	35,000,000	21,000,000	(14,000,000)	APBD		1 Dokumen	23,100,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Penyelesaian Tugas Kantor		90 %	6,089,859,600	5,726,381,049	(363,478,551)			90 %	6,299,019,154			
27	2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	1 Laporan	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)	APBD		1 Laporan	5,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
28	2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumsel	1 Laporan	734,000,000	868,981,049	134,981,049	APBD		1 Laporan	955,879,154	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
29	2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sumsel	1 Laporan	5,345,859,600	4,852,400,000	(493,459,600)	APBD		1 Laporan	5,337,640,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Terpelihara		78 %	1,605,000,000	647,500,000	(957,500,000)			78 %	712,250,000			

NO	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RANCANGAN KUA DAN PPAS	USULAN PERUBAHAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	10	11	12	13	14
30	2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sumsel	12 Unit	285,000,000	113,000,000	(172,000,000)	APBD		12 Unit	124,300,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
31	2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	32 Unit	650,000,000	244,000,000	(406,000,000)	APBD		32 Unit	268,400,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
32	2 15 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	1 Unit	100,000,000	76,000,000	(24,000,000)	APBD		1 Unit	83,600,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
33	2 15 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sumsel	1 Unit	70,000,000	31,500,000	(38,500,000)	APBD		1 Unit	34,650,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
34	2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Sumsel	1 Unit	210,000,000	83,000,000	(127,000,000)	APBD		1 Unit	91,300,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
35	2 15 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	412 Unit	290,000,000	100,000,000	(190,000,000)	APBD		412 Unit	110,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 01 1.08	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Meningkatnya penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		90 %	4,000,000,000	4,000,000,000	-			90 %	4,400,000,000			
36	2 15 01 1.10 04	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Banyuasin	1 Unit Kerja	4,000,000,000	4,000,000,000	-	BLUD		1 Unit Kerja	4,400,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan		14,23 rasio	16,454,250,179	6,835,384,495	(9,618,865,684)			14,23 rasio	7,518,922,945			
	2 15 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		40 %	911,500,000	367,300,000	(544,200,000)			40 %	404,030,000			
37	2 15 02 1.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	300,000,000	120,000,000	(180,000,000)	APBD		1 Dokumen	132,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
38	2 15 02 1.01 05	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	611,500,000	247,300,000	(364,200,000)	APBD		1 Dokumen	272,030,000			
	2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		40 %	7,517,194,326	2,496,278,154	(5,020,916,172)			40 %	2,745,905,969			
39	2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Sumsel	50 Unit	7,517,194,326	2,496,278,154	(5,020,916,172)	APBD		6 Unit	2,745,905,969	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang Dikelola		7 Unit	1,831,000,000	982,000,000	(849,000,000)			7 Unit	1,080,200,000			
40	2 15 02 1.03 07	Revitalisasi Terminal Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Sumsel	7 Terminal	1,080,000,000	717,000,000	(363,000,000)	APBD		7 Terminal	788,700,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
41	2 15 02 1.03 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Sumsel	7 Terminal	751,000,000	265,000,000	(486,000,000)	APBD		7 Terminal	291,500,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		80 %	1,181,000,000	424,300,000	(756,700,000)			80 %	466,730,000			
42	2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	144,000,000	58,000,000	(86,000,000)	APBD		1 Laporan	63,800,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
43	2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	937,000,000	334,700,000	(602,300,000)	APBD		1 Laporan	368,170,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	

NO	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RANCANGAN KUA DAN PPAS	USULAN PERUBAHAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	10	11	12	13	14
44	2 15 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	100,000,000	31,600,000	(68,400,000)	APBD		1 Laporan	34,760,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02 1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Sumsel	33 %	75,000,000	33,480,000	(41,520,000)			33 %	36,828,000			
45	2 15 02 1.06 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Sumsel	1 Laporan	75,000,000	33,480,000	(41,520,000)	APBD		1 Laporan	36,828,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		80 %	400,000,000	100,000,000	(300,000,000)			80 %	110,000,000			
46	2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Sumsel	1 Laporan	250,000,000	100,000,000	(150,000,000)	APBD		1 Laporan	110,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
47	2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Sumsel	1 Laporan	150,000,000	-	(150,000,000)	APBD		1 Laporan	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		80 %	4,391,215,853	2,370,486,341	(2,020,729,512)			80 %	2,607,534,975			
48	2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Sumsel	1 Laporan	536,000,000	493,400,000	(42,600,000)	APBD		1 Laporan	542,740,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
49	2 15 02 1.08 03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumsel	3 Unit	3,855,215,853	1,877,086,341	(1,978,129,512)	APBD		6 Unit	2,064,794,975	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		52 %	147,340,000	61,540,000	(85,800,000)			52 %	67,694,000			
50	2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Sumsel	2 Unit	147,340,000	61,540,000	(85,800,000)	APBD		4 Unit	67,694,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah trip perjalanan kapal		3,856 trip	6,178,025,000	1,467,290,000	(4,710,735,000)			3,856 trip	1,614,019,000			
	2 15 03 1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Meningkatnya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		70 %	550,000,000	162,112,000	(387,888,000)			70 %	178,323,200			
51	2 15 03 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Terleksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	550,000,000	162,112,000	(387,888,000)	APBD		1 Laporan	178,323,200	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 3 1.05	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		70 %	200,000,000	89,300,000	(110,700,000)			70 %	98,230,000			
52	2 15 03 1.05 04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Sumsel	1 Laporan	200,000,000	89,300,000	(110,700,000)	APBD		1 Laporan	98,230,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Meningkatnya Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		70 %	311,275,000	78,360,000	(232,915,000)			70 %	86,196,000			
53	2 15 03 1.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sumsel	1 Dokumen	311,275,000	78,360,000	(232,915,000)	APBD		1 Dokumen	86,196,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Mengikatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	

NO	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RANCANGAN KUA DAN PPAS	USULAN PERUBAHAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	10	11	12	13	14
	2 15 03 1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		75 %	550,000,000	-	(550,000,000)			75 %	-			
54	2 15 03 1.08 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Sumsel	1 Dokumen	550,000,000	-	(550,000,000)	APBD		2 Dokumen	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		20 %	782,500,000	652,936,000	(129,564,000)			20 %	718,229,600			
55	2 15 03 1.09 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Sumsel	1 Unit	657,500,000	652,936,000	(4,564,000)	APBD		1 Unit	718,229,600	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
56	2 15 03 1.09 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Banyuasin	1 Unit	125,000,000	-	(125,000,000)	APBD		1 Unit	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 03 1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		35 %	3,434,250,000	342,600,000	(3,091,650,000)			35 %	376,860,000			
57	2 15 03 1.10 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Sumsel	1 laporan	200,000,000	-	(200,000,000)	APBD		1 laporan	-	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
58	2 15 03 1.10 08	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumsel	1 Laporan	3,234,250,000	342,600,000	(2,891,650,000)	APBD		1 Laporan	376,860,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 03 1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		35 %	350,000,000	141,982,000	(208,018,000)			35 %	156,180,200			
59	2 15 03 1.11 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Sumsel	1 Laporan	350,000,000	141,982,000	(208,018,000)	APBD		1 Laporan	156,180,200	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah penumpang kereta api		2,025,087 orang	342,650,000	192,618,600	(150,031,400)			2,025,087 orang	211,880,460			
	2 15 05 1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		30 %	100,000,000	40,000,000	(60,000,000)			30 %	44,000,000			
60	2 15 05 1.03 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	100,000,000	40,000,000	(60,000,000)	APBD		1 Dokumen	44,000,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 05 1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Meningkatnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		30 %	142,650,000	89,000,000	(53,650,000)			30 %	97,900,000			
61	2 15 05 1.06 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	142,650,000	89,000,000	(53,650,000)	APBD		1 Dokumen	97,900,000	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
	2 15 05 1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		30 %	100,000,000	63,618,600	(36,381,400)			30 %	69,980,460			
62	2 15 05 1.07 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sumsel	1 Dokumen	100,000,000	63,618,600	(36,381,400)	APBD		1 Dokumen	69,980,460	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas	Menginkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	
Jumlah....						65,359,606,532	45,331,787,104	(20,027,819,428)				49,864,965,815			

NO	KODEFIKASI	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RANCANGAN KUA DAN PPAS	USULAN PERUBAHAN RANCANGAN KUA DAN PPAS	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	10	11	12	13	14

Palembang, November 2025

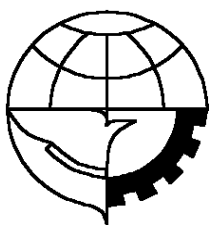
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 1999101 1 002

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB V PENUTUP



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun anggaran 2026 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026.
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun kelima, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] 2025 – 2029.
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.



Copyright 2026, Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Kapten A. Rivai No. 51 Palembang